



# KAJIAN FISKAL REGIONAL

Provinsi Kepulauan Riau

Triwulan I Tahun 2023



# KAJIAN FISKAL REGIONAL

*Provinsi Kepulauan Riau*

Triwulan I Tahun 2023

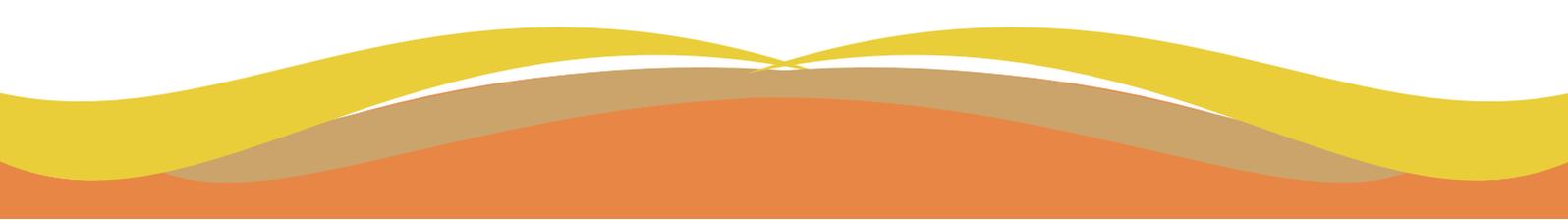
*Tanah melayu bumi bertuah  
Elok alamnya, nikmat makanannya  
KFR ini semoga memberi berkah  
Kepada para pembaca semuanya*





# **KATA PENGANTAR**

*Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Prov. Kepulauan Riau*



# KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajian Fiskal Regional merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu output pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan outcome yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



KFR diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan perekonomian daerah dan dapat menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kualitas tata Kelola fiskal pusat dan daerah.

Penyusunan kajian ini juga akan meningkatkan sinergi antar-stakeholder untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Triwulan I Tahun 2023 ini mencakup informasi perkembangan fiskal regional (APBN, APBD dan konsolidasian) dengan analisis tematik Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Program Ketahanan Pangan, dan Ekonomi berbasis Prioritas Nasional dan Program Strategis Nasional, serta Kinerja Program Pengelolaan Sampah, Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, KADIN Provinsi Kepulauan Riau, akademisi dari Universitas Internasional Batam, Mata Garuda Kepulauan Riau dan seluruh pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Semoga sinergi yang baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan KFR Triwulan I Tahun 2023 ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kajian. Sehingga dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 15 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Soeparjanto'.

**Indra Soeparjanto**

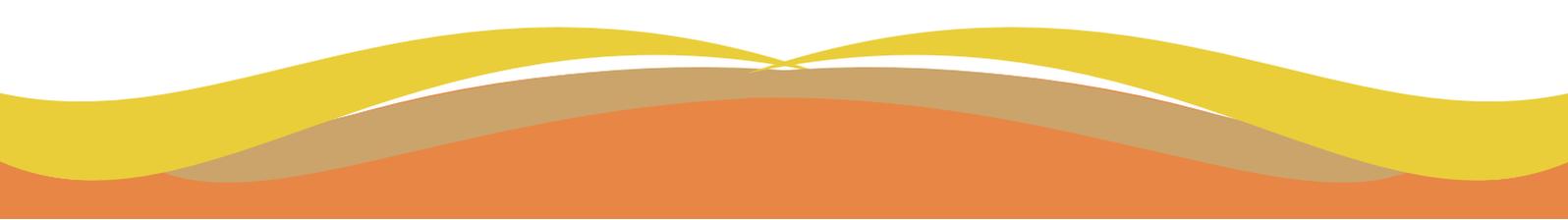
Kepala Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau



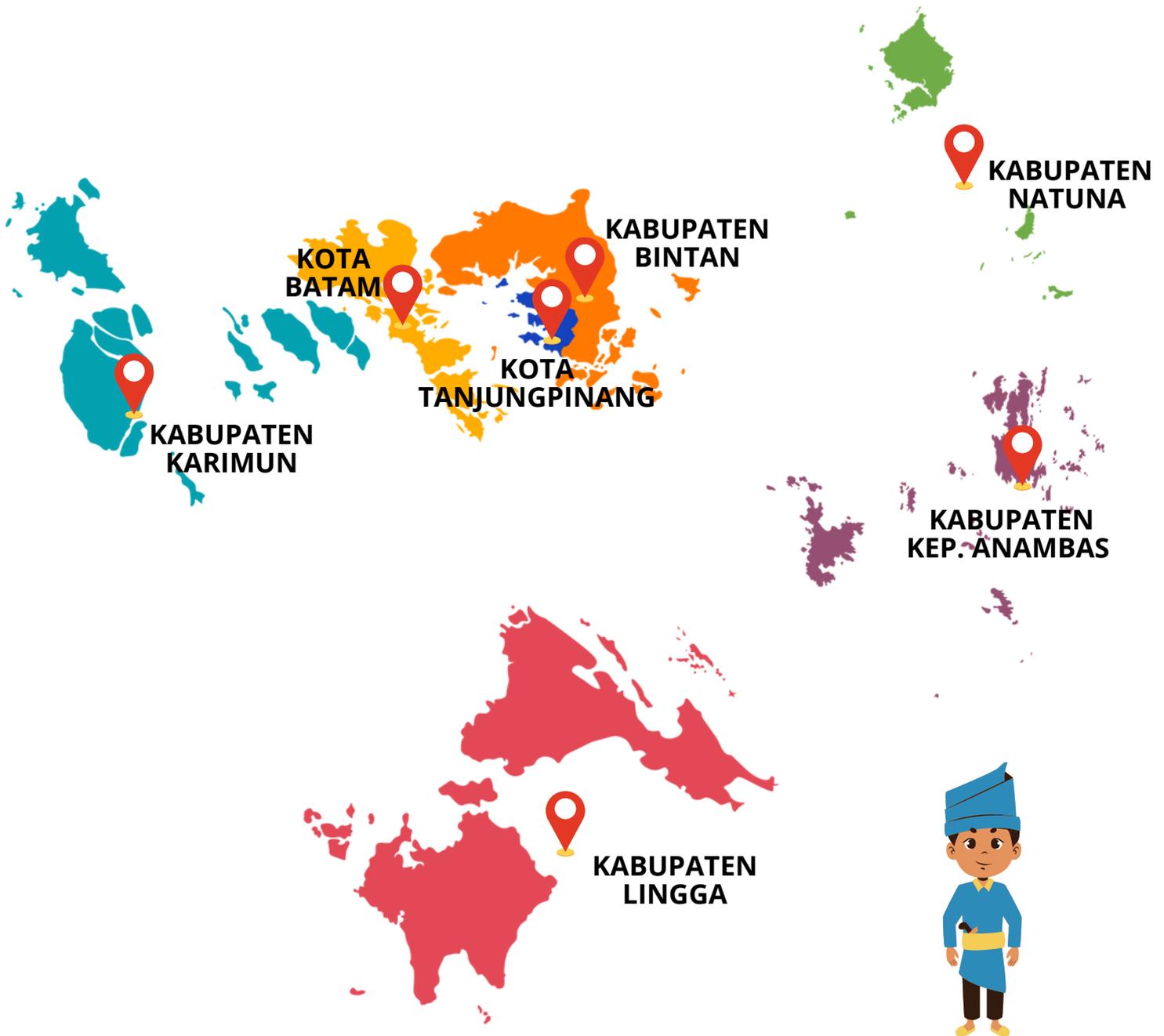


# **SELAYANG PANDANG**

*Tanah Melayu, Kepulauan Riau*



# KEPULAUAN RIAU



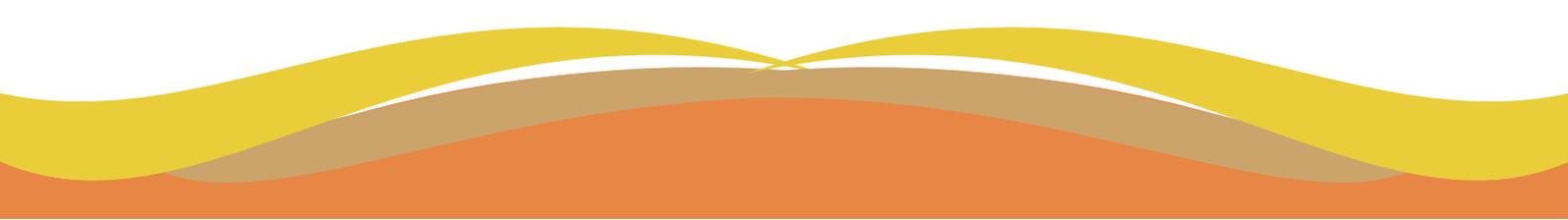
Kepulauan Riau (disingkat Kepri) adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.



# **TIM PENYUSUN**

*Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2023*





## Penanggung Jawab

**Indra Soeparjanto**

(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Prov. Kepulauan Riau)



## Ketua Tim

**Kartika Chandra**

(Kepala Bidang Pembinaan  
Pelaksanaan Anggaran II)



## Kontributor

**Rolly Indra**

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan  
Anggaran II A)



**Ibrohim Husin**

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan  
Anggaran II B)



## Penyunting

**Achmad Fajar Setiawan**

(Kasi Pembinaan Pelaksanaan  
Anggaran II C)



## Desain & Layout

**Lorensia Kristina**

(Pelaksana Seksi PPA II A)



**Joshua Harris**

(Pelaksana Seksi PPA II A)



**Erika Krissanta**

(Pelaksana Seksi PPA II B)



**M. Safarin Riezky**

(Pelaksana Seksi PPA II C)

# DAFTAR ISI

- |                     |                    |                                   |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ii Kata Pengantar   | viii Daftar Isi    | xiv Daftar Gambar                 |
| iv Selayang Pandang | x Daftar Tabel     | xv <i>Dashboard</i> Makro Ekonomi |
| vi Tim Penyusun     | xiii Daftar Grafik | xvii Ringkasan Eksekutif          |



## Analisis Ekonomi Regional

### Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

- 1 Produk Domestik Regional Bruto
- 5 Kontribusi Fiskal terhadap Pembentukan PDRB
- 7 Inflasi
- 7 Ekspor Impor

### Analisis Perkembangan Indikator Kesejahteraan

- 10 Tingkat Kemiskinan
- 11 Tingkat Pengangguran
- 12 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
- 13 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
- 15 Indeks Pembangunan Manusia



## Analisis Fiskal Regional

### Analisis Realisasi APBN

- 21 Pendapatan Negara
- 23 Belanja Negara
- 27 Surplus/Defisit APBN
- 27 Analisis Prognosis APBN Regional
- 27 Pengelolaan BLU Pusat
- 28 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

### Analisis Realisasi APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi)

- 31 Analisis Pendapatan Daerah Konsolidasi
- 32 Analisis Belanja Daerah Konsolidasi
- 32 Surplus/Defisit
- 32 Pembiayaan Daerah
- 32 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB
- 33 Perkembangan BLU Daerah

### Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

- 34 Perkembangan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas
- 36 Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN
- 37 Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

# Pengembangan Ekonomi Daerah



	<b>Pendahuluan</b>	38
	<b>Profil Koperasi pada Sektor Unggulan Daerah</b>	38
	<b>Profil BUMD Unggulan Daerah</b>	40

## Analisis Tematik



### **Analisis Program Ketahanan Pangan**

	Pendahuluan	44
	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan	45
	Sinergi Program Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan	58

### **Analisis Program Pengelolaan Sampah**

	Profil Pengelolaan Sampah Daerah Berdasarkan Jakstrada	63
	Dukungan Program dan Anggaran yang Bersumber dari Fiskal	65
	Rekomendasi Kebijakan bagi Pusat dan Daerah	67

### **Analisis Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak**

	Profil Kondisi/Kebijakan/Target Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Daerah	67
	Dukungan Program dan Anggaran yang bersumber dari APBN	68
	Dukungan Program dan Anggaran yang bersumber dari APBD	69
	Rekomendasi Kebijakan bagi Pusat dan Daerah	70

### **Analisis Reviu Kinerja Program PSN Ongoing Project**

	Profil Proyek	70
	Manfaat yang Diharapkan	73

## Kesimpulan dan Rekomendasi



	<b>Kesimpulan</b>	77
	<b>Rekomendasi</b>	88

# DAFTAR TABEL

3	1.1 - PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (dalam miliar rupiah)
4	1.2 - PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Dalam Rp M)
6	1.3 - Perkembangan Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2020-2022 dengan angka perhitungan PDRB Kumulatif per Triwulan I - 2023 (yoy)
16	1.4 - IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan riau tahun 2017-2022
20	2.1 - Perkembangan I-Account APBN di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 (Miliar Rupiah)
25	2.2 - Belanja menurut Kementerian/Lembaga 10 K/L dengan Pagu Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau
26	2.3 - Perkembangan Belanja Negara Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 (Rupiah)
27	2.4 - Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Prov Kepulauan Riau
28	2.5 - Perkembangan Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
30	2.6 - Realisasi PN di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2023 (miliar)
31	2.7 - Perkembangan I-Account APBD KOnsolidasi Pemda Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023
33	2.8 - Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Prov Kepri terhadap PDRB
34	2.9 - Perkembangan Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Kepulauan Riau Tahunan 2021 dan 2022
36	2.10 - Realisasi PNBPN lingkup Provinsi Kepulauan Riau - Realisasi PNBPN lingkup Provinsi Kepulauan Riau
37	2.11 - Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dan Belanja Modal
45	4.1 - Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021 seluruh Provinsi di Indonesia
46	4.2 - Luas Panen Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022
47	4.3 - Produktivitas Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022
48	4.4 - Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022
48	4.5 - Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022
49	4.6 - Wilayah Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran (kg), 2021-2022

# DAFTAR TABEL

- 50 4.7 - Wilayah Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan (kg) , 2021-2022
- 50 4.8 - Wilayah Sentra Produksi Daging Unggas (kg) , 2021-2022
- 51 4.9 - Wilayah Sentra Produksi Telur Unggas (kg), 2021-2022
- 52 4.10 - Realisasi Pengadaan Beras Per Bulan oleh Sub Divisi Regional Bulog Tanjungpinang (Ton), (2017-2022)
- 53 4.11 - Realisasi Pengadaan Beras Per Bulan oleh Sub Divisi Regional Bulog Batam (kg), (2022)
- 54 4.12 - Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau (rupiah), 2020-2022
- 55 4.13 - Garis Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-September 2022
- 55 4.14 - Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021 dan 2022
- 56 4.15 - Lima Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan
- 58 4.16 - Pagu dan Realisasi APBN Kepri untuk Program Ketahanan Pangan, dalam Rp miliar (2022)
- 58 4.17 - Pagu dan Realisasi APBN Kepri untuk Program Ketahanan Pangan, dalam Rp miliar (TW I 2023)
- 59 4.18 - Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk Ketahanan Pangan di tahun 2023
- 61 4.19 - Anggaran Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau untuk Ketahanan Pangan di tahun 2022
- 64 4.20 - Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 64 4.21 - Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
- 65 4.22 - Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah di Kepri (2020-2022)
- 65 4.23 - Dukungan APBN untuk Program Pengelolaan Sampah di Prov Kepri
- 66 4.24 - APBD untuk Program Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepri
- 66 4.25 - Dukungan Fiskal (APBD) untuk Program Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang
- 67 4.26 - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak menurut Kab/Kota di Kepri Tahun 2018-2022
- 68 4.27 - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kab/Kota di Kepri (2018-2022)
- 68 4.28 - Dukungan APBN untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Prov Kepri
- 74 4.29 - Development Impact Kawasan Industri Pulau Ladi

# DAFTAR GRAFIK

2	1.1 - Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023
7	1.2 - Inflasi Prov. Kepri Januari-Maret 2023
10	1.3 - Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepri
11	1.4 - Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Prov Kepulauan Riau Tahun 2019-2021
12	1.5 - Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Kepri
13	1.6 - Gini Ratio Provinsi Kepri (2019-2022)
14	1.7 - Perkembangan NTP Provinsi Kepri 2022-2023
14	1.8 - Perkembangan NTN Provinsi Kepri 2022-2023
15	1.9 - IPM Provinsi Kepri dan Nasional (2017-2022)
16	1.10 - Tingkat IPM seluruh Provinsi di Indonesia (2022)
17	1.11 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2022
21	2.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
21	2.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan I Tahun 2023
23	2.3 - Tax Ratio Provinsi Kepri
23	2.4 - Perkembangan Realisasi Belanja Negara
24	2.5 - Porsi Realisasi Belanja Negara Triwulan I Tahun 2023
29	2.6 - Penyaluran Kredit Program per Wilayah lingkup Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2023
29	2.7 - Proporsi Debitur Kredit Program per Wilayah lingkup Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2023
31	2.8 - Porsi Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2023
31	2.9 - Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
32	4.1 - Realisasi Pengadaan Beras Per tahun oleh Subdivre BULOG Tanjungpinang (ton), 2017-2022
63	4.2 - Pengaturan Jakstrada Provinsi Kepulauan Riau
69	4.3 - Tren Pagu Program Air Bersih dan Sanitasi Layak (2018-2023)

# DAFTAR GAMBAR

8	1.1 - Ekspor Triwulan I Tahun 2023
9	1.2 - Impor Triwulan I Tahun 2023
40	3.1 - Koperasi Marin Agri Sejahtera
40	3.2 - PT Pelabuhan Kepri
41	3.3 - Pelayanan Yang Diberikan oleh PT Pelabuhan Kepri
71	4.1 - Progres Kawasan Strategis Industri Pulau Ladi
72	4.2 - Peta Posisi Strategis Kawasan Industri Pulau Ladi
72	4.3 - Mangrove Initiative Kawasan Industri Pulau Ladi
73	4.4 - Development Impact Kawasan Industri Pulau Ladi

# DASHBOARD MAKRO-

## Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

### PDRB

PDRB ADHK  
Rp48,81 T

PDRB ADHB  
Rp80,32 T



### Pertumbuhan Ekonomi

Prov. Kepri Nasional



### Inflasi Tw I (y-o-y)

Prov. Kepri Nasional



- Pertumbuhan ekonomi Kepri **6,51%** dengan PDRB ADHK Rp48,81 T dan PDRB ADHB Rp80,32 T.
- Komoditas Ekspor (US\$5.159,95 juta) dan Impor (US\$4.930,17 juta) di Prov Kepri turut menyumbang dampak bagi perekonomian
- Inflasi sebesar **4,77 (yoy)** sebagai dampak kebijakan BBM.



### Ekspor (dalam juta US\$)

	TW I 2022	TW I 2023	Growth
Migas	1.114,55	1.032,62	-7,35%
Nonmigas	3.378,40	4.127,34	22,17%
<b>Total</b>	<b>4.492,95</b>	<b>5.159,95</b>	<b>14,85%</b>

### Negara Tujuan Ekspor Terbesar Sektor Migas



### Negara Tujuan Ekspor Terbesar Sektor Non-Migas



### Impor (dalam juta US\$)

	TW I 2022	TW I 2023	Growth
Migas	813,70	984,06	20,94%
Nonmigas	3.204,78	3.946,10	23,13%
<b>Total</b>	<b>4.018,48</b>	<b>4.930,17</b>	<b>22,69%</b>

### Negara Asal Impor Terbesar Sektor Migas



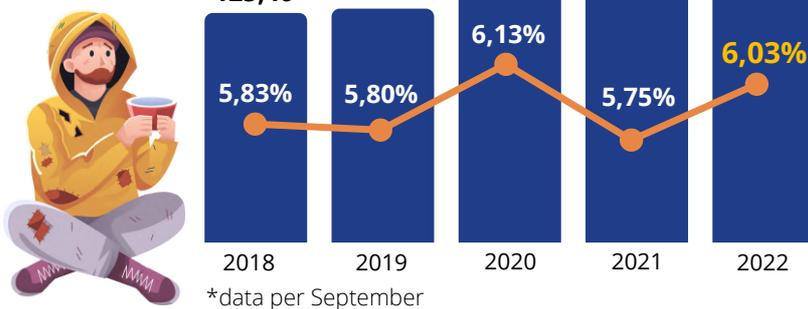
### Negara Asal Impor Terbesar Sektor Non-Migas



## Perkembangan Indikator Kesejahteraan

### Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

ribu jiwa



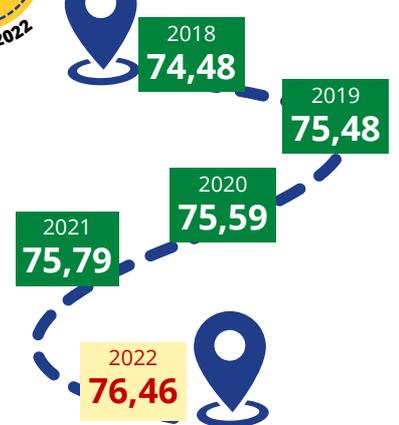
### Gini Ratio

**0,325**  
Per Sept 2022

NTP **105,62**  
▲ 1,30%

NTN **111,81**  
▲ 1,04%

### Indeks Pembangunan Manusia



- Indeks Pembangunan Manusia Kepri (**76,46**) pada September 2022 menunjukkan angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir
- Tingkat Pengangguran Terbuka (**7,61%**) konsisten turun dalam 3 tahun terakhir
- Persentase Penduduk Miskin yang turun pada tahun 2021 (5,75%) kembali meningkat di tahun 2022 (**6,03%**) namun tidak setinggi tahun 2020 (6,13%).
- Penyumbang kemiskinan terbesar yaitu **beras, rokok filter, dan telur ayam ras**
- Nilai Tukar Nelayan (**111,81**) naik 1,04%
- Nilai Tukar Petani (**105,62**) naik 1,30%

### Tingkat Pengangguran Terbuka

**-0,41**

Feb 2023 **7,61%**

Feb 2022 **8,02%**

Feb 2021 **10,12%**

# FISKAL REGIONAL

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

### Realisasi Pendapatan

**20,14%**

PNBP

Pajak

**Growth (yoy)**  
**11,66%**



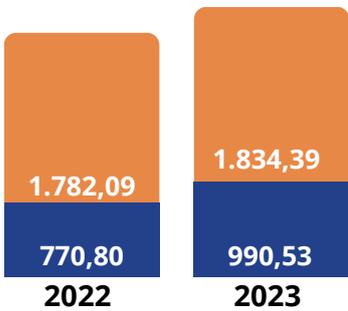
### Realisasi Belanja

**17,17%**

TKDD

Bel. Pempus

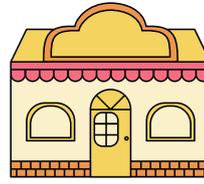
**Growth (yoy)**  
**10,66%**



Realisasi pendapatan dan belanja pada triwulan I mengalami **pertumbuhan (y-o-y)**.

## Pengembangan Ekonomi Daerah

### Koperasi Unggulan



#### Koperasi Marin Agri Sejahtera

Produsen perikanan yang memiliki potensi menjadi komoditas ekspor

### BUMD Unggulan



#### PT Pelabuhan Kepri

Merupakan BUMD penyedia jasa pelabuhan

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Konsolidasi

(miliar Rupiah)

	TW I 2022	TW I 2023
PAD	634,34	952,68
Transfer	1.513,26	1.774,05
Lain-lain	-	2,40
<b>Total</b>	<b>2.147,60</b>	<b>2.729,14</b>

### Realisasi Pendapatan

**19,84%**

**Growth (yoy)**  
**27,08%**

Realisasi pendapatan maupun belanja daerah **tumbuh** di Prov. Kepulauan Riau.

### Realisasi Belanja

**12,02%**

**Growth (yoy)**  
**32,03%**

(miliar Rupiah)	TW I 2022	TW I 2023
<b>B. Operasi</b>	<b>1.165,62</b>	<b>1.412,87</b>
B. Modal	62,77	80,74
B. Tak Terduga	0,21	1,06
Transfer	85,40	240,26
<b>Total</b>	<b>1.314,00</b>	<b>1.734,93</b>

## Peringkat Indeks Ketahanan Pangan



### Jumlah Timbulan Sampah (Ribu Ton)

470,1      488,16      513,55

### Jumlah Pengurangan Sampah (Ribu Ton)

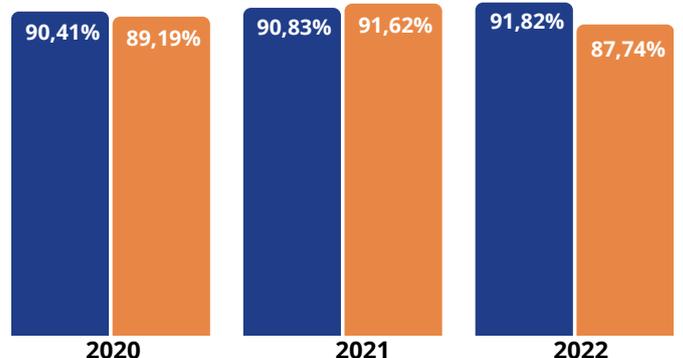
90,03      105,71      75,04

**Realisasi Pengelolaan Sampah Kepri (2020-2022)**

### Jumlah Penanganan Sampah (Ribu Ton)

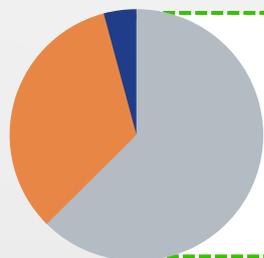
338,33      336,64      363,26

## Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Prov Kepri



## Kredit Program Rp239 M

- KUR Kecil Rp149,4 M (**62,51%**)
- KUR Mikro Rp79,66 M (**33,33%**)
- KUR Super Mikro Rp9,94 M (**4,16%**)



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Indikator Makro Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,51 (yoy), tumbuh sebesar 2,83 persen dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan I-2022 (yoy). Jika dilihat per triwulan pada akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, pada triwulan I-2023 perekonomian Kepri mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen (q-to-q). Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau Triwulan I-2023 memberikan kontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera (terbesar ke-5), kontribusi terbesar ke-5 tersebut masih tetap konsisten dengan pencapaian triwulan sebelumnya. PDRB Kepulauan Riau mendukung PDB nasional dengan kontribusi sebesar 1,58%.

Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 sebesar 4,77 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 4,97 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Maret 2022 menjadi 113,22 pada Maret 2023. Tingkat deflasi *month to month* Maret 2023 Kepri sebesar 0,29 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Selain itu Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis untuk melakukan ekspedisi global, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan potensi ekspor produk Kepri dengan lebih maksimal. Peningkatan ekspor juga dapat didorong melalui produktivitas UMKM dalam mendorong produk *Go Global* yang ada di Kepri. Produktivitas tersebut juga dapat ditopang melalui dukungan Kredit Program (KUR dan UMi) yang berasal dari APBN. Selain itu, Kanwil Khusus Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendorong UMKM di Provinsi Kepri untuk ekspor melalui program Klinik Ekspor.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen menjadi 76,46 pada tahun 2022 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 75,79. IPM Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut, sedangkan kota Batam mendapatkan peringkat 26 untuk tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03%). Apabila dibandingkan pada bulan Maret 2022 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 2,79 ribu orang. Tingkat Ketimpangan di Kepri masuk dalam kategori sedang dengan nilai koefisien Gini mencapai 0,325 poin pada September 2022, mengalami penurunan 0,017 di bandingkan dengan periode Maret 2022. Tingkat Ketimpangan Kepri masih berada dibawah tingkat ketimpangan Nasional yang mencapai 0,381. Tingkat Pengangguran terbuka di Kepri pada Februari 2023 mencapai angka 7,61 persen turun 0,41 poin dibandingkan dengan Februari 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.107.353 orang, turun sebanyak 152.359 orang dari Agustus 2022.

## Analisis Fiskal Regional

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.379,15 miliar atau 20,14 persen dari pagu pada periode Q1 2023. Penerimaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara, dengan porsi 89,23 persen sedangkan dan PNBPN dengan porsi 10,77 persen. Penerimaan Pajak Dalam Negeri meningkat hingga Rp345,63 miliar (23,16%). Tiap komponen penerimaan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2022. Penerimaan cukai meningkat karena terdapat kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen untuk rokok jenis tertentu yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Selain itu, terdapat pabrik rokok di Batam berorientasi ekspor, namun pada periode triwulan I tahun 2023, porsi penjualan lokal lebih besar dibandingkan dengan penjualan ekspor.

Realisasi belanja negara sebesar Rp2.825 miliar atau 17,17% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 10,66 persen jika dibandingkan dengan periode Q1 2022. Kinerja belanja modal semakin membaik dibanding periode yang sama ditahun 2022. Realisasi belanja modal pada Q1 sebesar Rp122,35 miliar dari pagu Rp2.333,52 miliar atau sebesar 5,24 persen dari pagu. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal sebesar Rp45,03 miliar dengan pagu sebesar Rp1.763,28 miliar atau 2,55 persen dari pagu. Realisasi TKDD periode Q1 2023 sebesar Rp1.834,39 miliar atau 23,06% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut meningkat 2,93 persen dibandingkan dengan realisasi Q1 2022.

Realisasi Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.734,93 miliar atau 12,02 persen dari pagu. Realisasi Q1 2023 lebih baik dari periode sebelumnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 32,03 persen. Tiap komponen belanja daerah mencatatkan peningkatan realisasi dibandingkan periode Q1 2022. Realisasi Belanja Operasi sebesar 13,21 persen dari atau tumbuh 21,21 persen, realisasi Belanja Modal sebesar 3,32 persen atau tumbuh 28,63 persen, realisasi belanja transfer sebesar 19,83 persen atau tumbuh sebesar 181,34 persen dibanding periode Q1 2023.

## Pengembangan Ekonomi Daerah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi Geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Dengan wilayah yang didominasi oleh perairan, dimana 96 persen wilayahnya adalah lautan dengan 1.350 pulau besar. Dengan kondisi geografis ini, tentunya potensi kelautan Provinsi Kepulauan Riau sangat besar dan masih belum dimaksimalkan.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi wilayah Kepulauan Riau yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi *local issue* dimana potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dari Kepulauan Riau belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan sektor unggulan daerah yakni sektor perikanan, diangkat profil Koperasi Marin Agri Sejahtera yang telah dirintis sejak 2018 dan menjadi produsen kelautan perikanan. Kegiatan koperasi yang pada awalnya berupa kegiatan budidaya yang dilakukan berbasis kelompok, saat ini telah dikembangkan menjadi kegiatan budidaya skala industri yang tetap berbasis kelompok sehingga saat ini tercipta budidaya berbasis plasma inti yang memiliki daya ungkit yang lebih baik.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Perseroda PT Pelabuhan Kepri pada tahun 2021 maka telah sah perubahan hukum Perseroda tersebut yang menjadi babak baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kepri. Dengan adanya Perda ini dan Provinsi

Kepulauan Riau yang 96 persen luasnya adalah laut dengan potensi keluatan yang tinggi, PT Pelabuhan Kepri diharapkan mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri khususnya di bidang kepelabuhanan.

## Analisis Tematik

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam kategori yang rendah yang apabila dirinci lebih dalam dapat diketahui komponen dengan nilai terendah yakni komponen ketersediaan, sedangkan komponen keterjangkauan dan pemanfaatan relatif tinggi. Memperhatikan kondisi geografis Kepulauan Riau yang 96 persennya merupakan lautan dan struktur tanah bebatuan serta pertambangan membawa konsekuensi keterbatasan sektor pertanian bergerak secara optimal. Kepri bukanlah sebagai wilayah produsen sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap negara dan provinsi lain dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehubungan dengan nilai IKP, Provinsi Kepri berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Beberapa kendala dan permasalahan terkait dengan ketahanan pangan, yaitu : Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan di Kepri dikarenakan tidak meratanya nilai IKP antara wilayah kota dan kabupaten, Ketergantungan Pasokan Pangan dari luar daerah Kepulauan Riau masih relatif tinggi, Cadangan pangan pemerintah daerah masih rendah, Keterbatasan produksi karena faktor cuaca (wilayah Kepri masuk non Zona Musim), kondisi lahan baik dari segi luas lahan dan kualitas lahan, SDM petani serta pengairan yang belum optimal, Faktor cuaca yang tidak menentu yang dapat menimbulkan ombak tinggi yang menjadi permasalahan dalam penyaluran distribusi, Persoalan distribusi karena Kepri wilayah kepulauan yang terpisah oleh lautan dan jarak antar pulau cukup jauh, dan Fluktuasi harga karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran komoditas pangan.

Terkait pengelolaan sampah, berdasarkan realisasi pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Kepri belum mencapai target persentase pengurangan dan penanganan sampah. Dukungan APBN untuk program pengelolaan sampah di provinsi Kepri dianggarkan pada tahun 2018, 2021, dan 2023. Anggaran program pengelolaan sampah tersebut dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hal yang perlu menjadi perhatian adalah tidak tercapainya target Pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020-2022.

Terkait Air Bersih, persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 91,82 persen atau meningkat 1,09 persen jika dibandingkan tahun 2021. Kepulauan Anambas memiliki persentase akses terhadap air minum layak yang rendah di Kepri (28,56%), Sedangkan kota Batam memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap air minum layak (95,34%). Mayoritas Kota/Kabupaten di Kepri memiliki persentase diatas 80 persen untuk akses terhadap air minum layak, kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas (28,56%).

Terkait Sanitasi Layak, persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 87,74 persen atau menurun 4,23% jika dibandingkan tahun 2020. Kepulauan Anambas memiliki persentase akses terhadap sanitasi layak yang rendah di Kepri (29,07%). Sedangkan Kab. Karimun memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap sanitasi layak (97,01%). Mayoritas Kota/Kab di Kepri memiliki persentase diatas 70 persen untuk akses terhadap sanitasi layak, kecuali Kabupaten Lingga (65,51%) dan Kepulauan Anambas (29,07%).

Terkait Proyek Strategis Nasional, Kawasan Industri Pulau Ladi merupakan kawasan industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri yang berwawasan lingkungan dengan prinsip *eco-green industry* dan *zero waste*. Kawasan Industri ini telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat No. 654/259/B.UM-SET/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Pengelolaan Limbah di Pulau Ladi Kota Batam.

Sampai dengan triwulan I 2023, Progres Kawasan Industri Ladi sudah dibuat Studi Kelayakan, *Masterplan*, *Urban Design Guideline* (UDGL) dan sedang dalam proses penyelesaian *Detailed Engineering Design* (DED) untuk tahapan Dokumen Perencanaan. Dikarenakan Kawasan Industri Ladi merupakan Proyek Strategis Nasional maka tahapan pelaksanaan setiap tahap alur prosesnya dapat dilakukan secara paralel. Oleh karena itu di tahap Perizinan telah diselesaikan KKPR Darat dan Laut serta telah diselesaikan Struktur Organisasi pada tahap operasional.

## Rekomendasi

Salah satu penyebab penyerapan belanja modal setiap tahunnya adalah gagal lelang. Dalam upaya mengatasinya, diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang saat DIPA telah diterima pada Year-1 (Pra DIPA bulan November-Desember). Hal ini untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, sehingga proses lelang dapat dilaksanakan lebih awal.

Kepri memiliki karakteristik geografis yang berpotensi meningkatkan produktivitas hasil kekayaan laut, namun penyaluran kredit program tertinggi sampai saat ini masih sektor perdagangan. Dalam upaya untuk memperluas akses pembiayaan Kredit Program kepada masyarakat khususnya kepada nelayan, pemerintah pusat agar memformulasikan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi/aktivitas usaha nelayan yang sangat bergantung kepada kondisi laut dan cuaca, sebagai contoh: proses pembayaran angsuran kredit disesuaikan dengan masa kerja (melaut) dari nelayan.

Keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tahun 2022, dapat dimaksimalkan lagi dengan menggunakan data wajib pajak dari PPS, untuk menggali dan mengoptimalkan potensi dan kepatuhan dari wajib pajak.

Perlunya optimalisasi peran 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ), yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Nongsa, KEK Galang Batang dan KEK Batam Aero, untuk mendorong peningkatan penanaman modal dalam upaya menurunkan angka TPT. Selain KEK yang telah ada saat ini, guna memaksimalkan potensi kelautan Kepulauan Riau, dapat disiapkan pembentukan KEK Perikanan Budidaya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan masing-masing dapat berperan dalam ekosistem budidaya.

Sehubungan dengan dukungan terhadap sektor perdagangan, diperlukan alokasi anggaran fiskal untuk mendorong pembangunan satu data UMKM yang terintegrasi sehingga setiap dukungan fiskal bagi UMKM di Kepri dapat tepat sasaran dan memiliki dampak yang terukur.

Sehubungan dengan kegiatan labuh jangkar, diperlukan regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah atas satgas keamanan wilayah labuh jangkar, regulasi atas jenis dan tarif, regulasi terkait pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan jasa labuh dan regulasi lainnya yang dapat mempermudah pelayanan PT Pelabuhan Kepri sehingga dapat meningkatkan minat *stakeholders* dalam memanfaatkan layanan wilayah labuh jangkar yang berada dibawah wilayah kerja PT Pelabuhan Kepri.

Kebijakan Pemerintah Kota Batam untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.

Pemerintah Kota Batam mengadakan program penagihan intensif, keringan pajak, dan “jemput bola” menggelar *roadshow* pelayanan pembayaran pajak. Program untuk mengoptimalkan pendapatan PBB dan BPHTB tersebut dapat direplikasi oleh pemda lainnya.

Terkait Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan daerah rawan pangan dimana di Kepulauan Riau terdapat beberapa kabupaten/kota yang rawan pangan, oleh karena itu pemetaan dapat dilakukan sampai pada tingkat kecamatan. Sebagai contoh yakni beberapa wilayah di Lingga, Karimun dan beberapa wilayah di perkotaan seperti di Batam dan Tanjungpinang.

Peningkatan produktifitas melalui program Kepri Mandiri Cabai 2022-2024 perlu dikawal pelaksanaannya hingga mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi ketersediaan cabai di Kepri mengingat tingginya harga cabai yang menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kepri pada tahun 2022.

Terkait persampahan, diperlukannya Anggaran tambahan bagi DLH Pemprov untuk dapat mengadakan TPA Regional yang akan mengelola sampah untuk regional satu pulau Bintan. Selain itu Anggaran tambahan juga diperlukan untuk mendorong peningkatan pengadaan jumlah kontainer sampah di kota Tanjungpinang, untuk pembelian kapal guna mengosongkan septiktank, selain itu dibutuhkan sarpras pendukung lainnya, serta diperlukan anggaran tambahan untuk mengadakan alat berat yang baru di kota Tanjungpinang.

Terkait Air Bersih dan Sanitasi, peningkatan akses terhadap sanitasi layak dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi hidup bersih serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung sanitasi layak khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam upaya mengatasi rendahnya persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah dapat menjalankan program hibah air minum dalam upaya meningkatkan akses air minum yang layak. Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terkait PT Kawasan Industri Ladi yang merupakan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemenuhan luasan minimal zona industri dengan dilakukan dengan penambahan 17 Ha mengingat proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional.

Pendapatan BLU turun karena pencatatan internal BLU (FBMS) belum dapat terkoneksi/migrasi langsung dengan aplikasi SAKTI di KPPN. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Pengawas BP Batam agar melakukan monitoring secara langsung dan intensif terhadap pengembangan aplikasi FBMS, sehingga dapat terkoneksi secara langsung dengan aplikasi SPAN. Selain itu, Direktorat SITP juga dapat bekerja sama dengan BLU untuk mengembangkan aplikasi SAKTI yang dapat mengakomodir pencatatan BLU, mengingat aplikasi SAKTI dikembangkan untuk satker non BLU.

**BAB**

**1**

**ANALISIS EKONOMI REGIONAL**

**Masjid Tanwirun Naja (Masjid Tanjak)  
di Kota Batam**

# ANALISIS EKONOMI REGIONAL



## 1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

### 1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Grafik 1.1 - Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah), 2023.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,51 (yoy) atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,83 persen dibandingkan dengan Triwulan I-2022 (yoy). Jika dilihat per triwulan pada akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, pada triwulan I-2023 perekonomian Kepri mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen (q-to-q).

#### PDRB Menurut Pengeluaran

##### Analisis Komposisi Dan Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDRB

Pada triwulan I 2023 PDRB (ADHB) mencapai Rp80,32 Triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp34,83 T (43,37%), kemudian disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi kedua tertinggi sebesar Rp33,07 T (41,17%) pada PDRB Regional Kepri. Nilai Ekspor barang dan jasa meningkat kontribusinya pada triwulan I 2023 dikarenakan naiknya harga komoditas unggulan Provinsi Kepri di pasar global, yaitu mesin dan peralatan listrik.

Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau Triwulan I-2023 memberikan kontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera yang merupakan terbesar ke-5 yang tetap konsisten dengan pencapaian posisi kontribusi triwulan sebelumnya. PDRB Kepulauan Riau mendukung PDB nasional dengan kontribusi sebesar 1,58 persen. Untuk regional Sumatera, kontribusi terbesar masih diberikan oleh PDRB Riau sebesar 23,05 persen, sedangkan yang terkecil PDRB Bengkulu dengan 2,12 persen.

Tabel 1.1 - PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (dalam miliar rupiah)

No	Komponen	Harga Berlaku					Harga Konstan					
		Q1 2022	Q4 2022	Kontribusi Q4 2022 (%)	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023 (%)	Q1 2022	Q4 2022	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023 (%)	Growth (q-to-q)	Growth (yoy)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29,28	32,50	39,13%	33,07	41,17%	18,38	19,27	19,40	39,74%	0,63%	5,52%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,18	0,18	0,22%	0,19	0,23%	0,10	0,10	0,10	0,21%	2,84%	0,65%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,93	5,92	7,13%	2,11	2,63%	1,16	3,28	1,22	2,50%	-	62,75%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,49	34,72	41,81%	34,83	43,37%	18,15	19,57	19,54	40,05%	-	0,13%
5	Perubahan Inventori	0,17	1,44	1,74%	0,67	0,84%	0,10	0,82	0,38	0,78%	-	53,90%
6	Net Expor	105,72	113,30	136,45%	115,35	143,61%	76,56	79,45	78,97	161,81%	-	0,60%
7	Impor Barang dan Jasa	95,26	105,03	-126,49%	105,91	-131,86%	68,63	72,02	70,81	145,08%	-	1,68%
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>72,51</b>	<b>83,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,82</b>	<b>50,48</b>	<b>48,81</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>3,31%</b>

Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

### Analisis Pertumbuhan (Growth)

Pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada Triwulan I-2023 terdapat peningkatan kinerja perekonomian yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan pada seluruh komponen PDRB Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Bila dibandingkan dengan tahun lalu, komponen Pengeluaran dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Perubahan Inventori yang mencapai 269,70 persen dan diikuti PMTB mencapai 7,71 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan 5,52 persen. Peningkatan tersebut didukung oleh peran fiskal berupa pertumbuhan belanja pegawai sebesar 13,06 persen, yaitu peningkatan dari Rp.366 juta menjadi Rp.414 Juta di Triwulan I 2023.

### Analisis Pertumbuhan dan Peranan Belanja Pemerintah (G)

Belanja pemerintah non pegawai tumbuh sebesar 42,52 persen dibandingkan dengan Triwulan I 2022. Hal ini berdampak pada tumbuhnya komponen belanja pemerintah (5,29% persen) pada PDRB. Komponen belanja pemerintah memberikan kontribusi sebesar 2,63 persen terhadap PDRB Triwulan I 2023, kontribusi tersebut meningkat bila dibandingkan Triwulan I 2022 (1,93%). Nilai pertumbuhan sebesar 36,27 persen tersebut menandakan belanja pemerintah memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian triwulan I 2023.

### Analisis Komposisi dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB

Tabel 1.2 - PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Dalam Rp M)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (dalam triliun rupiah)				Harga Konstan (dalam triliun rupiah)				
	Q1 2022	Kontribusi Q1 2022	Q1 2023	Kontribusi Q1 2023	Q1 2022	Q4 2022	Q1 2023	Growth (q-to-q)	Growth (yoy)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	2,95%	2,37	2,95%	1,29	1,44	1,36	-5,88%	5,05%
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	9,68	13,35%	8,34	<b>10,38%</b>	6,08	5,14	5,18	0,73%	-14,86%
<b>Industri Pengolahan</b>	30,42	41,95%	34,07	<b>42,41%</b>	19,38	21,28	20,89	-1,86%	7,77%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	1,05%	0,87	1,08%	0,45	0,51	0,51	-1,55%	12,30%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,10%	0,08	0,10%	0,05	0,06	0,06	1,85%	21,24%
<b>Konstruksi</b>	13,58	18,73%	15,38	<b>19,15%</b>	8,25	9,95	8,87	-10,82%	7,56%
<b>Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	6,25	8,62%	7,09	<b>8,82%</b>	3,7	3,81	3,88	1,88%	4,99%
Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,57%	1,63	2,03%	0,74	0,98	0,99	0,70%	33,32%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	1,21%	1,64	2,04%	0,64	1,17	1,18	0,82%	83,62%
Informasi dan Komunikasi	1,85	2,55%	2,31	2,88%	1,53	1,89	1,91	1,04%	24,62%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	2,66%	2,13	2,65%	1,26	1,31	1,32	0,76%	4,95%
Real Estate	0,78	1,08%	0,91	1,14%	0,56	0,62	0,62	0,26%	11,46%
Jasa Perusahaan	0	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,00	0,00	0,54%	-81,30%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,3	1,79%	1,50	1,87%	0,8	1,11	0,86	-22,03%	7,72%
Jasa Pendidikan	0,99	1,36%	1,12	1,39%	0,54	0,59	0,59	0,89%	9,46%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,85%	0,68	0,84%	0,45	0,50	0,48	-4,78%	5,80%
Jasa lainnya	0,14	0,19%	0,21	0,26%	0,09	0,12	0,12	0,12%	30,13%
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>	<b>72,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,319</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,82</b>	<b>50,48</b>	<b>48,81</b>	<b>-3,31%</b>	<b>6,52%</b>

Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.



Dari data PDRB Triwulan I 2023 berdasarkan sektor Lapangan Usaha, terdapat tiga sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara signifikan, yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi masing-masing terhadap PDRB sebesar 42,41 persen, 19,15 persen dan 10,38 persen.

### **Analisis Pertumbuhan (Growth)**

Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar pembentuk struktur PDRB Kepri di Triwulan I-2023 menurut lapangan usaha adalah yang tumbuh sebesar 7,77 persen (yoy). Diantara ketiga sektor penyumbang paling signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, satu diantaranya mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan I 2023, yaitu pertambangan dan penggalian sebesar -14,86 persen (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan positif tertinggi pada triwulan I terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 83,62 persen, seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata.

### **Analisis Pertumbuhan, Kontribusi, dan Peranan Sektor Unggulan dan Potensial**

#### **a. Sektor Unggulan**

Sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Riau adalah Industri Pengolahan dengan porsi 42,42 persen. Sektor ini selalu menjadi penyumbang porsi terbesar setiap triwulannya di Provinsi Kepri. Selain itu sektor unggulan lainnya adalah sektor Konstruksi (19,15%), dan sektor Pertambangan dan Penggalian (10,38%). Pertumbuhan beberapa sektor tersebut dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif, yakni Industri Pengolahan (-1,86%) dan Konstruksi (-10,82%).

#### **b. Sektor Potensial**

Sektor potensial di Provinsi Kepulauan Riau adalah (a) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (proporsi 8,82%) dan (b) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (proporsi 2,95%). Pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibandingkan triwulan sebelumnya cukup positif sebesar 1,88 persen, sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh negative pada -5,88 persen.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi wilayah yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Selain itu dengan meningkatnya konsumsi pasca Covid-19, sektor Perdagangan juga menjadi sektor potensial yang dapat meningkat seiring dengan landainya penyebaran Covid-19.

### 1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

Memiliki perekonomian yang maju merupakan salah satu tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Meski kegiatan ekonomi sempat mengalami guncangan akibat perang dagang Amerika-China pada kuartal akhir 2022, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I-2023 telah tumbuh menggembirakan pada angka 6,51 persen. Angka tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang berada pada 2,83 persen (*c-to-c*).

Peningkatan tersebut tidak lepas dari momentum penguatan kinerja ekonomi secara global, serta kebijakan *countercyclical* (meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pemungutan pajak dalam masa resesi) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang mulai kembali *on track*. Kebijakan tersebut tertuang di dalam instrumen keuangan negara, yaitu APBN yang diharapkan dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian.

Tabel 1.3 Perkembangan Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2020-2022

Uraian	2022	2023	Growth
Belanja APBN	1.011,07	2.823,92	179,30%
Belanja Modal - Belanja Pemerintah Pusat	45,03	122,35	171,71%
PDRB	45.822,24	48.805,24	6,51%
<b>Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>2,21%</b>	<b>5,79%</b>	<b>162,23%</b>
<b>Rasio Investasi Pemerintah</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,25%</b>	<b>155,10%</b>

Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

Pada periode Triwulan I-2023, perolehan PDRB di Provinsi Kepri telah mencapai Rp48,805 Triliun atas dasar harga berlaku (ADHK) atau tumbuh sebesar 6,51 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,98 miliar (yoy). Menurut teori ekonomi *Keynesian*, salah satu unsur pendapatan nasional (permintaan agregat) adalah bersumber dari pengeluaran pemerintah. Teori tersebut menyatakan bahwa pendapatan nasional suatu negara merupakan hasil penjumlahan dari Konsumsi, Investasi, Belanja Pemerintah, serta nilai Netto dari Ekspor dan Impor ( $Y=C+I+G+X-M$ ). Melalui kebijakan Belanja Pemerintah yang tertuang dalam pelaksanaan APBN, kita dapat melihat bagaimana peran APBN dalam menggerakkan roda perekonomian sebagai salah satu sumber dari peningkatan pendapatan nasional pada kuartal awal 2023.

Berdasarkan tabel diatas, belanja APBN telah berkontribusi sebesar 5,89 persen terhadap perolehan PDRB Provinsi Kepri (Rp2.823,92 Miliar) di Triwulan I-2023. Rasio tersebut jauh meningkat sebesar 162,23 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022 (yoy). Begitu pula dengan belanja modal pemerintah (Investasi Pemerintah) yang telah berkontribusi sebesar 0,25 persen pada PDRB Regional Kepri, rasio tersebut juga tumbuh signifikan sebesar 155,10 persen dibandingkan dengan periode tahun lalu (yoy).

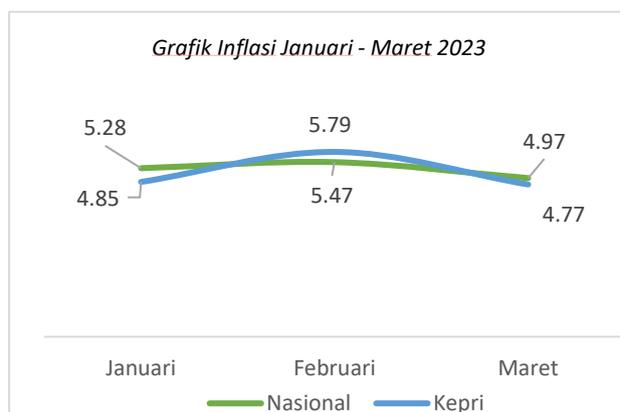
Apabila dilihat dari total perolehan PDRB, rasio tersebut diatas juga sejalan dengan proporsi komponen pengeluaran pembentuk PDRB Provinsi Kepri, dimana komponen PMTB memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp34,83 T (43,37%), kemudian disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp33,07 T (41,17%) pada PDRB Regional Kepri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat kita artikan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Kepri sudah mulai kembali bangkit melalui stimulus fiskal yang ada. Peningkatan kontribusi pemerintah terhadap PDRB Provinsi Kepri terus dioptimalkan dengan adanya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah, baik belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang mendukung kinerja pegawai serta meningkatkan layanan, serta belanja sosial dan belanja lainnya yang berperan sebagai penyokong perekonomian masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dengan demikian, baik pemerintah maupun stakeholder terkait dapat lebih meningkatkan peran dalam mengoptimalkan potensi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat tumbuh dan ketahanan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi regional untuk mengembangkan hasil produksi daerahnya.

### 1.1.3 Inflasi

Grafik 1.2 – Inflasi Prov. Kepri Januari-Maret 2023



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

terjadi pada sektor kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 6,49 persen. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga sayuran seperti kangkung dan bayam, serta cabai merah yang dipengaruhi menurunnya pasokan sebagai dampak kondisi cuaca dan meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) serta tingginya gelombang laut yang mempengaruhi tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Dari 24 kota IHK di Sumatera, tercatat seluruh kota mengalami inflasi *year on year* (yoy) pada bulan Februari 2023. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Pandan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) sebesar 6,71 persen dan inflasi *yoy* terendah terjadi di Kabupaten Tembilahan (Provinsi Riau) sebesar 3,49 persen. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-16 dan ke-21 dari 24 kota yang mengalami inflasi *yoy* di Sumatera.

Pada bulan Maret 2023, tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,77 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 4,97 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Maret 2022 menjadi 113,22 pada Maret 2023. Tingkat deflasi *month to month* Maret 2023 Kepri sebesar 0,29 persen.

Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran utamanya yang

## 1.1.4 Ekspor-Impor

### Ekspor

Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan I 2023 mencapai US\$5.159,95 juta, angka tersebut tumbuh sebesar 14,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2 (*c-to-c*). Sampai dengan triwulan I 2023, sektor non migas memberikan andil cukup besar pada nilai ekspor dengan persentase sebesar 79,99 persen (US\$4.127,34) dan nilai tersebut tumbuh sebesar 22,17 (*c-to-c*). Perolehan nilai tersebut didominasi oleh sektor Industri sebesar US\$3.826,48 juta (meningkat 14,85% (*coc*)), yang kemudian disusul dengan hasil tambang dengan kontribusi sebesar US\$267,84 juta (meningkat 1,580% (*coc*)), dan sektor pertanian sebesar US\$33 juta (meningkat 7,79% (*coc*)).

Gambar 1.1 – Ekspor Prov. Kepri Januari-Maret 2023



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Pertumbuhan ekspor tersebut kemudian juga didorong oleh sektor migas yang menyumbang 20,01 persen (US\$1.032,61) dari total pendapatan ekspor periode triwulan I 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 14,85 (*c-to-c*). Komponen terbesar penyumbang perolehan ekspor pada sektor migas adalah dari gas alam sebesar 9,64 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$497,33 juta, yang kemudian disusul oleh hasil minyak (8,48 persen) dan minyak mentah (0,89 persen).

Hingga saat ini negara Singapura masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar dari Kepulauan Riau dengan nilai ekspor sebesar US\$1.909,10 atau mencapai 37 persen dari total ekspor Provinsi Kepri di Triwulan I 2023. Ekspor tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan ekspor pada sektor migas sebesar -14,01 persen dan pertumbuhan pada ekspor sektor nonmigas sebesar 10,49 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Komoditas ekspor Provinsi Kepri ke Singapura pada Triwulan ini didominasi oleh komoditas mesin/peralatan listrik (40,54 persen), bahan bakar mineral (32,64

persen), mesin/pesawat mekanik (9,56 persen), dan sisanya merupakan komoditas barang lainnya.

## Impor

Selanjutnya, perkembangan impor Provinsi Kepulauan Riau hingga triwulan I 2023 mencapai US\$4.940,17 juta, meningkat sebesar 22,69 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Nilai impor tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor nonmigas dengan nilai impor sebesar US\$3.946,10 (80,04 persen) dari total impor Provinsi Kepri, yang didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu mencapai US\$3.874,42 juta, meningkat 22,93 persen dari periode tahun sebelumnya.

Selama periode ini, negara Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar pada sektor nonmigas dengan nilai impor sebesar US\$1.229,97 juta (31,17 persen) dari total impor nonmigas Provinsi Kepri. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 33,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Untuk sektor migas, negara pemasok migas ke Kepri berasal dari negara Malaysia dengan nilai impor mencapai US\$244,11 juta (24,81 persen) dari total impor migas Provinsi Kepri. Angka tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup besar bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yaitu sebesar 77,55 persen.

Gambar 1.2 – Impor Prov. Kepri Januari-Maret 2023



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa pada Triwulan I 2023 Provinsi Kepulauan Riau mengalami surplus dari nilai ekspor, sehingga diperoleh nilai Net Ekspor sebesar US\$229,78 juta. Kemudian nilai ekspor maupun kegiatan bongkar barang impor terbesar selama Triwulan ini berada pada pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, Kota Batam merupakan pusat industri dan kota dengan kegiatan ekonomi terbesar di Provinsi Kepri.

Ekspor Impor tersebut juga berpengaruh terhadap fiskal Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun terdapat peningkatan Ekspor pada Triwulan ini, perolehan Bea

Keluar/Pungutan Ekspor pada Triwulan I 2023 mengalami penurunan sebesar 73,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Hal tersebut dipengaruhi oleh komoditas ekspor nonmigas terbesar Provinsi Kepri ada pada golongan barang mesin/peralatan listrik (54,12 persen), mesin-mesin/pesawat mekanik (8,55 persen), dan bahan bakar mineral (6,52 persen), dimana golongan barang tersebut tidak dikenakan bea keluar.

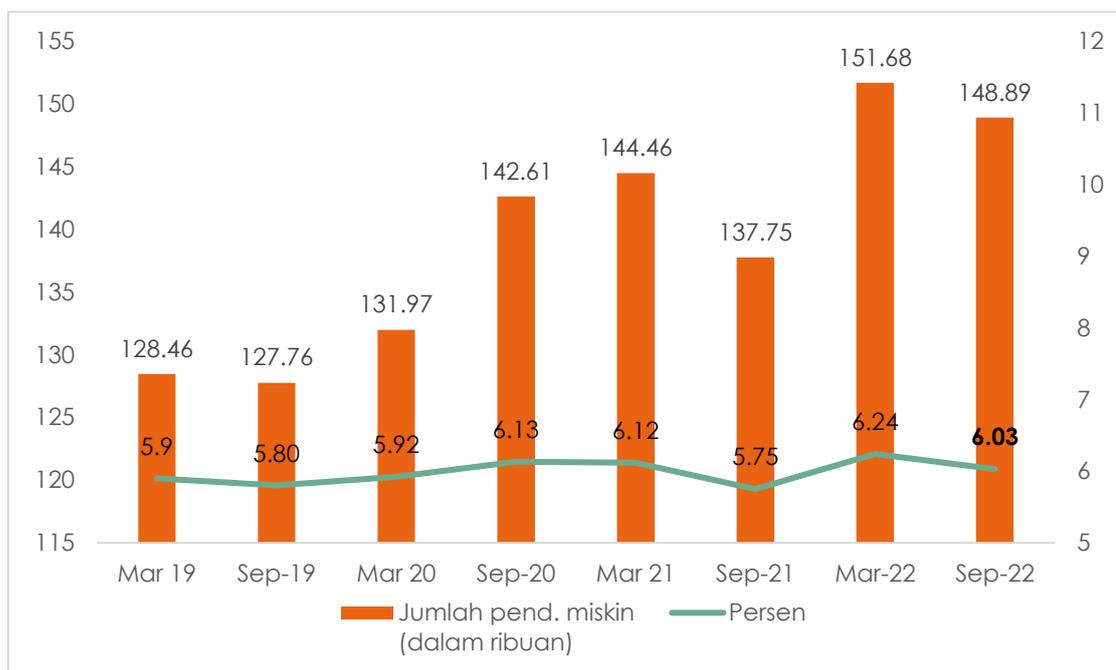
Sejalan dengan peningkatan impor Provinsi Kepri di Triwulan I 2023, perolehan bea masuk pada Triwulan ini juga mengalami peningkatan sebesar 11,95 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Memiliki letak geografis yang strategis untuk melakukan ekspedisi global, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan potensi ekspor produk Kepri dengan lebih maksimal. Peningkatan ekspor juga dapat didorong melalui produktivitas UMKM dalam mendorong produk Go Global yang ada di Kepri. Produktivitas tersebut juga dapat ditopang melalui dukungan Kredit Program (KUR dan UMi) yang berasal dari APBN. Selain itu, Kanwil Khusus Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendorong UMKM di Provinsi Kepri untuk ekspor melalui program Klinik Ekspor.

## 1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan

### 1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Grafik 1.3 – Tingkat Kemiskinan Prov. Kepri (2019-2022)



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

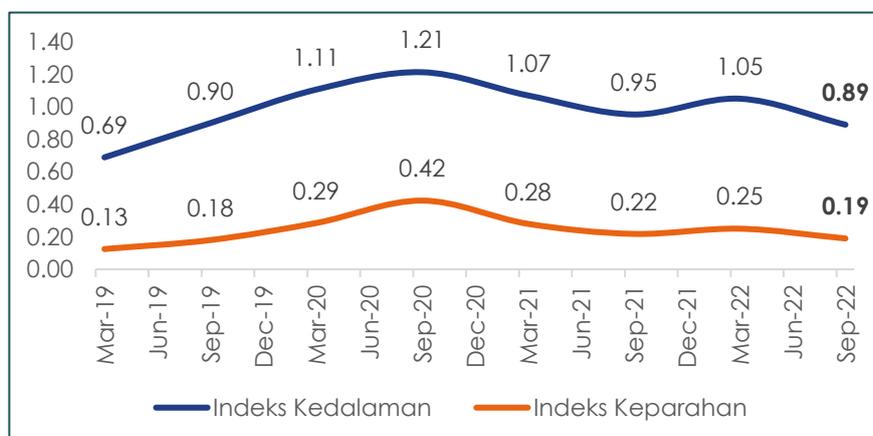
Tingkat penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan

penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Berdasarkan data tingkat kemiskinan Provinsi Kepri pada periode Maret - September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03%). Apabila dibandingkan pada bulan Maret 2022 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 2,79 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kepri masih jauh dibawah persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 9,57 persen di periode September 2022. Secara nasional, Kepri berada pada peringkat terendah keenam dengan persentase penduduk miskin terendah (September 2022). Dengan peringkat 1 Bali (4,53%) dan Peringkat 34 Papua (26,80%).

Selain pentingnya upaya yang dilakukan dalam memperkecil jumlah penduduk miskin, persoalan kemiskinan juga perlu melihat adanya dimensi lain yaitu terkait kebijakan dalam mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah kesenjangan/jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya merupakan indikator untuk mengukur kesenjangan/sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi Indeks Keparahannya menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Grafik 1.4 - Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahannya Kemiskinan Prov Kepulauan Riau Tahun 2019-2021



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

Pada grafik 1.4 diatas, tercatat angka tertinggi tertinggi indeks kedalaman kemiskinan dan keparahannya dalam 4 tahun terakhir (2019-2022) terjadi pada bulan September 2020. Di tahun 2022, Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahannya Kemiskinan tertinggi berada di bulan Maret, kemudian mulai menurun pada bulan September 2022 dengan angka 0,89 untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan dan 0,19 untuk Indeks Keparahannya. Capaian kedua indeks di tahun 2022 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Dengan semakin menurunnya angka indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan terkait indeks keparahannya kemiskinan, pada September

2022, mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin lebih menyempit.

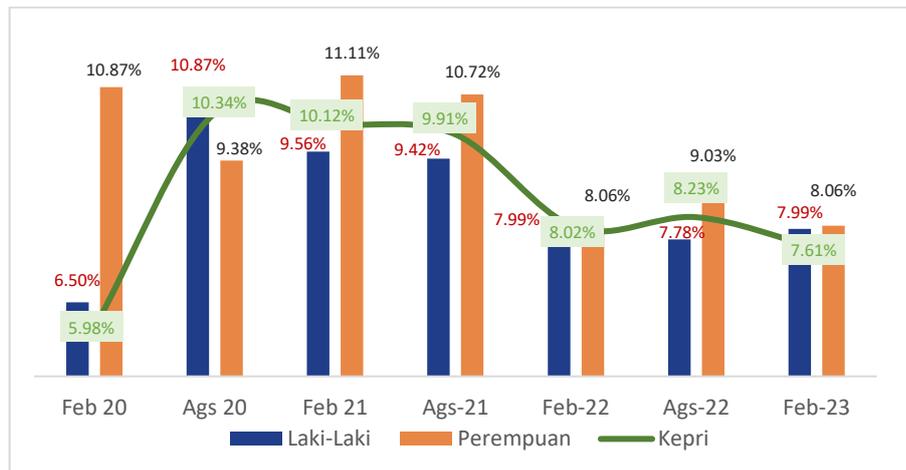
Dalam upaya mendorong penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepri, pemerintah melalui kebijakan fiskal telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Cluster Perlindungan Sosial Per Desember 2022, sebagaimana dibawah ini:

1. PKH telah direalisasikan sebesar Rp137,64 miliar kepada 183.212 KPM.
2. Sembako telah direalisasikan sebesar Rp159,94 miliar kepada 774.676 KPM.
3. BLT Migor telah direalisasikan sebesar Rp19,90 miliar kepada 198.978 KPM.
4. BLT BBM Kemensos telah direalisasikan sebesar Rp48 miliar kepada 319.956 KPM.
5. BSU telah direalisasikan sebesar Rp107,19 miliar.

### 1.2.2 Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.107.353 orang, turun 152.359 orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri pada Februari 2023 mencapai angka 7,61 persen, turun 0,41 poin dibandingkan dengan Februari 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.023.125 orang, meningkat sebanyak 50.000 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak (berdasarkan sakernas Februari 2023) adalah Sektor Industri Pengolahan 27,42 persen, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,24 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,63 persen.

Grafik 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Kepri



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Pada periode Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kepri lebih tinggi dibandingkan dengan persentase TPT nasional, yaitu 5,86 persen per Februari 2023 menyebabkan Kepulauan Riau masuk dalam provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ke-2 tingkat nasional. Namun, Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi salah satu wilayah dengan penurunan TPT tertinggi, yakni sebesar -1,68 persen. Hal tersebut seiring dengan kembali bergeliatnya sektor ekonomi dan kreatif, khususnya

hotel dan restoran. Pegawai hotel dan restoran yang semula dirumahkan sudah mulai terserap kembali seiring dengan diskresi pemerintah baik dari negara tetangga yaitu Singapura dan pemerintah pusat untuk kedatangan dan keberangkatan wisatawan asing serta dibukanya beberapa tempat wisata baru di Kepulauan Riau.

Dalam rangka menanggulangi pengangguran, Per 31 Maret 2023 Pemerintah Pusat telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp122,35 miliar, angka tersebut tumbuh sebesar 171,70 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, Pemerintah Daerah telah merealisasikan Rp80,74 miliar pada periode yang sama. Belanja modal ditujukan untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah.

### 1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

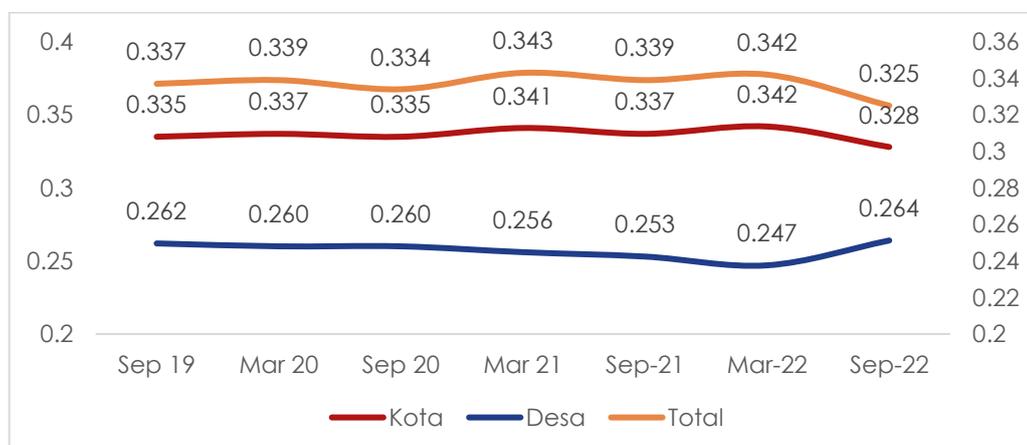
Koefisien Gini atau *Gini Ratio* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau periode September 2022 yang diukur dengan Rasio Gini tercatat sebesar 0,325 atau turun sebesar 0,017 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 sebesar 0,342. Angka Rasio Gini pada periode September 2022 tersebut masih berada dibawah tingkat ketimpangan Nasional yang mencapai 0,381, namun capaian Kepri masih diatas angka ketimpangan di Provinsi Bangka Belitung (0,255).

Apabila dilihat lebih rinci, tren ketimpangan Kepri di pedesaan mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren ketimpangan di perkotaan. Pada September 2022, ketimpangan di pedesaan mencapai angka 0,264, angka ini merupakan yang tertinggi sejak September 2019. Sedangkan angka gini rasio di kota per September 2022 sebesar 0,328, angka ini terendah sejak September 2019.

Penurunan rasio gini tersebut juga didorong oleh adanya intensitas penyaluran bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta perbaikan standar pengupahan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut potensi ketidakpastian ekonomi ke depan.

Grafik 1.6 Gini Ratio Provinsi Kepri (2019-2022)



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Penurunan Rasio Gini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri secara perlahan mulai mengalami perbaikan. Angka tersebut masih berada di bawah angka Rasio Gini Nasional yang berada pada level 0,384. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan (0,264) tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah pedesaan (0,264).

Apabila dilihat lebih rinci, tren ketimpangan Kepri di pedesaan mencatatkan penambahan angka gini rasio yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tren ketimpangan di perkotaan. Pada September 2022, ketimpangan di pedesaan mencapai angka 0,264, angka ini merupakan yang tertinggi sejak September 2019. Sedangkan angka gini rasio di kota per September 2022 sebesar 0,328, angka ini terendah sejak September 2019.

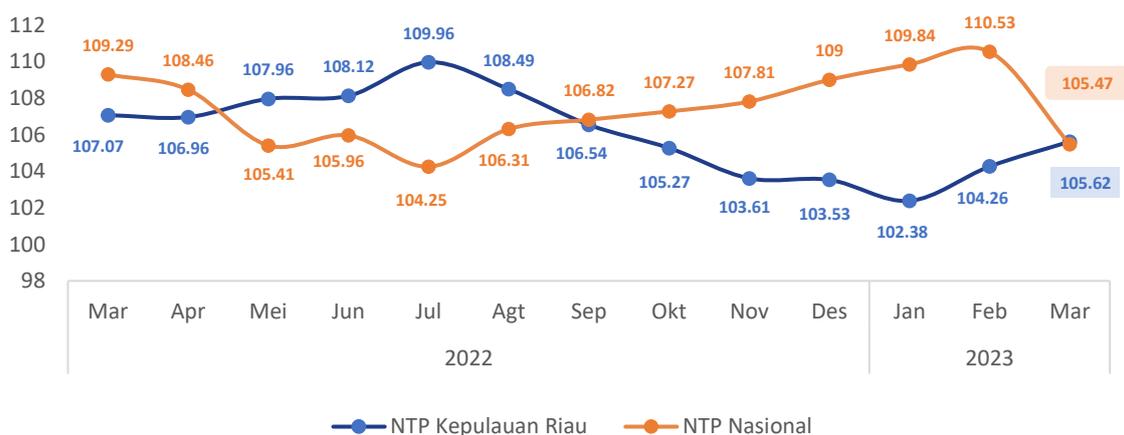
Melebarnya ketimpangan yang ada pada wilayah pedesaan dipengaruhi oleh sulitnya akses permodalan maupun investasi pada daerah pedesaan di Provinsi Kepri yang sebagian besar terpisahkan oleh lautan. Hal tersebut menyebabkan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan ataupun kesempatan bagi para masyarakat desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### 1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Tren Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan dengan nilai 105,62. Nilai tersebut lebih tinggi 0,15 poin persen dibandingkan NTP Nasional dengan nilai 105,47. Nilai tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen dibandingkan dengan NTP di bulan Februari 2023 (*m-to-m*). Hal ini disebabkan pada bulan ini terjadi kenaikan Indeks Harga yang Diterima (It) Petani sebesar 1,61 persen lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,30 persen. Kenaikan Nilai Tukar Petani disebabkan naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (indeks harga hasil produksi pertanian) lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian).

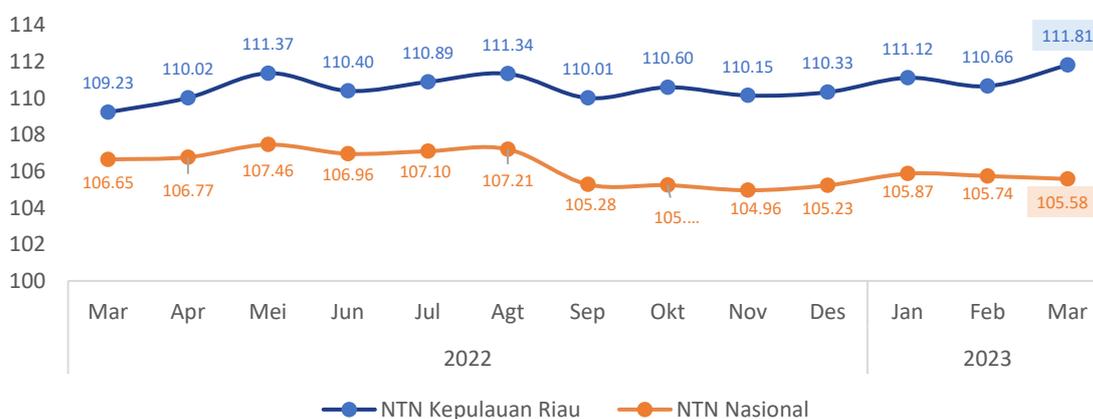
Dari lima subsektor yang menyusun Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau selama Maret 2023 tercatat semua subsektor mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani yaitu: subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,21 persen; subsektor Hortikultura naik sebesar 2,84 persen; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 0,85 persen; subsektor Peternakan naik sebesar 0,01 persen; dan subsektor Perikanan naik sebesar 1,04 persen. Jika ditinjau lebih rinci Nilai Tukar Petani kelompok Perikanan Tangkap mengalami kenaikan.

Grafik 1.7 Perkembangan NTP Provinsi Kepri 2022-2023



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Grafik 1.8 Perkembangan NTN Provinsi Kepri 2022-2023



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Kemudian untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepri pada bulan Maret 2023 Maret 2023 mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani sebesar 1,04 persen atau turun dari 110,66 menjadi 111,81. Naiknya Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 1,33 persen lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,29 persen.

Naiknya NTN dibulan Maret 2023 (*m-to-m*) disebabkan peningkatan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 1,44 persen dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas tamban, belanak, cakalang, manyung, sembilang, selar, dan sebagainya. Disamping itu Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) naik sebesar 0,28 persen disebabkan oleh kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 0,18 persen serta Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik sebesar 0,38 persen.

### 1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM

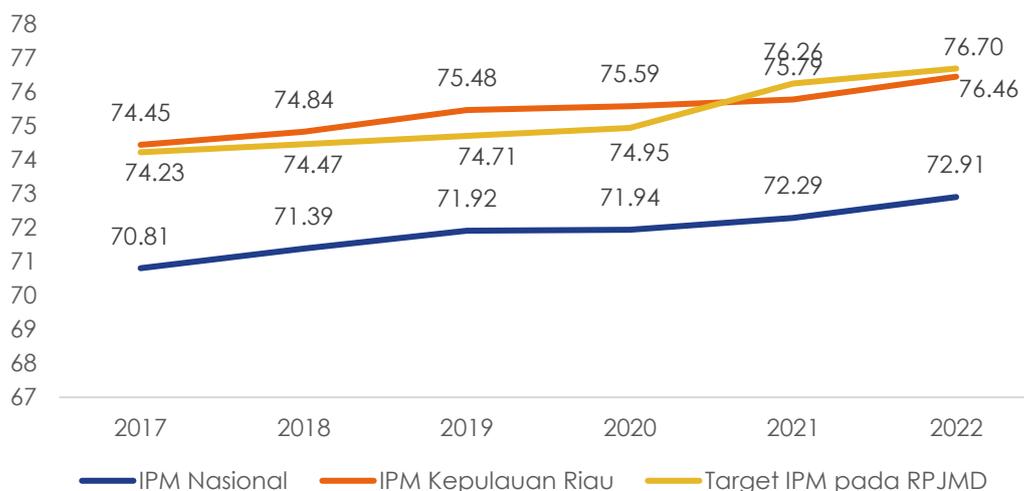
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori,  $IPM < 60$  (rendah),  $60 \leq IPM < 70$  (sedang),  $70 \leq IPM < 80$  (tinggi),  $IPM \geq 80$  (sangat tinggi).

Enam tahun terakhir, IPM Provinsi Kepri meningkat secara perlahan sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat perekonomian manusia namun juga mengukur tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan, sehingga angka IPM itu mengandung 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pendidikan (knowledge), serta standar hidup layak (decent standard of living) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan.

Masih berdasar pada data dari tahun 2022, IPM Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen menjadi 76,46 dari tahun 2021 sebesar 75,79. IPM Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut, sedangkan kota Batam mendapatkan peringkat 26 untuk tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Walaupun IPM tahun 2022 meningkat, namun angka tersebut belum mencapai target IPM yang ditetapkan pada RPJMD. Penetapan IPM pada renstra dinilai terlalu tinggi. Renstra dimulai tahun 2021, dengan target 76,26. Padahal IPM Kepri tahun 2020 sebesar 74,95 (selisih growth 1,75 persen dibandingkan target IPM pada renstra). Capaian IPM Kepri pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 74,23 (2017), 74,47 (2018), dan 74,71 (2019) dengan growth 0,32 persen. Melihat rata-rata growth capaian IPM sebesar 0,32 persen pada tahun 2017 s.d 2019, (bahkan hanya 0,03 di tahun 2020), target IPM pada tahun 2021 sebesar 76,26 dengan growth 1,75 persen sangat tinggi. Capaian IPT tahun 2021 dan 2022 sudah sangat baik mengingat growth sebesar 1,12 persen (2021) dan 0,88 persen tahun (2022), namun dengan tingginya penetapan IPM awal di pada tahun 2021 dengan growth yang juga tinggi 0,89 persen (2021) dan 0,58 persen (2022) maka target pada renstra tidak tercapai.

Grafik 1.9 IPM Provinsi Kepri dan Nasional (2017-2022)



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023.

Grafik 1.10 Tingkat IPM seluruh Provinsi di Indonesia (2022)



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat empat di tingkat nasional. Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan IPM 81,65. IPM Kepri tertinggi di tingkat regional Sumatera. Dari regional Sumatera, setelah Kepri, Sumatera Barat merupakan berada di peringkat sembilan nasional dengan IPM 73.26. Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai karakteristik demografi mirip dengan Provinsi Kepri berada pada peringkat 17 dengan nilai IPM sebesar 72,24.

Tabel 1.4 IPM per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022

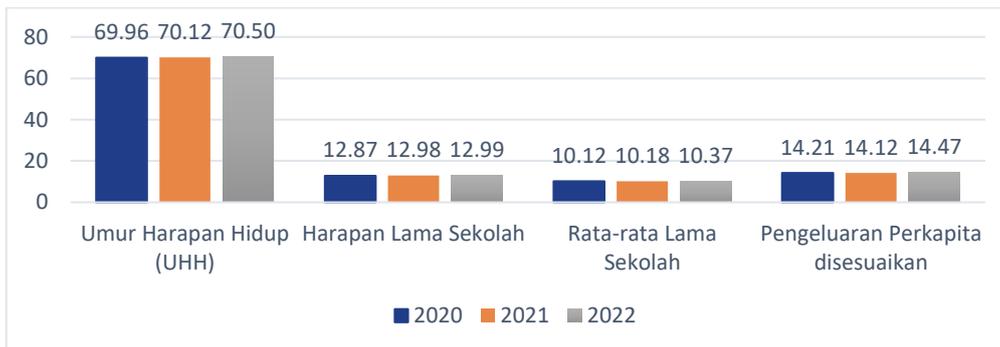
Wilayah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Natuna	71,52	72,1	72,63	72,72	73,09	73,47
Lingga	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57
Kota Tanjung Pinang	78	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64
Kota Batam	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67
Kepulauan Anambas	67,06	67,53	68,48	68,8	69,23	69,61
Karimun	70,26	70,56	71,1	71,44	71,7	72,65
Bintan	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99

Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

IPM Provinsi Kepri masuk ke dalam IPM dengan capaian tinggi, namun apabila dilihat lebih rinci pada Kota/Kabupatennya, terjadi ketimpangan yang cukup lebar. Pada tahun 2022, capaian IPM Kota Batam sudah masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi yaitu 81,67, sedangkan IPM di Kabupaten Lingga baru mencapai kategori sedang dengan angka 66,57, selain itu Kepulauan Anambas juga masih masuk ke dalam kategori sedang dengan capaian 69,61, masih cukup jauh dengan capaian Kota Tanjungpinang, yaitu 79,64. Namun apabila dilihat lebih rinci lagi, ditahun 2022 Kabupaten Lingga Kembali mengalami pertumbuhan IPM kedua tinggi se-Kepri (setelah karimun), yaitu 1,12 persen, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding tahun lalu yang mencapai 0,83 persen (juga tertinggi di tahun 2021). Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen, namun lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu (0,63%). Tantangan lainnya sehubungan dengan pemerataan angka IPM di Kepri adalah kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan rentang kendali jauh dan konektivitas antar pulau sangat terbatas.

Sehubungan dengan nilai indikator pembentuk IPM, dari tahun 2020 sampai dengan 2022, UHH penduduk Kepri terus meningkat, yang dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,54 persen, menjadi 70,50 dari sebelumnya 70,12. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun. Angka Harapan lama sekolah (HLS) meningkat 0,08 persen menjadi 12,99 tahun dari yang sebelumnya 12,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 1,87 persen menjadi 10,37 tahun. Peningkatan HLS memberikan pengertian bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,99 tahun, dan untuk penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 10,37 tahun. Peningkatan juga terjadi pada pengeluaran perkapita yang disesuaikan (2,46%).

Grafik 1.11 Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Kepri (diolah), 2022.

Dalam Upaya Mendorong Pemerataan IPM melalui peningkatan tiap indeks pembentuk IPM, melalui kebijakan fiskal sampai dengan Maret 2023, pemerintah telah menganggarkan, beberapa dukungan kepada beberapa Kabupaten di Kepri yang masih dikategorikan IPM sedang, yaitu Lingga dan Kepulauan Anambas.

1. Anggaran APBN Prioritas Nasional di Lingga untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp1.898.590.000
2. Anggaran APBN Prioritas Nasional di Anambas untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp1.404.652.000
3. Realisasi Anggaran APBD Fungsi Kesehatan di Lingga Rp10.239.334.498
4. Realisasi Anggaran APBD Fungsi Kesehatan di Anambas Rp17.370.279.487
5. Realisasi Anggaran APBD Fungsi Ekonomi di Lingga Rp 7.035.342.628
6. Realisasi Anggaran APBD Fungsi Ekonomi di Anambas Rp9.613.653.116
7. Realisasi Anggaran APBD Fungsi Pendidikan di Lingga Rp20.205.023.436

Sumber: MEBE dan LRA LKPD (diolah), 2023.

**BAB**

**2**

**ANALISIS FISKAL REGIONAL**

**Vihara Ksitigarbha Bodhisattva (Seribu Wajah)  
di Kota Tanjungpinang**

# ANALISIS FISKAL REGIONAL



## 2.1 Analisis Realisasi APBN

Tabel 2.1 – Perkembangan I-Account APBN di Provinsi Kepulauan Riau  
Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	Triwulan I TA 2022			Triwulan I TA 2023			%Growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>11.818,87</b>	<b>2.130,79</b>	<b>18,03%</b>	<b>11.810,46</b>	<b>2.379,15</b>	<b>20,14%</b>	<b>11,66%</b>
Penerimaan Perpajakan	9.653,86	1.861,92	19,29%	9.548,94	2.122,97	22,23%	14,02%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.165,01	268,86	12,42%	2.261,52	256,18	11,33%	-4,72%
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>14.794,41</b>	<b>2.552,89</b>	<b>17,26%</b>	<b>16.450,82</b>	<b>2.824,92</b>	<b>17,17%</b>	<b>10,66%</b>
<b>BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)</b>	<b>7.246,41</b>	<b>770,80</b>	<b>10,64%</b>	<b>8.496,96</b>	<b>990,53</b>	<b>11,66%</b>	<b>28,51%</b>
Belanja Pegawai	1.878,59	366,60	19,51%	2.126,50	414,47	19,49%	13,06%
Belanja Barang	3.353,34	355,77	10,61%	3.785,91	435,80	11,51%	22,50%
Belanja Modal	1.763,28	45,03	2,55%	2.333,51	122,35	5,24%	171,70%
Bantuan Sosial	2,55	1,00	39,33%	4,60	1,41	30,67%	40,51%
Belanja Lainnya	248,64	2,40	0,96%	246,44	16,49	6,69%	587,70%
<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>7.548,00</b>	<b>1.782,09</b>	<b>23,61%</b>	<b>7.953,86</b>	<b>1.834,39</b>	<b>23,06%</b>	<b>2,93%</b>
<b>Dana Transfer Umum (DTU)</b>	<b>5.466,82</b>	<b>1.415,76</b>	<b>25,90%</b>	<b>5.707,04</b>	<b>1.442,62</b>	<b>25,28%</b>	<b>1,90%</b>
Dana Alokasi Umum	4.280,64	1.245,58	29,10%	4.474,84	1.244,93	27,82%	-0,05%
Dana Bagi Hasil	1.186,17	170,18	14,35%	1.232,20	197,69	16,04%	16,16%
<b>Dana Transfer Khusus (DTK)</b>	<b>1.714,68</b>	<b>291,68</b>	<b>17,01%</b>	<b>1.965,91</b>	<b>308,31</b>	<b>15,68%</b>	<b>5,70%</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik	592,32	0,00	0,00%	805,94	0,00	0,00%	0,00%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.122,36	291,68	25,99%	1.159,97	308,31	26,58%	5,70%
<b>Dana Otsus, DIY, DID</b>	<b>157,36</b>	<b>12,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63,13</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Insentif Daerah	157,36	12,89	8,19%	63,13	5,05	8,00%	-60,81%
<b>Dana Desa</b>	<b>209,14</b>	<b>61,75</b>	<b>29,53%</b>	<b>217,79</b>	<b>78,41</b>	<b>36,00%</b>	<b>26,97%</b>
Dana Desa	209,14	61,75	29,53%	217,79	78,41	36,00%	26,97%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-2.975,54</b>	<b>-422,10</b>	<b>14,19%</b>	<b>-4.640,36</b>	<b>-445,77</b>	<b>9,61%</b>	<b>5,61%</b>

Sumber: OM-SPAN, Simtrada, DJP, DJBC (diolah) , 2023

## 2.1.1 Pendapatan Negara



Sumber: OM-SPAN, Simtrada, DJP, DJBC (diolah), 2023

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.379,15 miliar atau 20,14% dari pagu pada periode Q1 2023. Penerimaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara, dengan porsi 89,23% Penerimaan Perpajakan dan 10,77% PNBPN. Realisasi pendapatan negara ditopang oleh realisasi penerimaan perpajakan Rp2.122,97 miliar (22,23% dari pagu) dan PNBPN Rp256,18 juta (11,33% dari pagu). Realisasi penerimaan perpajakan lebih tinggi dibandingkan periode Q1 2022. Baik realisasi secara jumlah rupiah (*growth* 14,02%), maupun persentase realisasi terhadap pagu. Namun realisasi PNBPN lebih rendah dibanding periode Q1 tahun 2022, baik secara jumlah rupiah maupun secara persentase terhadap target penerimaan.

### Tren Pendapatan Negara

#### Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan meningkat sebesar Rp261,05 miliar atau tumbuh 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penerimaan Perpajakan, terdiri dari penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Pajak Dalam Negeri meningkat hingga Rp345,63 miliar (23,16%). Tiap komponen penerimaan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2022 dengan persentase peningkatan terendah sebesar 22,64% yaitu Pajak Penghasilan Non Migas (PPh Non Migas). Namun demikian PPh Non Migas menjadi Pajak Dalam Negeri dengan peningkatan nominal tertinggi (meningkat Rp307,09 miliar). Pajak Bumi dan Bangunan menjadi penerimaan dengan peningkatan persentase tertinggi (333%) dengan nominal peningkatan sebesar Rp34,61 miliar. Pajak Pertambahan Nilai juga menunjukkan peningkatan yang baik dengan pertumbuhan sebesar 30,06% (Rp34,61 miliar). Begitu juga dengan penerimaan cukai yang meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 120,56% (Rp2,24 miliar).



Sumber: OM-SPAN, Simtrada, DJP, DJBC (diolah), 2023

## Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara keseluruhan menurun sebesar Rp12,68 miliar (-4,72%). PNBP lainnya berkinerja baik dengan peningkatan sebesar Rp62,006 miliar (39,00%). Dilain sisi pendapatan BLU menurun drastis sebesar Rp74,57 miliar (-67,93%).

### Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Peningkatan PPN menunjukkan pergerakan usaha semakin menggeliat. Peningkatan tersebut juga ditopang dengan kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%. Penerimaan PBB meningkat dikarenakan terdapat penerimaan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara yang cukup tinggi sebesar Rp2.265 juta sedangkan pada periode triwulan I tahun 2022 hanya sebesar Rp369 juta. Penerimaan cukai meningkat karena terdapat kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10% untuk rokok jenis tertentu yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Selain itu, lokasi penjualan rokok yang diproduksi oleh pabrik rokok di Batam juga mempengaruhi penerimaan cukai. Pabrik rokok di Batam berorientasi ekspor, namun pada periode triwulan I tahun 2023, porsi penjualan lokal lebih besar dibandingkan dengan penjualan ekspor.

Disisi lain, tidak seperti Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional menurun sebesar Rp84,59 miliar (-22,89%). Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar/Pungutan Ekspor. Kinerja penerimaan dari Bea Masuk sudah cukup baik dengan peningkatan penerimaan sebesar Rp 26,13 miliar (11,95%). Namun Penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor turun sebesar (-73,34%).

Pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk komoditi ekspor dikenakan bea keluar adalah *Crude Palm Oil* (CPO). Pengenaan tarif bea keluar menyesuaikan harga komoditas/referensi CPO. Harga jual komoditi CPO menurun pada periode TW I tahun 2023 sehingga penerimaan bea keluar ikut turun. Pada periode Januari-Februari 2022 harga referensi cukup tinggi sehingga tarif yang dikenakan masuk kolom 12 (200 USD/MT) sedang pada periode ini hanya di kolom 6 (USD 74/MT).

### Analisis Kendala Permasalahan dan Strategi

Pendapatan PNBP menurun yang disebabkan oleh Pendapatan BLU yang menurun drastis sebesar Rp74,57 miliar (-67,93%). Pendapatan BLU dicatat sebagai PNBP saat BLU melakukan pengesahan pendapatan melalui mekanisme SP3B. Pada Provinsi Kepulauan Riau hanya terdapat satu BLU, yaitu BLU BP Batam. Pada periode Q1 2023, pendapatan BLU BP Batam yang telah disahkan melalui mekanisme SP3B (Rp35,20 miliar) masih sangat rendah yaitu hanya 1,91% dari target penerimaan. Namun demikian, penerimaan BLU BP Batam secara akrual sudah cukup baik. Menurut catatan BLU BP Batam, penerimaan hingga Q1 2023 mencapai Rp386,30 miliar atau sebesar 21,62% dari target penerimaan.

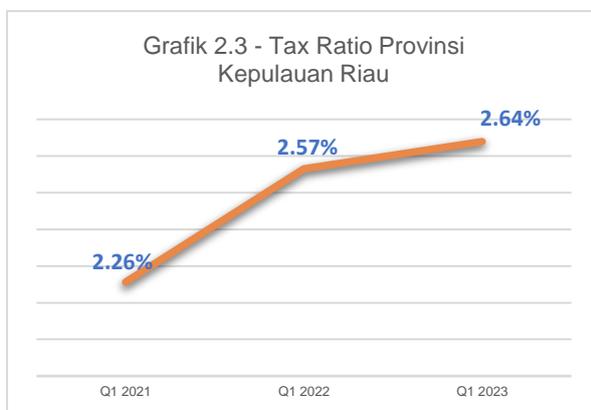
Pendapatan BLU BP Batam tidak dapat segera dilaporkan melalui mekanisme pengesahan SP3B karena faktor internal BLU BP Batam. Aplikasi pencatatan (*Finance Billing Management System, FBMS*) yang digunakan oleh BLU BP Batam belum dapat terhubung secara langsung pada aplikasi SAKTI yang digunakan oleh KPPN. Hal ini menimbulkan permasalahan pengesahan SP3B yang diajukan oleh BP Batam. Penerimaan dan

pengeluaran BLU yang sudah terekam oleh aplikasi FBMS tidak dapat dikonversi langsung kedalam aplikasi SAKTI.

## Analisis Tax Ratio

Tax Ratio menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi tax ratio, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan pajak dari pendapatan PDRB.

Pada periode Q1 2023, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2,12 triliun atau meningkat 14,02% dibanding periode yang sama tahun 2022. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap rasio perpajakan. Rasio pajak periode Q1 2023 sebesar 2,64%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yaitu sebesar 2,57%.



Sumber: OM-SPAN, DJP (diolah), 2023

Grafik 2.3 menunjukkan bahwa tax ratio terus meningkat pada dua tahun terakhir. Pada periode Q1 2022, tax ratio sebesar 2,57% atau meningkat sebesar 13,68% di banding tax ratio periode Q1 tahun 2021 sebesar 2,26%. Pada periode Q1 2023, tax ratio sebesar 2,64%. Kembali terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut hanya sebesar 2,90%, tidak setinggi peningkatan periode sebelumnya.

## 2.1.2 Belanja Negara

### Tren Belanja Negara



Sumber: OM-SPAN, Simtrada, DJP, DJBC (diolah), 2023

### Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja negara sebesar Rp2.825 miliar atau 17,17% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 10,66% jika dibandingkan dengan periode Q1 2022. Peningkatan realisasi belanja negara ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat (BPP), yaitu dengan realisasi sebesar Rp990,53 miliar atau 11,66% dari pagu. Realisasi BPP tumbuh sebesar 28,51% dibanding periode Q1 2022.

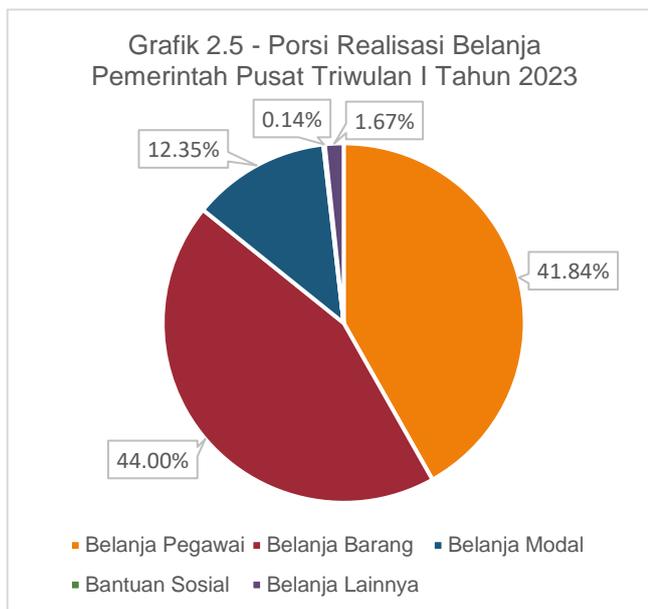
## Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi belanja pusat masih didominasi oleh Belanja Barang (44,00%), kemudian diikuti oleh Belanja Pegawai (41,84%), Belanja Modal (12,35%), Belanja Lainnya (1,67%) dan Belanja Bantuan Sosial (0,14%).

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar Rp219,73 miliar (28,51%). Secara nominal, peningkatan terbesar pada Belanja Modal, yaitu meningkat sebesar Rp77,32 miliar (171,70%). Secara persentase, peningkatan terbesar pada Belanja Lainnya yaitu sebesar 587,70% (Rp14,10%). Kinerja belanja modal semakin membaik dibanding periode yang sama ditahun 2022. Jika membandingkan realisasi tahun 2023 (Rp122,35 miliar) dengan pagu (Rp2.333,52 miliar) yaitu realisasi sebesar 5,24%. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal sebesar Rp45,03 miliar dengan pagu sebesar Rp1.763,28 miliar atau 2,55% dari pagu.

Peningkatan Belanja Modal merupakan buah dari usaha Kanwil DJPb Kepri mendorong Kementerian Lembaga untuk merealisasikan belanja pada triwulan I tahun 2023. Adapun langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Kepri adalah melakukan identifikasi dan analisis akar permasalahan realisasi belanja K/L tahun 2022 melalui penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA). Identifikasi dan analisis dilakukan terhadap K/L dengan alokasi anggaran besar dengan penyerapan rendah.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, Kanwil DJPb Provinsi Kepri menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran dan early warning pelaksanaan anggaran semester I tahun 2023. Langkah lainnya menyelenggarakan kegiatan *one on one meeting* dengan KPA satker yang memiliki alokasi anggaran besar dalam rangka meningkatkan engagement dan mendiskusikan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran. Menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran (LLSPA) tahun 2023 kepada satker mitra kerja sebagai pedoman pelaksanaan anggaran TA 2023. Mendorong percepatan realisasi anggaran satker mitra kerja melalui kontrak Pra-DIPA, percepatan penyelesaian perikatan kontraktual di periode triwulan I TA 2023, dan percepatan penyelesaian pekerjaan kontraktual bernilai sampai dengan Rp200 juta di periode triwulan I TA 2023.



Sumber: OM-SPAN, Simtrada, DJP, DJBC (diolah), 2023

## Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Tabel 2.2 – Belanja menurut Kementerian/Lembaga  
10 K/L dengan Pagu Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kementerian/Lembaga	Q1 2023			Q1 2022			Growth	
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
		(Miliar Rupiah)			(Miliar Rupiah)				
1	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	2.251	42	1,85%	2.066	51	2,48%	8,95%	-18,96%
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.363	212	15,53%	808	148	18,31%	68,61%	43,04%
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	943	87	9,27%	912	46	5,03%	3,39%	90,65%
4	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	780	159	20,34%	763	153	20,07%	2,16%	3,54%
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	475	89	18,74%	296	55	18,71%	60,36%	60,61%
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	361	36	10,09%	248	27	10,73%	45,56%	36,81%
7	KEMENTERIAN AGAMA	309	50	16,12%	281	45	16,14%	10,04%	9,92%
8	KEMENTERIAN KEUANGAN	288	53	18,46%	300	52	17,38%	-3,76%	2,22%
9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	245	49	19,80%	250	43	17,08%	-1,89%	13,73%
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	194	20	22,57%	208	19	9,06%	-6,60%	6,46%

Sumber: OM-SPAN (diolah), 02023

Tabel 2.3. Menunjukkan sepuluh K/L dengan pagu belanja terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mempunyai pagu belanja tertinggi lingkup Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp2.251 miliar. Pada Q1 2023, BP Batam dapat merealisasikan belanja sebesar Rp42 miliar atau 1,85% dari total pagu belanja. Pagu belanja BP Batam tersebut meningkat sebesar Rp8,95% dibanding tahun 2022. Namun realisasi belanja menurun sebesar -18,96%.

Pada posisi sepuluh terbesar, Kementerian Kesehatan dengan pagu Rp194 miliar dapat merealisasikan belanja sebesar Rp20 miliar atau 22,57%. Pagu Kementerian Kesehatan menurun sebesar -6,60%, namun realisasi belanja dapat meningkat sebesar 6,46% dibanding Q1 2022.

## Belanja Berdasarkan Fungsi

Belanja Pemerintah berdasarkan fungsi mengacu pada standar OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*) tentang *Classification of The Functions of Government* (COFOG). Klasifikasi data belanja ke dalam fungsi-fungsi pemerintahan membantu organisasi pemerintah untuk menganalisis kualitas belanja pemerintah dan mengevaluasi pencapaian sasaran fiskal.

Tabel 2.3 – Perkembangan Belanja Negara Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kepulauan Riau  
Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 (Rupiah)

No	Fungsi	Q1 2023			Q1 2022			Growth
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
1	Agama	89.749.742.000	16.986.102.533	18,93%	88.516.960.000	14.628.621.472	16,53%	16,12%
2	Ekonomi	3.715.429.494.000	202.895.827.836	5,46%	3.295.100.167.000	176.599.733.718	5,36%	14,89%
3	Kesehatan	232.850.420.000	26.824.587.247	11,52%	238.588.106.000	24.852.311.169	10,42%	7,94%
4	Ketertiban dan Keamanan	1.287.219.038.000	245.724.359.252	19,09%	788.530.545.000	158.697.584.643	20,13%	54,84%
5	Lingkungan Hidup	98.828.014.000	13.534.905.388	13,70%	110.828.946.000	13.304.102.304	12,00%	1,73%
6	Pariwisata dan Budaya	1.085.000.000	19.080.041	1,76%	1.530.000.000	-	0%	0,00%
7	Pelayanan Umum	8.809.015.575.000	1.981.442.047.201	22,49%	2.210.511.268.000	327.230.322.585	14,80%	505,52%
8	Pendidikan	610.139.652.000	70.922.981.122	11,62%	523.677.755.000	58.888.006.597	11,25%	20,44%
9	Pertahanan	1.363.111.034.000	211.752.440.554	15,53%	808.418.667.000	148.038.875.391	18,31%	43,04%
10	Perumahan dan Fasilitas Umum	226.421.072.000	52.025.058.617	22,98%	176.345.749.000	14.608.515.630	8,28%	256,13%

Sumber: OM-SPAN (diolah), 2023

Menurut fungsi, pada Q1 2023 pagu paling tinggi adalah Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp8.809 miliar dengan realisasi sebesar Rp1.981 miliar. Sedangkan fungsi dengan pagu terendah adalah Pariwisata dan Budaya dengan realisasi sebesar Rp19.080.041. Belanja menurut fungsi dengan realisasi tertinggi berada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dengan realisasi 22,98%. Sedangkan fungsi dengan realisasi terendah adalah fungsi Pariwisata dan Budaya.

Dibandingkan dengan Q1 2023, belanja menurut fungsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pelayanan Umum yaitu sebesar 505,52%. Belanja menurut fungsi dengan pertumbuhan terendah adalah fungsi Lingkungan Hidup yaitu sebesar 1,73%.

## Tren Transfer ke Daerah dan Dana Desa

### Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi TKDD periode Q1 2023 sebesar Rp1.834,39 miliar atau 23,06% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut hanya meningkat 2,93% dibandingkan dengan realisasi Q1 2022. Pertumbuhan realisasi paling tinggi terjadi pada realisasi dana desa dengan pertumbuhan realisasi sebesar 26,97%. Dana desa dapat direalisasikan sebesar 78,41 miliar atau 36% dari pagu, sedangkan pada periode Q1 2022, dana desa dapat direalisasikan sebesar Rp61,75 miliar atau sebesar 29,53% dari pagu. Peningkatan realisasi tersebut tidak lepas dari koordinasi intensif Kanwil DJPb Kepri dengan KPPN Tanjung Pinang dan Batam, serta sinergi intensif dengan pemerintah daerah melalui evaluasi penyaluran tahun 2022 yang menjadi masukan dalam Pelaksanaan penyaluran di tahun 2023. Sinergi yang dilakukan pada triwulan I 2023 diantaranya:

- a. *One on one meeting* dengan BPKAD Provinsi Kepulauan Riau terkait penyaluran TKD 2023 pada tanggal 19 Januari 2023.
- b. *One on one meeting* dengan BPKAD Kota Batam terkait DAK, BOS dan Treasury Deposit Facility (TDF) pada tanggal 31 Januari 2023.
- c. Rakor DAK Fisik dan Dana Desa TA 2023 pada tanggal 22 Februari 2023, dimana pada kesempatan ini hadir Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan disampaikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Terbaik dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- d. *One on one meeting* dengan Dinas PMD Kabupaten Bintan sekaligus mengunjungi Desa Ekang Anculai yang merupakan Desa terbaik di Kabupaten Bintan dalam pengelolaan Dana Desa, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023.
- e. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan yang merupakan salah satu desa yang mengalami kendala dalam penyaluran Dana Desa tahun 2022, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023.

### 2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Pada APBN regional Kepri tahun 2023, kebijakan defisit anggaran kembali diambil dengan besaran defisit sebanyak Rp4.640,36 miliar. Pada periode Q1 2022, realisasi anggaran mencatat defisit sebanyak Rp445,77 miliar. Defisit tersebut hanya sebesar 9,61% dari anggaran defisit yang ditetapkan. Realisasi defisit tidak besar karena tumbuhnya realisasi pendapatan negara. Dengan realisasi belanja yang tumbuh dibandingkan periode sebelumnya, pertumbuhan realisasi pendapatan masih dapat menjaga defisit anggaran tidak terlalu besar.

### 2.1.4 Analisis Prognosis APBN Regional

Kanwil DJPb Prov Kepulauan Riau melakukan prognosis terhadap pendapatan dan belanja dengan menggunakan trend analysis. Berdasarkan hasil prognosis, pendapatan hingga akhir tahun 2023 diproyeksikan dapat direalisasikan sebesar Rp12.186 miliar (103%) sedangkan belanja diproyeksikan dapat direalisasikan sebesar Rp14.351 miliar (97%). Adapun hasil proyeksi secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 – Prognosis Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Prov Kepulauan Riau (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Target/ Pagu	Realisasi s.d TW I		Prognosis s.d TW II		Prognosis s.d TW III		Prognosis s.d TW IV	
		Real	%	Real	%	Real	%	Real	%
Pendapatan Negara	11,819	2,131	18.03%	6,400	54.15%	9,263	78.37%	12,186	103.10%
Belanja Negara	14,794	2,553	17.26%	8,173	55.25%	15,473	104.58%	14,351	97.00%

Sumber: OM-SPAN (diolah), 2023

### 2.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

Pada Provinsi Kepulauan Riau hanya terdapat satu BLU, yaitu Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). BP Batam merupakan BLU rumpun pengelola kawasan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan dan pelayanan kawasan pelayanan, melalui penyediaan sarana dan prasarana jalan, fasilitas dan utilitas umum, serta fasilitas sosial lainnya.

Alokasi anggaran belanja BP Batam terdiri dari rupiah murni dan PNBP BLU. Alokasi anggaran belanja rupiah murni sebesar Rp286 miliar dan alokasi anggaran PNBP sebesar

Rp1.965 miliar. Sampai dengan triwulan I, pendapatan BLU BP Batam yang telah disahkan melalui mekanisme SP3B sebesar Rp35,20 miliar. Namun demikian, menurut catatan BLU BP Batam, secara akrual penerimaan hingga Q1 2023 mencapai Rp386,30 miliar. Perbedaan pencatatan tersebut terjadi karena aplikasi SAKTI belum dapat berjalan secara optimal untuk satker BLU. BP Batam menggunakan aplikasi pencatatan yaitu Finance Billing Management System, FBMS). Aplikasi FBMS belum dapat terhubung langsung dengan aplikasi SAKTI, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan pengesahan SP3B yang diajukan oleh BP Batam.

Kanwil DJPb Prov Kepri sebagai pembina BLU di daerah, juga mempunyai tugas untuk melaksanakan monev terhadap pengelolaan BLU BP Batam. Pada Q1 2023, Kanwil DJPb Prov Kepri melakukan monev terhadap aspek pelaksanaan anggaran PNBPN BLU, dan terhadap aspek pengelolaan pendapatan dan belanja khususnya pengesahan pendapatan BLU. Hasil monev tersebut antara lain, 1) Para pejabat perbendaharaan (PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran) telah memiliki sertifikat, 2) BP telah menggunakan System Informasi dalam melakukan pencatatan penerimaan dan belanja, yaitu aplikasi *Finance Billing Management System* (FBMS), 3) Terdapat kendala dalam pembuatan dan pemrosesan SP3B BLU oleh BP Batam melalui Aplikasi SAKTI. Masih terdapat pagu negatif pada pendetilan transaksi 16 COA sehingga belum dapat menyampaikan SP3B BLU. Berdasarkan hasil monev tersebut, BP BLU Batam telah secara umum telah memenuhi kriteria kondisi pada aspek Pelaksanaan Anggaran PNBPN BLU, sedangkan pada aspek Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU masih terdapat kendala pada pembuatan SP3B BLU karena aplikasi SAKTI belum dapat mengakomodir transaksi pada BLU.

### 2.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

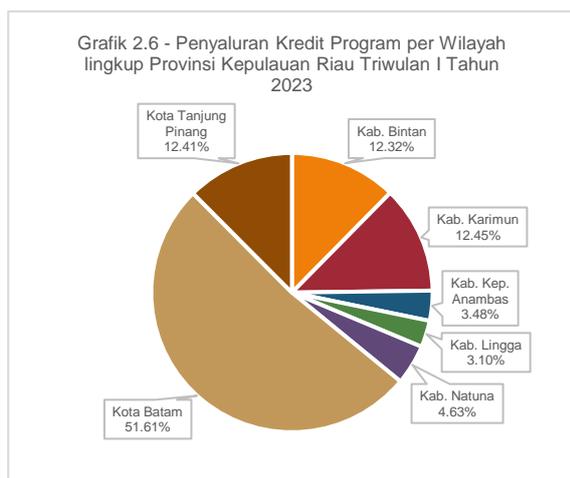
Tabel 2.5 – Perkembangan Penyaluran Kredit Program di Provinsi Kepulauan Riau  
Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023

SKEMA	s.d. 31 Mar 2022		s.d. 31 Mar 2023		% Growth	
	DEBITUR	PENYALURAN (M)	DEBITUR	PENYALURAN (M)	DEBITUR	PENYALURAN
KUR Kecil	1053	267.508.000.000	599	149.397.000.000	-43,11%	-44,15%
KUR Mikro	7558	318.536.100.000	1559	79.658.500.000	-79,37%	-74,99%
KUR Supermi	805	7.534.000.000	1120	9.943.000.000	39,13%	31,98%
UMi	1719	7.098.740.000	30	149.000.000	-98,25%	-97,90%
<b>Total</b>	<b>11135</b>	<b>600.676.840.000</b>	<b>3308</b>	<b>239.147.500.000</b>	<b>-70,29%</b>	<b>-60,19%</b>

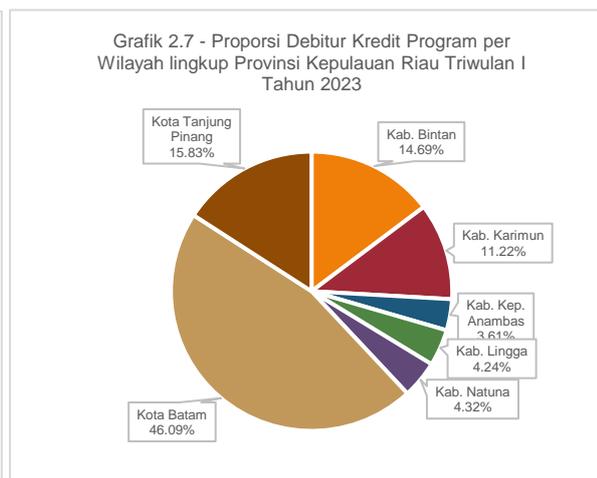
Sumber: SIKP (diolah), 2023

Kredit Program dapat disalurkan sebesar Rp239,15 miliar pada periode Q1 2023. Dari angka tersebut Penyaluran KUR sebanyak Rp239,00 miliar (99,94%) dan penyaluran UMi sebesar Rp149 juta (0,06%). Penyaluran kredit program tersebut dapat meliputi 3.278 debitur (KUR) dan 30 debitur (UMi).

Penyaluran KUR didominasi oleh debitur mikro yaitu dengan jumlah 1.559 debitur. Kemudian diikuti oleh debitur sepermikro dengan jumlah 1.120 debitur, kemudian debitur kecil dengan jumlah 599 debitur. Namun demikian, jumlah penyaluran terbesar berada pada skema Kecil yang disalurkan sebanyak Rp149,40 miliar atau 63% dari total penyaluran KUR



Sumber: SIKP (diolah), 2023



Sumber: SIKP (diolah), 2023

Kota Batam menjadi lokasi yang paling banyak menyalurkan Kredit Program diseluruh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 51,61%. Kemudian diikuti Kabupaten Karimun (12,45%), Kota Tanjung Pinang (12,41%), Kabupaten Bintan (12,32%), Kabupaten Natuna (4,63%), Kabupaten Kepulauan Anambas (3,48%), dan Kabupaten Lingga (3,10%). Ditinjau dari Jumlah debitur, Kota Batam tetap menjadi lokasi dengan jumlah debitur terbanyak yaitu sebanyak 46,09%. Kota Tanjung Pinang menduduki posisi kedua jumlah debitur terbanyak, yaitu 15,83%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bintan (14,69%), Kabupaten Karimun (11,22%), Kabupaten Natuna (4,32%), Kabupaten Lingga (4,24%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (3,61%). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah penyaluran tidak menunjukkan banyaknya jumlah debitur. Hal ini disebabkan perbedaan kriteria penyaluran kredit, yaitu kecil, mikro, dan super mikro.

Penyaluran Kredit Program pada Q1 2023 turun dibandingkan pada Q1 2022 dengan jumlah penyaluran sebesar Rp600,68 miliar atau turun sebanyak 60,19%. Penurunan tersebut terjadi pada Penyaluran KUR (-59,74) dan UMi (-97,90%). Penurunan penyaluran tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan peraturan terkait penyaluran kredit program. Perubahan tersebut akhirnya juga mengakibatkan terlambatnya Kementerian Koordinator Perekonomian menetapkan peraturan pengganti. Keterlambatan penetapan peraturan ini otomatis membuat lembaga penyalur belum dapat menyalurkan kredit program. Mereka menunggu kepastian hukum "aturan main" penyaluran kredit program. Peraturan terkait pelaksanaan kredit program ditetapkan pada akhir Januari. Kantor pusat pihak bank/bukan bank penyalur kemudian mempelajari aturan baru tersebut, kemudian menetapkan target masing-masing bank di daerah. Oleh karena itu, pada periode Q1 2023, lembaga penyalur mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk menyalurkan kredit program dibandingkan periode Q1 2022.

### 2.1.7 Capaian Output Sektoral dan/atau Program Strategis Pemerintah

Sampai dengan triwulan I 2023, belum terdapat belanja Program-program Strategis Pemerintah pada Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, berikut kami sajikan data realisasi belanja Prioritas Nasional (PN).

Tabel 2.6 – Realisasi PN di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2023 (miliar)

No	Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	116,63	26,68	22,88%
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	719,64	83,55	11,61%
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan beradaya saing	300,28	23,21	7,73%
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	3,61	5,74	15,26%
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	772,44	103,15	14,28%
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	15,52	1,41	9,14%
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	437,61	91,22	20,85%
<b>Total</b>		<b>2.349,76</b>	<b>334,99</b>	<b>14,26%</b>

Sumber : Mebe (diolah), 2023

Total realisasi Prioritas Nasional di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Rp334,99 miliar dari total pagu Rp2.349,76 miliar atau sekitar 14,26%. Prioritas Nasional dengan realisasi tertinggi adalah PN 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” dengan realisasi mencapai 22,88%.

## 2.2 Analisis Realisasi APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi)

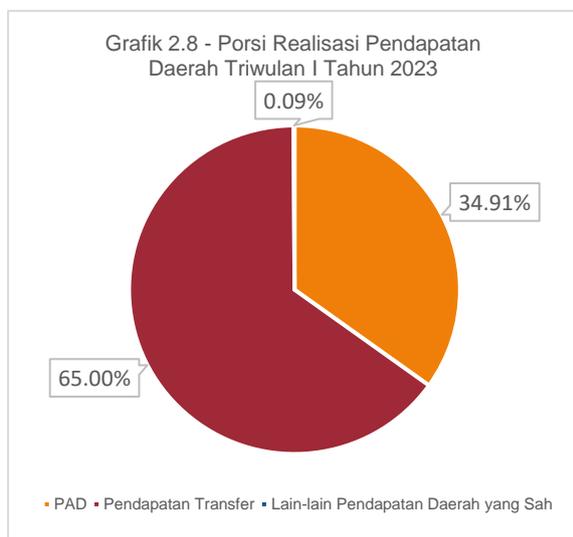
Tabel 2.7 – Perkembangan I-Account APBD KOnsolidasi Pemda Lingkup Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

I-Account (Miliar Rupiah)	Triwulan I TA 2022			Triwulan I TA 2023			%Growth
	PAGU	REAL	%REAL	PAGU	REAL	%REAL	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12,725.85</b>	<b>2,147.60</b>	<b>16.88%</b>	<b>13,755.70</b>	<b>2,729.14</b>	<b>19.84%</b>	<b>27.08%</b>
PAD	3,993.70	634.34	15.88%	4,282.73	952.68	22.24%	50.18%
Pendapatan Transfer	8,599.02	1,513.26	17.60%	9,441.48	1,774.05	18.79%	17.23%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.13	-	0.00%	31.49	2.40	7.62%	100.00%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13,476.02</b>	<b>1,314.00</b>	<b>9.75%</b>	<b>14,432.58</b>	<b>1,734.93</b>	<b>12.02%</b>	<b>32.03%</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>9,934.56</b>	<b>1,165.62</b>	<b>11.73%</b>	<b>10,698.79</b>	<b>1,412.87</b>	<b>13.21%</b>	<b>21.21%</b>
Belanja Pegawai	4,773.60	651.02	13.64%	5,042.39	839.24	16.64%	28.91%
Belanja Barang dan Jasa	4,585.04	479.55	10.46%	4,936.86	510.06	10.33%	6.36%
Belanja Bunga	5.20	-	0.00%	13.14	2.14	16.31%	100.00%
Belanja Subsidi	1.90	0.09	4.74%	2.45	0.00	0.00%	-100.00%
Belanja Hibah	543.65	34.86	6.41%	690.36	59.71	8.65%	71.29%
Belanja Bantuan Sosial	25.17	0.10	0.40%	13.58	1.72	12.70%	1624.80 %
<b>Belanja Modal</b>	<b>2,298.37</b>	<b>62.77</b>	<b>2.73%</b>	<b>2,429.07</b>	<b>80.74</b>	<b>3.32%</b>	<b>28.63%</b>
Belanja Modal	2,298.37	62.77	2.73%	2,429.07	80.74	3.32%	28.63%
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>113.78</b>	<b>0.21</b>	<b>0.18%</b>	<b>93.05</b>	<b>1.06</b>	<b>1.14%</b>	<b>403.01%</b>
Belanja Tidak Terduga	113.78	0.21	0.18%	93.05	1.06	1.14%	403.01%
<b>Belanja Transfer</b>	<b>1,129.31</b>	<b>85.40</b>	<b>7.56%</b>	<b>1,211.66</b>	<b>240.26</b>	<b>19.83%</b>	<b>181.34%</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(750.17)</b>	<b>833.60</b>	<b>-111.12%</b>	<b>-676.87</b>	<b>994.21</b>	<b>-146.88%</b>	<b>19.27%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>929.63</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>676.87</b>	<b>4.97</b>	<b>0.73%</b>	<b>100.00%</b>

Penerimaan Pembiayaan	936.73	-	0.00%	761.21	4.97	0.65%	100.00%
Pengeluaran Pembiayaan	7.10	-	0.00%	84.34	-	0.00%	-
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>179.46</b>	<b>833.60</b>	<b>464.50%</b>	<b>0.00</b>	<b>999.18</b>	<b>100%</b>	<b>19.86%</b>

Sumber: SIKRI dan LK Pemda (diolah), 2023

## 2.2.1 Pendapatan Daerah Konsolidasi



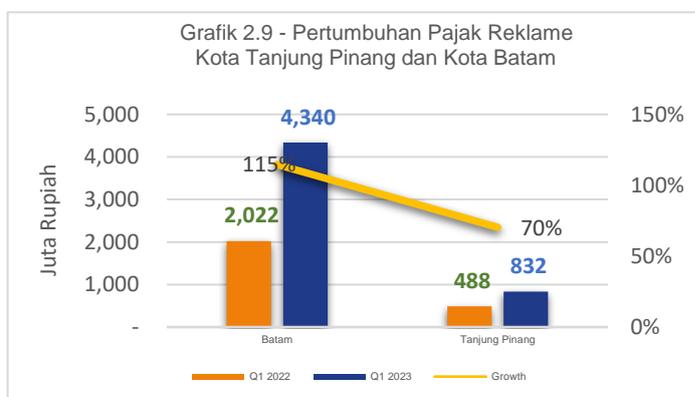
Sumber: SIKRI dan LK Pemda (diolah), 2023

Pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp2.729,14 miliar atau sebesar 19,84% dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan daerah tumbuh sebesar 27,08% dibanding periode Q1 2022. Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, yaitu sebesar Rp1.774,05 miliar (65% dari pendapatan daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp952,68 miliar 35% dari pendapatan daerah). Namun demikian, PAD dapat tumbuh 50,18% dibanding periode Q1 2022.

Pertumbuhan PAD ditopang oleh meningkatnya Pajak Daerah sebesar Rp270,79 miliar (49%) dan Retribusi Daerah Rp22,76 miliar (124%). Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat tumbuh sebesar 50,18% pada tahun 2022.

Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah ditopang dari peningkatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PBB dan BPHTB. Pajak hotel meningkat sebesar Rp49,40 miliar atau 256%, pajak restoran meningkat sebesar Rp10,23 miliar atau 38%, pajak hiburan meningkat sebesar Rp4,83 miliar atau 84%, dan peningkatan pajak reklame sebesar Rp3,12 miliar dibandingkan Q1 2022. Peningkatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Provinsi Kepri telah kembali pulih.



Sumber: SIKRI dan LK Pemda (diolah), 2023

tahun 2023. Pemko Batam melakukan penyesuaian tarif karena pengenaan tarif reklame

Peningkatan pajak reklame signifikan terjadi pada Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Peningkatan pajak reklame Kota Batam sebesar Rp2,32 miliar atau 115%, sedangkan peningkatan pajak reklame Kota Tanjung Pinang sebesar Rp343,52 juta atau 70%. Pemerintah Kota Batam mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan tarif pajak reklame pada September tahun 2022 yang berlaku efektif pada 1 Januari

masih menggunakan peraturan Wali Kota Batam tahun 2011 sehingga tarif reklame yang berlaku dinilai terlalu rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan tarif reklame Kota Tanjung Pinang. Pada peraturan baru tersebut, tarif reklame meningkat hingga 60%.

Peningkatan pajak reklame Kota Tanjung Pinang merupakan buah dari kebijakan Pemko Tanjung Pinang untuk menertibkan reklame liar pada triwulan IV tahun 2022. Pemko Tanjung Pinang menertibkan sebanyak 190 unit kontruksi papan reklame ilegal. Hal ini efektif dapat meningkatkan pajak reklame Kota Tanjung Pinang hingga 70%.

Selain itu, peningkatan pajak juga terjadi pada PBB, terutama untuk Kota Batam. Penerimaan PBB Kota Batam meningkat sebesar Rp74,05 miliar atau sebesar 443%, Pemerintah kota Batam melakukan beberapa upaya yang dimulai pada Semester II tahun 2022, untuk meningkat pendapatan PBB. Adapun upaya-upaya tersebut adalah 1) melakukan penagihan secara aktif, dengan mendatangi dan memberikan surat peringatan terkait kewajiban warga 2) menggelar *roadshow* ke 12 kecamatan sehingga warga dapat melakukan pembayaran PBB pada kegiatan tersebut, 3) menerapkan kebijakan relaksasi pembayaran berupa diskon 10% pada periode Januari-Maret dan diskon 5% pada periode April-Juni, 4) menyampaikan informasi kebijakan relaksasi dan *roadshow* melalui persatuan pengusaha.

Pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB, berupa potongan harga sebesar 50% bagi warga yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis (PTSL) atau dalam program daerah (Proda) dengan luas maksimal 600 M2. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan BPHTB sebesar Rp15,90 miliar atau sebesar 24%.

### 2.2.2 Belanja Daerah Konsolidasi

Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.734, 93 miliar atau 12,02% dari pagu. Realisasi Q1 2023 lebih baik dari periode sebelumnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 32,03%. Pada Q1 2022 belanja daerah dapat direalisasikan sebesar 9.75%, sedangkan pada Q1 2023 belanja dapat direalisasikan sebesar 12,02%. Hal ini memberikan indikasi yang baik karena belanja pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus pergerakan ekonomi di wilayah Kepri pada khususnya. Tiap komponen belanja daerah mencatatkan peningkatan realisasi dibandingkan periode Q1 2022. Realisasi Belanja Operasi sebesar 13.21% dari atau tumbuh 21,21%, realisasi Belanja Modal sebesar 3.32% atau tumbuh 28,63%, realisasi belanja transfer sebesar 19.83% atau tumbuh sebesar 181,34% dibanding periode Q1 2023. Namun demikian, pada sektor Belanja Modal, walaupun realisasi tumbuh dibandingkan dengan periode Q1 2023, namun catatan realisasi sebesar 3.32% masih perlu ditingkatkan.

### 2.2.3 Surplus/Defisit

APBD Q1 2023 mencatatkan anggaran surplus sebesar Rp994,21 juta. Surplus tersebut terjadi karena kinerja realisasi pendapatan sebesar Rp2.729,14 dapat menutupi belanja daerah sebesar Rp1.734,93. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan berbagai jenis pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang mengembirakan, yaitu 50,18%. Namun demikian, surplus anggaran tersebut sebaiknya dapat segera diiringi dengan realisasi belanja yang optimal, sehingga dapat memberikan stimulus bagi perekonomian di wilayah Kepri.

### 2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pemerintah daerah menanggarkan penerimaan pembiayaan sebesar 761,21 pada tahun 2023. Pada Q1 2023, pemerintah daerah merealisasikan pembiayaan sebesar 4,97 miliar, atau 065% dari pagu anggaran. Pada tahun 2022, walaupun telah dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp936,73 namun belum terdapat realisasi penerimaan pembiayaan pada Q1 2022. Pada pos pengeluaran pembiayaan, belum terdapat realisasi baik pada Q1 2023 maupun Q1 2022.

## 2.2.5 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB

Tabel 2.8 – Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah di Prov Kepri terhadap PDRB

	2021	2022	Q1 2023
Belanja Pemerintah Konsolidasian	18,388.85	18,483.43	2,485.20
Belanja Modal Pemerintah	3,559.66	3,456.28	203.09
PDRB	275,622.85	308,842.68	80,319
Rasio Kontribusi Pengeluaran Pemerintah	6.67%	5.98%	3.09%
Rasio Investasi Pemerintah	1.29%	1.12%	0.25%

Sumber: SINTESA (diolah), 2023

Rasio kontribusi pengeluaran pemerintah diukur dari banyaknya belanja pemerintah pusat dan daerah dibandingkan dengan PDRB. Pada Q1 2023, PDRB Kepri mencapai Rp80.319,46 miliar (ADHB) sedangkan pemerintah mencatatkan belanja konsolidasian sebesar 2.485,20 miliar. Oleh karena itu, didapat rasio kontribusi pengeluaran pemerintah sebesar 3,09%.

Selain itu, juga diukur rasio investasi pemerintah dengan membandingkan belanja modal pemerintah dengan PDRB. Pada Q1 2023, pemerintah merealisasikan belanja modal sebesar 203,09 miliar. Dari capaian belanja modal tersebut, maka rasio investasi pemerintah adalah sebesar 0.25%.

## 2.2.6 Perkembangan BLU Daerah

Pada Provinsi Kepulauan Riau terdapat 26 dua puluh enam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD tersebut terdiri dari beberapa jenis layanan. Mayoritas BLUD dengan jenis layanan dibidang kesehatan (16 BLUD), Terdapat 6 (enam) BLUD pada bidang pendidikan, dua BLUD bergerak dibidang pengelolaan air bersih, satu BLUD dibidang pengelolaan dana bergulir, dan satu BLUD dibidang layanan jasa transportasi.

Hasil asistensi yang dilakukan oleh Kanwil Dijten Perbendaharaan Prov Kepri terhadap beberapa BLU menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan BLUD di Provinsi Kepri. Kendala tersebut antara lain 1) Para Stakeholder termasuk pembina BLUD belum memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Fleksibilitas BLUD yang seharusnya dapat mendukung keleluasaan BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seringkali tidak dapat diterapkan secara menyeluruh dan maksimal. Hal ini dikarenakan para stakeholder masih menganggap pengelolaan keuangan BLUD sama dengan SKPD lainnya. Selain itu, 2) disisi internal BLUD juga belum sepenuhnya memahami pengelolaan BLUD. Hal ini juga menyebabkan penerapan fleksibilitas BLUD belum maksimal. Mutasi/promosi pegawai dari dan keluar BLUD juga memberikan dampak terhadap lambatnya pemahaman SDM internal terhadap pengelolaan keuangan BLUD. SDM baru memerlukan

penyesuaian dan adaptasi terhadap pengelolaan keuangan BLUD yang berbeda dengan SKPD lainnya.

## 2.3 Analisis Neraca Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah

Tabel 2.9 – Perkembangan Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Kepulauan Riau Tahunan 2021 dan 2022

	Tahunan 2021	Tahunan 2022	Growth
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	1.509.358.445.500	1.577.255.535.348	4,50%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	19.002.965.304	16.076.993.856	-15,40%
Piutang Pendapatan	2.360.559.724.356	2.128.237.491.913	-9,84%
Piutang Lainnya	-	-	-
Penyisihan Piutang	(1.010.159.309.600)	(1.080.370.887.086)	6,95%
Beban Dibayar Dimuka	28.567.842.847	33.588.546.792	17,57%
Persediaan	930.233.725.852	951.809.852.194	2,32%
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>3.837.563.394.259</b>	<b>3.626.597.533.017</b>	<b>-5,50%</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	49.167.236.552.224	47.027.368.043.874	-4,35%
Peralatan dan Mesin	16.647.264.337.973	16.833.310.367.763	1,12%
Gedung dan Bangunan	8.147.450.630.583	8.411.220.248.606	3,24%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.397.770.594.685	18.635.152.399.513	1,29%
Aset Tetap Lainnya	1.273.030.486.581	1.139.235.093.158	-10,51%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.206.239.327.505	1.050.473.925.918	-12,91%
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	-	-
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(19.458.954.204.189)	(21.165.203.201.237)	8,77%
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>75.380.037.725.362</b>	<b>71.931.556.877.595</b>	<b>-4,57%</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	-	-	-
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			

Piutang Jangka Panjang	9.950.000	-	-100,00%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	72.437.831.953	3.753.785.098.291	5082,08%
Aset Tidak Berwujud	778.012.355.961	842.278.012.391	8,26%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	41.699.378.810	14.276.182.961	-65,76%
Aset Lain-lain	585.388.405.053	482.978.617.651	-17,49%
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(492.223.128.830)	(1.463.437.605.158)	197,31%
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(100.277.899.820)	(107.374.937.110)	7,08%
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>885.046.893.127</b>	<b>3.522.505.369.026</b>	<b>298,00%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>80.102.648.012.748</b>	<b>79.080.659.779.638</b>	<b>-1,28%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	178.224.333.577	234.164.931.480	31,39%
Utang Bunga	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.159.418.347.826	3.831.820.897.242	21,28%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	72.307.682.233	13.264.699.684	-81,66%
Utang Belanja/Beban	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.929.967	5.332.510	82,00%
Hibah Yg Belum Disahkan	-	294.709.815	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>3.409.953.293.603</b>	<b>4.079.550.570.731</b>	<b>19,64%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.409.953.293.603</b>	<b>4.079.550.570.731</b>	<b>19,64%</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	76.692.694.719.145	75.001.109.208.907	-2,21%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>76.692.694.719.145</b>	<b>75.001.109.208.907</b>	<b>-2,21%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>80.102.648.012.748</b>	<b>79.080.659.779.638</b>	<b>-1,28%</b>

Sumber: SIKRI dan LK Pemda (diolah), 2023

### 2.3.1 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Secara total, jumlah Aset Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah menurun sebesar -1,28%. Pada akhir Tahun 2021 jumlah total aset sebesar Rp80.102 miliar, sedangkan pada akhir tahun 2022 jumlah aset menjadi Rp79.080 miliar.

Aset lancar tercatat sebesar Rp3.627 miliar. Aset lancar pada akhir tahun 2022 turun sebesar Rp210 miliar (-5,50%) dibandingkan pada akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.838 miliar. Terjadi kenaikan pada beberapa pos aset lancar seperti akun Kas dan setara kas (Rp67 miliar, 4,50%), penyisihan piutang (Rp70 miliar, 6,95%), beban dibayar dimuka (Rp5 miliar, 17,57%) dan persediaan (Rp21 miliar, 2,32%). Namun total kenaikan aset lancar tersebut masih lebih rendah dibandingkan jumlah rupiah aset lancar yang mengalami penurunan. Aset lancar yang mengalami penurunan adalah Pendapatan yang masih harus diterima (-15,40%) dan piutang pendapatan (-9,84%), Penurunan aset lancar paling banyak terdapat pada pos Piutang Pendapatan dengan penurunan sebesar Rp232 miliar. Penurunan Piutang Pendapatan bahkan lebih besar dibandingkan penurunan Total Aset Lancar, sebesar -Rp210 miliar.

Pada periode per-akhir tahun 2022, Aset Tetap tercatat sebesar Rp71.931 miliar. Jumlah tersebut turun sebesar Rp3.448 miliar (-4.57%) dibanding periode per akhir tahun 2021 yang sebesar Rp75.380 miliar. Penurunan aset tetap paling dipengaruhi oleh penurunan pada pos Tanah sebesar Rp2.139 miliar atau (-4.35%). Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan masing-masing meningkat. Sedangkan akun Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan mengalami penurunan.

Disisi Aset Lainnya, terdapat peningkatan signifikan pada periode akhir tahun 2022, yaitu peningkatan jumlah Aset Lainnya sebesar Rp2.637 miliar atau meningkat 298%. Peningkatan tersebut mayoritas ditopang oleh peningkatan pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.681 miliar atau (5.082%). Aset lainnya yang meningkat adalah Aset Tidak Berwujud yang meningkat sebesar Rp64.265 miliar (8,26%). Akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-Lain masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp27, 42 miliar (65,76%) dan Rp 102, 41 miliar (17,49%).

Jumlah Kewajiban meningkat sebesar Rp669, 60 miliar. Hampir semua pos pada bagian kewajiban mengalami peningkatan. Pendapatan Diterima dimuka mengalami peningkatan terbesar yaitu sebanyak Rp672,40 miliar atau 21,8%. Utang Kepada Pihak Ketiga juga mencatatkan peningkatan dengan persentase tertinggi (31,39%) sejumlah Rp55,94 miliar. Akhirnya, pada Pos Ekuitas, penurunan juga terjadi, yaitu sebesar 2,21% atau sebesar Rp1.691 miliar.

### 2.3.2. Realisasi dan Potensi PNBP dari BMN

Tabel 2.10 – Realisasi PNBP lingkup Provinsi Kepulauan Riau

Kode Akun	Jenis Pendapatan	Q1 2023	2022	2021
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	754,180,842	2,586,950,749	2,355,622,964
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	167,540,200	128,306,542	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	4,488,000	5,400,000	0

Sumber: SINTESA (diolah), 2023

PNBP dari pemanfaatan barang milik negara lingkup Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari tiga jenis, yaitu a) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, b) Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin, dan c) Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya. Pada periode Q1 2023, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dapat direalisasikan sebesar Rp754.180.842, Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin dapat direalisasikan sebesar

Rp167.540.200, sedangkan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya dapat direalisasikan sebesar Rp4.488.000.

Untuk periode tahun 2022, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dapat direalisasikan sebesar Rp2.586.950.749 miliar, Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin dapat direalisasikan sebesar Rp128.306.542, sedangkan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya dapat direalisasikan sebesar Rp5.400.000. Pada periode tahun 2021, hanya terdapat PNBP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp2.355.622.964,-

Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satker yang mempunyai PNBP. Dari hasil monitoring masih terdapat peluang untuk menggali potensi PNBP dari BMN, seperti pemanfaatan lahan dan gudang, serta pemanfaatan gedung untuk disewakan kepada koperasi dan/atau pihak perbankan, pada satker Balai Pelatihan Kesehatan Batam.

### 2.3.3. Kontribusi Belanja Pemerintah Dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

Tabel 2.11 – Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dan Belanja Modal

Belanja Modal	Aset Tetap per 31 Maret	Aset Tetap per 31 Desember	Pertambahan Aset Tetap	Realisasi Belanja Modal Q1	Kontribusi Belanja Modal Q1 2023 Terhadap Penambahan Aset Tetap
Belanja Modal Tanah	49,174,074,345,524	47,027,368,043,874	2,146,706,301,650	18,677,280,409	0.87%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,661,970,544,656	16,833,310,367,763	-171,339,823,107	12,408,704,778	N/A
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,199,198,039,422	8,411,220,248,606	-212,022,209,184	18,044,399,988	N/A
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,593,485,991,124	18,635,152,399,513	-41,666,408,389	72,768,714,995	N/A
Belanja Modal Fisik Lainnya	1,274,783,464,841	1,139,235,093,158	135,548,371,683	298,465,300	0.22%
<b>Total</b>	<b>93,903,512,385,567</b>	<b>92,046,286,152,914</b>	<b>1,857,226,232,653</b>	<b>122,197,565,470</b>	<b>6.58%</b>

Sumber: SINTESA (diolah), 2023

Pada Q1 2023, Pemerintah merealisasikan belanja modal sebesar Rp122,20 miliar. Penambahan aset tetap pemerintah sebesar Rp1.857,23 miliar. Oleh karena itu, secara keseluruhan belanja modal pemerintah pada periode Q1 2023 memberikan kontribusi sebesar 6,58% terhadap penambahan aset tetap. Lebih rinci perjenis belanja modal, kontribusi belanja modal tanah terhadap penambahan belanja modal tanah sebesar 0.87%. Pada belanja modal fisik lainnya, kontribusi belanja modal fisik lainnya terhadap penambahan belanja modal fisik lainnya adalah sebesar 0.22%.

**BAB**

**3**

**PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH**

**Tugu Kapal Lancang Kuning  
di Kota Tanjungpinang**

# PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH



## 3.1 Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi Geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Dengan wilayah yang didominasi oleh perairan, dimana 96 persen wilayahnya adalah lautan dengan 1.350 pulau besar. Dengan kondisi geografis ini, tentunya potensi kelautan Provinsi Kepulauan Riau sangat besar dan masih belum dimaksimalkan.

Sebagaimana pembahasan sektor potensial pada bab pertama, bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi wilayah Kepulauan Riau yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi local issue dimana potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dari Kepulauan Riau belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan potensi tersebut, maka pada pembahasan Bab Pengembangan Ekonomi Daerah akan dibahas profil unit badan usaha berupa koperasi yang bergerak dalam sektor usaha perikanan yakni Koperasi Marine Agri Sejahtera yang merupakan produsen kelautan perikanan yang memiliki potensi menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah akan dibahas mengenai PT. Pelabuhan Kepri (Perseroda) yang juga terkait dengan kelebihan geografis provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

## 3.2 Profil Koperasi pada Sektor Unggulan Daerah

Dengan sektor unggulan daerah yakni sektor perikanan, Koperasi Marin Agri Sejahtera telah dirintis sejak 2018 dan menjadi produsen kelautan perikanan. Koperasi Marin Agri Sejahtera didirikan di Tanjunguban oleh 36 anggota pendiri yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat Tanjunguban. Pada awalnya kegiatan budidaya yang dilakukan berbasis kelompok sehingga tidak memiliki daya ungkit yang cukup, kemudian dilakukan perubahan menjadi kegiatan budidaya skala industri yang tetap berbasis kelompok sehingga saat ini tercipta budidaya berbasis plasma inti.

Tujuan utama Koperasi Marin Agri Sejahtera adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui bisnis yang dijalankan secara koperatif. Koperasi Marin Agri Sejahtera adalah koperasi yang bekerja di bidang industri perikanan dan kelautan, mengingat daerah Bintan khususnya Tanjunguban adalah daerah pesisir dengan sumber daya alam kelautan yang melimpah. Unit kegiatan Marin Agri Sejahtera adalah pembibitan ikan dan akuakultur, pengembangan pembibitan ikan, pakan dan bibit ikan, pendidikan dan berbagai aktivitas eko wisata serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur akuakultur.

Koperasi Marin Agri Sejahtera memiliki visi untuk menjadikan koperasi sebagai batu pijak perekonomian yang adil dan 8 misi untuk memenuhi visi tersebut. Koperasi Marin Agri Sejahtera sekarang beranggotakan 84 orang dan dipimpin oleh Risalah Adzani Minarsy, salah satu pendiri Koperasi. Dengan luas wilayah laut mencapai 5 hektar. Anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan bisnis juga memiliki sertifikat CPIB, BSNI, Field Instructor.

Kendala yang saat ini dihadapi oleh Koperasi Marin Agri Sejahtera adalah terkait kemampuan SDM dan teknologi, oleh karena itu sudah dijalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti Unpad dalam hal nutrisi pakan ikan, ITB dalam hal pengukuran kualitas air, dan Undip untuk biomonitoring ekologi lingkungan dan program smart aquaculture. Sedangkan dengan Universitas di Kepri, kedepannya akan dibuat MoU dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dimana saat ini telah terdapat 12 mahasiswa UMRAH yang melakukan penelitian Bersama dengan Koperasi.

Kerjasama lainnya adalah untuk peningkatan potensi ekspor, yakni melalui Kerjasama dengan VCPlus Singapura. MoU akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan VCPlus sebagai mitra dalam fintech dan digital market, kemudahan akses finansial tersebut merupakan terobosan perusahaan asing dalam kegiatan budidaya. Hal ini menjadi local issue tersendiri dimana pihak koperasi mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan lokal. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepri dengan melakukan komunikasi dan penjajakan terkait pembiayaan UMi maupun KUR Cluster yang disambut baik oleh pengurus Koperasi.

Dari segi pemasaran, peluang di pasar lokal masih terbuka lebar, dengan target pasar sebesar 6 ton/bulan untuk tiap jenis ikan. Harga penjualan pun masih bersaing dengan ikan Barramundi dengan harga Rp110.000/kg dan ikan Kerapu dengan harga Rp140.000/kg. Masih sedikitnya pesaing yang berusaha di bidang akuakultur dan letak koperasi Marin Agri Sejahtera yang berdekatan dengan daerah export seperti Singapura membuat peluang tumbuh koperasi Marin Agri Sejahtera begitu besar. Selain Singapura, export juga dapat dilakukan kepada negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi seperti permasalahan teknologi perikanan dan permasalahan alami dari pembibitan akuakultur yang menyebabkan kematian ikan.

Dukungan dari pemerintah saat ini terhadap sektor usaha budidaya perikanan adalah bantuan berupa benih ikan dan keramba jaring apung (KJA) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu bantuan bangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan diberikan oleh pemerintah kepada koperasi. Diakui bahwa bantuan tersebut masih dirasa kurang terlebih dalam hal penanganan local issue dimana potensi kelautan dan perikanan di provinsi Kepulauan Riau belum termaksimalkan, oleh karena itu dapat disiapkan pembentukan KEK Perikanan Budidaya

yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan masing-masing dapat berperan dalam ekosistem budidaya dan meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau.

Gambar 3.1 Koperasi Marin Agri Sejahtera



Sumber: Dokumentasi dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, 2023

### 3.3 Profil BUMD Unggulan Daerah

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Perseroda PT Pelabuhan Kepri pada tahun 2021 maka telah sah perubahan hukum Perseroda tersebut yang menjadi babak baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kepri.

Gambar 3.2 PT Pelabuhan Kepri



Sumber: Sosial media PT Pelabuhan Kepri, 2023

Dengan adanya Perda ini dan Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen luasnya adalah laut dengan potensi kelautan yang tinggi, PT Pelabuhan Kepri diharapkan mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri khususnya di bidang kepelabuhanan. PT Pelabuhan Kepri dipimpin oleh Direktur Kapten Awaluddin M. Mar didampingi oleh Manajer Keuangan Windrasto Dwi Guntoro dan Manajer Operasional dan Hukum Cokky Wijaya Saputra.

Dengan tanggung jawab yang besar ini, PT Pelabuhan Kepri sebagai BUMD bergerak dalam usaha pengelolaan labuh jangkar, usaha layanan kepelabuhanan, suplai kebutuhan kapal laut saat belayar, survei kemaritiman, inspeksi dan pembersihan bawah laut, perbaikan kapal, penanggulangan kebocoran minyak di laut, serta usaha kepelabuhanan lainnya yang menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Wilayah kerja dari PT Pelabuhan Kepri saat ini berada pada 2 wilayah yaitu wilayah Pelabuhan Kabil Selat Riau yang berada di wilayah Kota Batam dan berdekatan

dengan Tanjunguban dengan frekuensi channel radio ch:12 (156.600//156.600) MHz, ch:14 (156.700//156.700) MHz, dan ch:14 (156.800//156.800) MHz. wilayah lainnya adalah wilayah Pelabuhan Tanjung Berakit yang berada di wilayah Kabupaten Bintan dengan frekuensi channel radio ch:12 (156.600//156.600) MHz, ch:14 (156.700//156.700) MHz, dan ch:14 (156.800//156.800) MHz.

Gambar 3.3 Pelayanan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Kepri



Sumber: Profil PT Pelabuhan Kepri, 2023

Beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengembangan bisnis di wilayah labuh jangkar Kabil Selat Riau dan Tanjung berakit adalah:

1. Belum adanya surat keputusan terkait penunjukan satgas untuk keamanan di wilayah labuh jangkar.
2. Perubahan jenis dan tarif dari pemerintah yang menimbulkan kebingungan bagi stakeholders.
3. Adanya pungutan ganda terkait jasa labuh jangkar Kabil Selat Riau antara BP Batam dan KSOP Khusus Batam.
4. Penggunaan sistem digitalisasi/online yang diterapkan pada wilayah labuh jangkar dinilai belum optimal.
5. Harga tarif jasa keagenan kapal yang tidak terprediksi sehingga berdampak pada kurangnya minat stakeholders yang masuk ke wilayah labuh jangkar khususnya di wilayah berakit.
6. Pelayanan administrasi dari regulator masih terbatas pada jam dan hari kerja yang tidak dilakukan 24 jam.
7. Labuh jangkar yang penerapan aturan regulasinya masih sama seperti di Pelabuhan, seharusnya labuh jangkar sebagai wilayah transit area memiliki aturan yang berbeda untuk mempersingkat waktu operasional kapal yang berlabuh.

Terkait kendala dan hambatan tersebut, perlunya regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah atas satgas keamanan wilayah labuh jangkar, regulasi atas jenis dan tarif, regulasi terkait pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan jasa labuh dan regulasi lainnya yang dapat mempermudah pelayanan PT Pelabuhan Kepri sehingga dapat meningkatkan minat stakholders dalam memanfaatkan layanan wilayah labuh jangkar yang berada dibawah wilayah kerja PT Pelabuhan Kepri.

Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk Kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia sehingga menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah pelayaran Internasional. Selain itu, terdapat pula



Kawasan perdagangan Bebas Indonesia yaitu Kota Batam, Daerah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Batam, Bintan, Karimun. Hal ini menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi PT Pelabuhan Kepri, apabila PT Pelabuhan Kepri dapat menjadi jembatan dalam koneksi pelayaran dan perdagangan kawasan-kawasan khusus ini, maka pendapatan BUMD PT Pelabuhan Kepri dan PAD Provinsi Kepulauan Riau akan sama-sama naik dengan tinggi.

BAB  
4



ANALISIS TEMATIK

Pasar Bintan Center  
di Kota Tanjungpinang

# ANALISIS TEMATIK



## 4. 1. Sistematika Analisis Program Ketahanan Pangan

### 4.1.1 Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu isu yang paling penting dan strategis yang perlu dikaji lebih dalam dikarenakan menyangkut hajat hidup masyarakat. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Persoalan ketahanan pangan di wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multi dimensional), namun demikian terdapat 3 indikator utama yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini dalam suatu Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yaitu: (1) Ketersediaan Pangan, (2) Akses Pangan, dan (3) Pemanfaatan Pangan. Data IKP dapat menjelaskan ketahanan pangan suatu daerah yang bersumber dari hasil survei pertanian. Pemerintah telah membuat regulasi terkait ketahanan pangan didalam Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Defisini Ketahanan Pangan didalam undang-undang tersebut adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

## 4.1.2 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam kategori yang rendah yang apabila dirinci lebih dalam dapat diketahui komponen dengan nilai terendah yakni komponen ketersediaan, sedangkan komponen keterjangkauan dan pemanfaatan relatif tinggi. Memperhatikan kondisi geografis Kepulauan Riau yang 96 persennya merupakan lautan dan struktur tanah bebatuan serta pertambangan membawa konsekuensi keterbatasan sektor pertanian bergerak secara optimal. Kepri bukanlah sebagai wilayah produsen sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap negara dan provinsi lain dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehubungan dengan nilai IKP, Provinsi Kepri berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 - Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021 seluruh Provinsi di Indonesia

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	83,82	18	Banten	74,38
2	Jawa Tengah	82,73	19	Jambi	74,18
3	DI Yogyakarta	81,43	20	Kalimantan Tengah	73,68
4	Sulawesi Selatan	80,82	21	Kep. Bangka Belitung	73,22
5	Gorontalo	80,52	22	Kalimantan Utara	73,02
6	Kalimantan Selatan	80,29	23	Sumatera Utara	72,25
7	Jawa Timur	79,70	24	Aceh	71,63
8	Sumatera Barat	79,55	25	Kalimantan Barat	71,32
9	Sulawesi Utara	78,30	26	Bengkulu	70,32
10	DKI Jakarta	78,01	27	Sumatera Selatan	69,55
11	Lampung	77,96	28	Nusa Tenggara Timur	67,35
12	Jawa Barat	77,79	29	Riau	66,84
13	Kalimantan Timur	77,46	<b>30</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>63,26</b>
14	Sulawesi Tenggara	76,64	31	Maluku Utara	59,58
15	Sulawesi Tengah	75,73	32	Maluku	58,70
16	Nusa Tenggara Barat	75,67	33	Papua Barat	46,05
17	Sulawesi Barat	75,49	34	Papua	35,48

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI, 2023

IKP Provinsi Kepri relatif rendah dikarenakan faktor ketersediaan atau subsistem ketersediaan yang masih rendah. Apabila dipetakan perkabupaten dikepri, IKP Kabupaten Bintan (nilai 58,82) menempati posisi 350 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Karimun (nilai IKP 58,12) menempati posisi 351, Kabupaten Natuna (nilai IKP 57,64) mendapat peringkat 355, Kabupaten Kepulauan Anambas (nilai IKP 53,51) mendapatkan peringkat 365, dan Kabupaten Lingga (nilai IKP 46,35) peringkat 382.

Batam dan Tanjungpinang memiliki Indeks Ketersediaan Pangan yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya. Kota Batam mendapatkan nilai IKP 88,60 karena aksesibilitas dan keragaman konsumsinya (urutan ke 5 dari 98 kota di Indonesia), selanjutnya Kota Tanjungpinang mendapatkan IKP 79,80 (Peringkat 42 dari 98 kota di Indonesia).

## Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat diartikan sebagai tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan. Penghitungan ketersediaan pangan dapat dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan 2009)<sup>1</sup>.

### Pola Panen dan Produksi

Indikator ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di suatu wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi penurunan luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Provinsi Kepulauan Riau.

Luas lahan adalah besarnya areal tanam yang digunakan petani untuk melakukan usaha tani padi selama satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan hektar (ha), sedangkan luas panen adalah jumlah areal sawah yang dapat memproduksi beras setiap tahunnya (Afrianto, 2010).<sup>2</sup> Produktivitas lahan adalah rata-rata jumlah beras yang dapat dihasilkan dari 1 hektar lahan per tahun (Afrianto, 2010)<sup>3</sup>. Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per bulan<sup>4</sup>.

Tabel 4.2 - Luas Panen Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022

Wilayah	Luas Panen (ha)				
	Tahun				
	2020	2021	Growth 2021	2022	Growth 2022
Karimun	39,2	23,19	-40,84%	0	-100,00%
Bintan	17,91	12,54	-29,98%	8,95	-28,63%
Natuna	138,42	109,46	-20,92%	115,49	5,51%
Lingga	71,04	85,51	20,37%	44,84	-47,56%
Kepulauan Anambas	31,95	39,46	23,51%	27,25	-30,94%
Batam	0	0	0	0	0
Tanjungpinang	0	0	0	0	0
<b>Kepri</b>	<b>298,52</b>	<b>270,16</b>	<b>-9,50%</b>	<b>196,53</b>	<b>-27,25%</b>

Sumber: BPS Kepri (diolah), 2023

<sup>1</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17047/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<sup>2</sup> <http://lib.unnes.ac.id/29767/1/7111413112.pdf>

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah\\_sort=deskripsi\\_ind.desc&istilah\\_page=45](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah_sort=deskripsi_ind.desc&istilah_page=45)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan Luas Panen. Berdasarkan data tersebut, wilayah kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang tidak memiliki luas panen atau luas panen 0 ha.

Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan negatif luas panen di Kepri sebesar -9,50 persen. Tingkat penurunan luas panen terbesar berada pada Kabupaten Karimun yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 40,84 persen, yang dimana pada tahun 2020 luas panen kabupaten Karimun sebesar 39,2 ha, ditahun 2021 turun menjadi 23,19 ha, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Bintan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 29,98 persen pada tahun 2021.

Di tahun 2020 luas panen Kabupaten Bintan sebesar 17,91 ha, kemudian mengalami penurunan menjadi 12,54 ha. Di tahun 2021 hanya dua Kabupaten yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu Kabupaten Lingga (20,37%) dan Kepulauan Anambas (23,51%).

Pada tahun 2022, dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepri hanya Kabupaten Natuna yang mengalami pertumbuhan positif Luas Panen yaitu sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan negatif tertinggi ada di Kabupaten Karimun yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -100 persen, sehingga luas panen menjadi 0 ha. Pertumbuhan negatif terbesar selanjutnya adalah Kabupaten Lingga sebesar 47,56 persen. Secara keseluruhan Provinsi Kepri di tahun 2022 luas panen sebesar 196,53 ha atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -27,25 persen. Kondisi luas panen di Kepri jauh menurun apabila dibandingkan tahun 2020 yang masih seluas 298,52 ha.

Tabel 4.3 - Produktivitas Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022

Wilayah	Produktivitas (ku/ha)				
	Tahun				
	2020	2021	Growth 2021	2022	Growth 2022
Karimun	15,28	34,9	128,40%	0	-100,00%
Bintan	29,65	34,61	16,73%	32,34	-6,56%
Natuna	29,52	27,32	-7,45%	30,74	12,52%
Lingga	32,2	32,99	2,45%	26,35	-20,13%
Kepulauan Anambas	31,97	37,89	18,52%	32,15	-15,15%
Batam	0	0	0	0	0
Tanjungpinang	0	0	0	0	0
<b>Kepri</b>	<b>28,56</b>	<b>31,65</b>	<b>10,82%</b>	<b>30,00</b>	<b>-5,21%</b>

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Selanjutnya sehubungan dengan produktivitas padi, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, jumlah produktivitas padi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan positif produktivitas padi sebesar 10,82 persen untuk keseluruhan wilayah di provinsi Kepri. Ditahun 2021 peningkatan produktivitas tertinggi dialami oleh Kabupaten Karimun sebesar 128,40 persen. Lalu diikuti oleh Kepulauan Anambas sebesar 18,52 persen. Pada tahun 2022 produktivitas padi di Kepri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,21 persen, dengan penurunan terbesar berada pada kabupaten Karimun (100%), selanjutnya Lingga (-20,13%), Anambas (-15,15%), dan Bintan (-6,56%). Pertumbuhan positif hanya berada pada Kabupaten Natuna (12,52%).

Tabel 4.4 - Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022

Wilayah	Produksi (ton)				
	Tahun				
	2020	2021	Growth 2021	2022	Growth 2022
Karimun	134,95	80,94	-40,02%	0	-100,00%
Bintan	44,1	43,4	-1,59%	28,94	-33,32%
Natuna	330,61	299,02	-9,56%	354,97	18,71%
Lingga	301,37	282,12	-6,39%	118,16	-58,12%
Kepulauan Anambas	150,49	149,53	-0,64%	87,61	-41,41%
Batam	0	0	0	0	0
Tanjungpinang	0	0	0	0	0
<b>Kepri</b>	<b>961,52</b>	<b>855,01</b>	<b>-11,08%</b>	<b>589,68</b>	<b>-31,03%</b>

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Produksi padi ditahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2020 jumlah produksi padi di Kepri sebesar 961,52 ton, ditahun 2021 mengalami penurunan -11,08 persen sehingga jumlah produksi padi di Kepri sebesar 855,01 ton. Pada tahun 2022, jumlah produksi padi mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar -31,03 persen atau jumlah produksi sebesar 589,68 ton. Di tahun 2022, penurunan produksi padi tertinggi berada pada Kabupaten Karimun (-100%), lalu diikuti Lingga (-58,12%), Kepulauan Anambas (-41,41%), dan Bintan (-33,32%). Hanya terdapat satu Kabupaten yang mengalami pertumbuhan positif produksi padi ditahun 2022, yaitu Kabupaten Natuna (18,71%) dengan total Produksi padi 354,97 ton. Capaian produksi padi di Natuna tersebut melampaui capaiannya ditahun 2020.

Tabel 4.5 - Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri, 2020-2022

Wilayah	Produksi Beras (ton)				
	Tahun				
	2020	2021	Growth 2021	2022	Growth 2022
Karimun	34,09	46,32	35,88%	0	-100,00%
Bintan	30,24	24,84	-17,86%	16,56	-33,33%
Natuna	232,63	171,12	-26,44%	203,13	18,71%
Lingga	130,23	161,44	23,97%	67,62	-58,11%
Kepulauan Anambas	58,12	85,57	47,23%	50,13	-41,42%
Batam	0	0	0	0	0
Tanjungpinang	0	0	0	0	0
<b>Kepri</b>	<b>485,31</b>	<b>489,29</b>	<b>0,82%</b>	<b>337,44</b>	<b>-31,03%</b>

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Produksi Beras di Kepri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif diantara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Produksi Beras di Kepri mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,82 persen. Dengan kontribusi tertinggi dari Kabupaten Natuna (34,97%). Kabupaten yang mengalami pertumbuhan positif ditahun 2021 adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (47,23%), diikuti Karimun (35,88%), dan Lingga (23,97%) sedangkan terdapat dua Kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif ditahun 2021 yaitu Kabupaten Bintan (-17,87%) dan Natuna (-26,44%).

Pada tahun 2022, produksi Beras di Kepri mengalami penurunan sebesar -31,03 persen dibandingkan tahun 2021. Kontributor tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Natuna dengan persentase 60,20 persen kontribusi Kabupaten Natuna meningkat 25,22 persen dibandingkan tahun 2021. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah Kabupaten Karimun (100%), diikuti Lingga (-58,11%), Kepulauan Anambas (-41,42%), dan Bintan (-33,33%). Sedangkan terdapat satu kabupaten dengan pertumbuhan positif, yaitu Natuna (18,71%).

Tabel 4.6 - Wilayah Sentra Produksi Beberapa Komoditas Sayuran (kg), 2021-2022

Wilayah	Bawang Merah		Growth	Bawang Daun		Growth	Bayam		Growth	Kacang Panjang		Growth	Kangkung		Growth	Ketimun		Growth
	2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Karimun	9	0	-100,00%	0	0	0,00%	1153	1110	-3,73%	825	657	-20,36%	1.241	1.282	3,30%	1.056	783	-25,85%
Bintan	89	247	177,53%	74	88	18,92%	4942	7241	46,52%	6.896	17338	151,42%	7.047	12.891	82,93%	5.727	17348	202,92%
Natuna	2	0	-100,00%	44	67	52,27%	183	141	-22,95%	250	306	22,40%	217	138	-36,41%	483	585	21,12%
Lingga	5	1	-80,00%	0	0	0,00%	1.438	587	-59,18%	12698	6928	-45,44%	8.315	4.214	-49,32%	970	974	0,41%
Kepulauan Anambas	0	0	0,00%	0	0	0,00%	52	57	9,62%	55	42	-23,64%	104	126	21,15%	208	113	-45,67%
Batam	227	165	-27,31%	2.335	2.314	-0,90%	17578	18.089	2,91%	18.732	16329	-12,83%	16.980	16.692	-1,70%	22.100	19064	-13,74%
Tanjungpinang	1	2	100,00%	11	11	0,00%	264	468	77,27%	83	46	-44,58%	505	1340	165,35%	79	39	-50,63%
<b>Kepri</b>	<b>333</b>	<b>415</b>	<b>24,62%</b>	<b>2.464</b>	<b>2.480</b>	<b>0,65%</b>	<b>25.612</b>	<b>27.693</b>	<b>8,13%</b>	<b>39.540</b>	<b>41.648</b>	<b>5,33%</b>	<b>34.409</b>	<b>36.683</b>	<b>6,61%</b>	<b>30.622</b>	<b>38.906</b>	<b>27,05%</b>

Sumber : BPS Kepri, 2023

Sentra produksi untuk Bawang Merah, Bawang Daun, Bayam, Kacang Panjang, Kangkung, dan Ketimun ditahun 2022 didominasi oleh produksi dari wilayah Batam (49,15%), Bintan (37,31%), dan Lingga (8,59%). Ditahun 2022 Produksi bawang merah di Kepri mengalami pertumbuhan sebesar 24,62 persen, wilayah dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Bintan (177,53%) dan kota Tanjungpinang (100%). Sedangkan terdapat 3 wilayah yang mengalami pertumbuhan negatif terendah dikarenakan tidak memproduksi bawang merah di tahun 2022, yaitu Kabupaten Karimun, Natuna, dan Anambas. Kontributor tertinggi untuk produksi bawang merah di Kepri adalah kabupaten Bintan (59,52%) dan Batam (39,76%).

Bawang Daun di tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,65 persen dengan wilayah yang tumbuh positif Kabupaten Bintan (18,92%) dan Natuna (52,27%), sedangkan batam mengalami pertumbuhan negatif (-0,90%). Kontributor tertinggi produksi bawang daun di Kepri adalah kota Batam (93,31%).

Selanjutnya untuk komoditas Bayam, ditahun 2022 juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,13 persen. Wilayah yang mengalami pertumbuhan positif untuk produksi bayam adalah kota Tanjungpinang (77,27%) dan Kabupaten Bintan (46,52%). Sedangkan wilayah yang mengalami kontraksi yang cukup dalam untuk produksi bayam adalah Kabupaten Lingga (-59,18%). Kontributor tertinggi untuk produksi bayam di Kepri adalah kota Batam (65,32%) dan kabupaten Bintan (26,15%), sedangkan kontributor terendah adalah kabupaten kepulauan Anambas (0,21%).;

Komoditas Kacang Panjang di Kepri ditahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,33 persen. Dua wilayah yang memiliki pertumbuhan positif adalah Kabupaten Bintan (151,42%) dan Kabupaten Natuna (22,40%), sedangkan 5 wilayah

lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Kontributor tertinggi produksi kacang Panjang di Kepri adalah Kabupaten Bintan (41,63%) dan Kota Batam (39,21%).

Tabel 4.7 - Wilayah Sentra Produksi Beberapa Komoditas Peternakan (kg) , 2021-2022

Wilayah	Sapi		Growth	Kambing		Growth	Domba		Growth	Babi		Growth
	2021	2022		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
Karimun	133.110,00	152.712,97	14,73%	13283	17710	33,33%	447	0	-100,00%	206.831,00	195.340,20	-5,56%
Bintan	60.746,00	85.190,12	40,24%	7109	7109,3	0,00%	0	0		88.133,00	281.519,70	219,43%
Natuna	245.406,00	209.345,03	-14,69%	670	1328,25	98,25%	0	0		-	-	0,00%
Lingga	61.956,00	62.682,50	1,17%	6047	3693,8	-38,92%	0	0		17.696,00	2.642,84	-85,07%
Kepulauan Anambas	66.555,00	121.734,74	82,91%	266	556,6	109,25%	0	0		-	-	0,00%
Batam	1.288.259,00	505.816,33	-60,74%	230116	243512,5	5,82%	0	0		2.818.644,00	4.021.710,00	42,68%
Tanjungpinang	465.883,00	252.908,16	-45,71%	35420	7754,45	-78,11%	0	0		344.718,00	106.058,24	-69,23%
<b>Kepri</b>	<b>2.321.915,00</b>	<b>1.390.389,85</b>	<b>-40,12%</b>	<b>292.911</b>	<b>281.664,90</b>	<b>-3,84%</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>3.476.022</b>	<b>4.607.270,98</b>	<b>32,54%</b>

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Sentra produksi untuk komoditas daging Sapi, Kambing, Domba, dan Babi pada tahun 2022 di Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,09 persen, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 berada pada kota Batam (78,33%), lalu diikuti Kabupaten Bintan (6,14%), dan kota Tanjungpinang (6,02%). Produksi komoditas Sapi pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -40,12 persen. Apabila dilihat perwilayah, terdapat dua wilayah dengan pertumbuhan tertinggi yaitu kepulauan Anambas (82,91%), diikuti kabupaten Bintan (40,24%). Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar -60,74 persen. Kontributor tertinggi untuk produksi Sapi di Kepri terdapat pada wilayah kota Batam (36,38%) dan Kabupaten Anambas (15,06%).

Produksi komoditas daging kambing pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -3,84 persen. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada wilayah kepulauan Anambas (109,25%) dan Natuna (98,25%), sedangkan komoditas yang mengalami kontraksi produksi adalah kota Tanjungpinang (-78,11%). Kontributor produksi daging kambing tertinggi dari wilayah kota Batam (86,45%), sedangkan andil terendah berada pada wilayah kabupaten kepulauan Anambas (0,20%).

Selanjutnya produksi komoditas domba hanya berada pada kabupaten Karimun ditahun 2021 sebanyak 447 kg. Produksi komoditas Babi di Provinsi Kepri mengalami pertumbuhan sebesar 32,54 persen ditahun 2022. Dengan kontribusi tertinggi berada di kota Batam (87,29%) diikuti kabupaten Bintan (6,11%).

Tabel 4.8 - Wilayah Sentra Produksi Daging Unggas (kg) , 2021-2022

Wilayah	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Ayam Pedaging		Itik dan Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Karimun	16.426	17.743,11	232.966,80	232.966,80	-	182.150,75	4.797,21	4793,8
Bintan	141.023	141.023,19	230.402,70	227.472,30	-	703208,24	6.249,10	6249,1
Natuna	68.646,27	68.663,21	-	-	-	459807,60	1.717,71	1.712,04
Lingga	74.961,04	74.190,27	-	-	-	54550,83	945,73	896,61
Kepulauan Anambas	24.388,98	24.399,76	879,12	879,12	-	13039,32	821,37	877,8
Batam	996.287,60	996.287,60	470.338,97	704.971,21	-	23964642,35	3.762,00	3762
Tanjungpinang	8.144,29	18.897,34	43.223,40	25.641,00	-	261815,82	4.753,98	4788,47
<b>Kepri</b>	<b>1.329.877,78</b>	<b>1.341.204,48</b>	<b>977.810,99</b>	<b>1.191.930,43</b>	<b>18.077.756,08</b>	<b>25.639.214,91</b>	<b>23.047,10</b>	<b>23.079,82</b>

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Sentra produksi daging ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik di kepri pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 38,16 persen dengan kontribusi tertinggi dari kota Batam (91,04%) dan kontribusi terendah dari Kabupaten Kepulauan Anambas (0,14%). Dari 4 komoditas daging unggas tersebut, produksi terbesar berada pada daging pedaging yaitu 25.639.214,91 kg ditahun 2022.

Produksi ayam kampung pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,85 persen. Produksi dengan pertumbuhan tertinggi berada pada wilayah Tanjungpinang (132,03%). Kontributor tertinggi dalam produksi ayam kampung di Kepri berada pada wilayah Batam (74,28%) dan Bintan (10,51%). Selanjutnya ayam petelur mengalami pertumbuhan positif ditahun 2020 sebesar 21,90 persen. Kota Batam mengalami pertumbuhan positif tertinggi untuk produksi ayam petelur, yaitu 49,89 persen.

Ayam pedaging pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 41,83 persen dengan kontributor tertinggi dari kota Batam (93,47%). Dan yang terakhir, produksi itik dan itik manila pada tahun 2022 di Kepri mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen, dengan kontributor tertinggi dari kabupaten Bintan (27,08%) dan Kota Tanjungpinang (20,75%).

Tabel 4.9 - Wilayah Sentra Produksi Telur Unggas (kg), 2021-2022

Wilayah	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Itik dan Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Karimun	61.604	66.539,79		4.347.858,24	60.130,51	60.016,39
Bintna	528.870	528.869,82		4.245.314,41	79.866,29	79.866,29
Natuna	257.438,91	257.503,60		-	20.851,48	20.833,68
Lingga	281.121,40	278.230,83		-	12.091,73	11.458,69
Kep. Anambas	91.463,40	91.503,83		16.407,01	10.497,12	11.218,30
Batam	3.736.318,79	3.736.318,79		13.156.878,80	48.078,43	48.078,43
Tanjungpinang	30.543,05	70.869,58		478.537,86	59.989,90	60.422,60
Kepulauan Riau	4.987.358,95	5.029.836,24		22.244.996,31	291.505,46	291.894,38

Sumber : BPS Kepri (diolah), 2023

Produksi telur ayam kampung, ayam petelur, dan itik pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,33 persen, dengan kontributor terbesar yaitu kota Batam (61,46%) dan Kabupaten Bintan (17,61%). Produksi telur ayam kampung di Kepri mengalami pertumbuhan positif 0,85 persen pada tahun 2022. Wilayah yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam produksi telur ayam kampung adalah kota Tanjungpinang (132,03%), sedangkan kontraksi berada pada kabupaten lingga (-1,03%). Kota Batam menjadi kontributor paling dominan dalam produksi telur ayam kampung, yaitu sebesar 74,28 persen.

Produksi telur Ayam petelur pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 24,81 persen. Dengan kontributor produksi paling dominan berada pada kota Batam (59,15%). Selanjutnya produksi telur itik dan itik manila pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 0,13 persen. Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan produksi tertinggi untuk produksi telur itik dan itik manila yaitu 6,87 persen. Kontributor terbesar untuk produksi telur itik dan itik manila adalah kabupaten Bintan (27,36%) diikuti kota Tanjungpinang (20,70%).

### Stok Beras dan Pangan Strategis

Pengelolaan cadangan atau stok pangan bertujuan untuk mengantisipasi dan menangani masalah pangan, terutama untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Menurut UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa stok/cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan di pemerintah

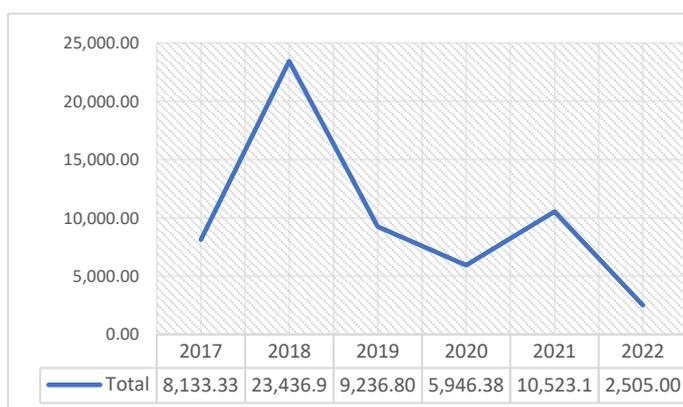
dan masyarakat. Stok pangan merupakan jumlah pangan yang disimpan sebagai cadangan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terpisah-pisah kepulauan, maka kendala yang dihadapi dalam mempertahankan stok pangan dapat terdistribusi merata sepanjang tahun adalah kondisi gelombang laut yang tinggi pada akhir tahun yang dapat menghambat distribusi.

Tabel 4.10 - Realisasi Pengadaan Beras Per Bulan oleh Sub Divisi Regional Bulog Tanjungpinang (Ton), (2017-2022)

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	367,71	2.087,79	15	127,75	224,68	0
Februari	636,28	1.226,38	1.000	0,43	2.375	0
Maret	388,4	1.459,26	1.403,1	0	77	300
April	3.000	1.441,64	1.029,34	1.000	300	0
Mei	0	1.091,29	620,16	1.497,47	66,38	500
Juni	500	1.436,34	0	349,57	627,5	0
Juli	584,15	1.932,07	1,5	654,45	963,3	300
Agustus	620	1.810,18	947,56	1	1.443,78	0
September	1.365	2.363,37	1.361,94	551	786,74	455
Oktober	390,69	3.215,64	935,5	300,49	295,45	0
November	0	3.230,09	823,92	243,3	2.648,30	450
Desember	281,1	2.141,94	1.098,78	1.220,92	715	500
Total	8.133,33	23.436,99	9.236,80	5.946,38	10.523,13	2.505

Sumber: Badan Urusan Logistik Subdivre Tanjungpinang, 2023

Grafik 4.1 - Realisasi Pengadaan Beras Per tahun oleh Subdivre BULOG Tanjungpinang (ton), 2017-2022



Sumber : Badan Urusan Logistik Subdivre Tanjungpinang, 2023

Sehubungan dengan realisasi pengadaan beras per bulan oleh Subdivre Bulog Tanjungpinang dari tahun 2017 sampai dengan 2022, terjadi fluktuasi total realisasi pengadaan beras disetiap tahunnya dengan realisasi tertinggi ditahun 2018 (23.436,99 ton). Secara rata-rata dari 2017 sampai dengan 2022 total realisasi pengadaan beras oleh Subdivre Bulog Tanjungpinang sebanyak 9.963,61 ton. Dengan realisasi yang dominan terjadi di bulan April, September, dan November. Pada masa *Covid-19* ditahun 2020, pengadaan beras mengalami kontraksi sebesar -35,62 persen. Lalu Kembali *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan positif sebesar 76,97 persen. Namun terjadi kontraksi yang cukup dalam ditahun 2020 dengan pertumbuhan negatif -76,20 persen. Realisasi pengadaan beras oleh Subdivre Bulog Tanjung Pinang Tahun 2022 merupakan yang paling rendah sejak tahun 2017. Rendahnya realisasi pengadaan beras ditahun 2022, dikarenakan tidak terdapatnya realisasi pengadaan beras pada bulan-bulan tertentu, yaitu Januari, Februari, April, Juni, Agustus, dan Oktober.

Tabel 4.11 - Realisasi Pengadaan Beras Per Bulan oleh Sub Divisi Regional Bulog Batam (kg), (2022)

Bulan	Program KSPH-BM 2022		
	Batam	Karimun	Total
Januari	26.150	12.500	38.650
Februari	58.000	80.500	138.500
Maret	62.727	128.250	190.977
April	67.150	123.350	190.500
Mei	33.050	180.500	213.550
Juni	34.450	126.500	160.950
Juli	48.100	176.000	224.100
Agustus	29.150	184.000	213.150
September	58.650	246.300	304.950
Oktober	49.870	55.800	105.670
November	218.800	187.330	406.130
Desember	185.770	318.450	504.220
Total	871.412	1.819.480	2.690.892

Sumber: Badan Urusan Logistik Subdivre Batam, 2023

Sehubungan dengan realisasi pengadaan beras perbulan oleh subdivre Bulog Batam ditahun 2022 untuk Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga – Beras Medium (KSPH-BM), dikota Batam telah terealisasi pengadaan beras sebanyak 871.412 Kg, dengan penyaluran terbesar di bulan November (218.800 Kg) dan Desember (185.770 Kg). Sedangkan pada Kabupaten Karimun telah terealisasi sebanyak 1.819.480 Kg untuk tahun 2022, dengan penyaluran terbesar ada dibulan Desember (318.450 Kg), September (246.300 Kg), dan November (187.330 Kg).

Secara total untuk realisasi pengadaan beras oleh Subdivre Bulog Batam pada Program KSPH-BM 2022 telah terealisasi 2.690.892 Kg dengan realisasi tertinggi dibulan Desember (504.220 Kg) dan November (406.130 Kg).

#### Aspek Keterjangkauan Pangan

Aspek keterjangkauan pangan merupakan salah satu dari 3 (tiga) pilar dalam ketahanan pangan. Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menilai Indonesia saat ini belum mencapai ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan aspek keterjangkauan pangan bagi masyarakat dinilai belum menjadi perhatian utama pemerintah. Titik berat aspek ini adalah pada tercapainya pemerataan distribusi pangan dari provinsi yang surplus ke wilayah yang defisit. BPS dalam menghitung Indeks Ketahanan pangan, untuk aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial didapat dari tiga indikator yakni indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau pembelian serta indikator harga pembelian tidak tinggi.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan aspek keterjangkauan pangan, yakni dengan melihat bagaimana pendapatan masyarakatnya, pola konsumsinya dan bagaimana tingkat kemiskinan dapat diperbaiki di semua wilayah. Analisis dalam subbab ini akan mengulas secara deskriptif bagaimana capaian aspek keterjangkauan pangan dilihat dari pendapatan

yang akan didekati dari pengeluaran untuk makanan per kapita, konsumsi pangan dan angka kemiskinan.

## Pengeluaran dan Konsumsi

Tabel 4.12 - Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau (rupiah), 2020-2022

Makanan	2020			2021			2022		
	Kota	Desa	Kota dan Desa	Kota	Desa	Kota dan Desa	Kota	Desa	Kota dan Desa
Padi-padian	64.172,00	74.703,00	65.219,00	65.601,00	77.576,00	66.495,00	67.284	67.107,00	67.264,00
Umbi-umbian	7.905,00	6.029,00	7.718,00	9.711,00	5.505,00	9.397,00	9.180,00	6.782,00	8.911,00
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	90.368,00	80.886,00	89.426,00	100.330,00	87.889,00	99.402,00	99.124,00	87.487,00	97.821,00
Daging	37.982,00	17.410,00	35.938,00	48.716,00	18.678,00	46.474,00	54.548,00	25.524,00	51.298,00
Telur dan Susu	56.935,00	37.719,00	55.025,00	60.840,00	44.674,00	59.634,00	56.634,00	38.179,00	54.568,00
Sayur-sayuran	69.965,00	54.843,00	68.462,00	76.002,00	58.446,00	74.692,00	78.845,00	57.903,00	76.501,00
Kacang-kacangan	11.394,00	9.665,00	11.222,00	12.575,00	8.505,00	12.272,00	13.797,00	10.135,00	13.387,00
Buah-buahan	40.522,00	21.184,00	38.601,00	40.228,00	18.566,00	38.611,00	45.018,00	22.287,00	42.473,00
Minyak dan Kelapa	16.334,00	17.261,00	16.426,00	18.170,00	20.623,00	18.353,00	24.807,00	26.001,00	24.941,00
Bahan Minuman	18.291,00	25.631,00	19.020,00	20.001,00	28.662,00	20.648,00	20.260,00	26.513,00	20.961,00
Bumbu-Bujmbuan	15.003,00	17.552,00	15.256,00	17.966,00	19.321,00	18.067,00	19.971,00	17.780,00	19.725,00
Konsumsi lainnya	13.234,00	15.078,00	13.418,00	17.927,00	20.069,00	18.087,00	19.486,00	18.618,00	19.389,00
Makanan dan minuman jadi	301.938,00	158.246,00	287.659,00	276.235,00	144.794,00	266.769,00	288.708,00	177.337,00	276.238,00
Rokok	75.931,00	87.027,00	77.034,00	78.235,00	92.594,00	79.306,00	70.461,00	90.867,00	72.745,00
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>819.974,00</b>	<b>623.234,00</b>	<b>800.424,00</b>	<b>842.537,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>828.206,00</b>	<b>868.122,00</b>	<b>672.520,00</b>	<b>846.222,00</b>

Sumber: BPS Kepri, 2023

Pada subab ini akan menyajikan informasi terkait rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan (dari tahun 2020-2022) berdasarkan komoditas dan daerah, terdapat 14 kelompok komoditas yang akan ditampilkan yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makan dan minuman jadi, dan rokok.

Terjadi peningkatan pengeluaran untuk komoditas pangan disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 pengeluaran total bahan makanan untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp819.974, sedangkan untuk wilayah desa pengeluaran total bahan makanan sebesar Rp623.234. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pengeluaran untuk konsumsi diwilayah kota sebesar 2,75 persen sehingga menjadi Rp842.537 perbulannya. Pertumbuhan konsumsi tertinggi ada pada komoditas konsumsi lainnya (35,46%). Sedangkan komoditas makanan dan minuman jadi yang memiliki andil terbesar, mengalami penurunan -8,51 persen. Pada wilayah desa juga mengalami peningkatan sebesar 3,64 persen sehingga pengeluaran perkapita untuk komoditas makanan menjadi Rp645.900/bulan.

Pada tahun 2022, pengeluaran konsumsi perkapita untuk bulanan juga mengalami pertumbuhan. Pada wilayah kota terjadi pertumbuhan positif sebesar 3,04 persen sehingga pengeluaran dalam sebulan untuk makanan meningkat menjadi Rp868.122. Sedangkan pada wilayah desa juga mengalami peningkatan sebesar 4,12 persen, sehingga pengeluaran konsumsi perkapita di desa untuk sebulannya menjadi Rp672.520.

Pada wilayah perkotaan ditahun 2020-2022 pengeluaran untuk makanan didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi, lalu diikuti konsumsi ikan/udang/cumi/kerang. Umbi-umbian menjadi pengeluaran paling rendah untuk wilayah kota di tiap bulannya. untuk wilayah desa pada tahun 2022, konsumsi terbesar ada pada komoditas makanan dan minuman jadi. ikan/udang/cumi/kerang, dan padi-

padian. Sama seperti wilayah kota, umbi-umbian menjadi pengeluaran/konsumsi terendah di wilayah desa.

### Kemiskinan

Tabel 4.13 - Garis Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021-September 2022

Daerah/Tahun		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
		Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan	September 2021	429.830	225.676	655.506
	Maret 2022	453.563	233.682	687.245
	September 2022	486.016	247.232	733.248
Perdesaan	September 2021	467.527	159.285	626.811
	Maret 2022	496.488	162.820	659.308
	September 2022	525.085	172.647	697.732
Total	September 2021	432.804	221.050	653.853
	Maret 2022	458.362	225.707	684.070
	September 2022	491.238	239.224	730.462

Sumber: Data Survei Susenas September 2021, Maret 2022 dan September 2022 (diolah), 2023

Garis Kemiskinan di Kepri dari bulan September 2021 sampai dengan September 2022, terus meningkat. Selama periode Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaitu dari Rp 684.070 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 730.462 per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 11,72 persen, yaitu dari Rp 653.853 per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 730.462 per kapita per bulan pada September 2022. Komponen Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 67,25 persen, sedangkan sumbangan GKBM terhadap GK hanya sebesar 32,75 persen.<sup>5</sup>

Tabel 4.14 - Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021 dan 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2021	2022	2021	2022
Karimun	16,28	16,44	6,85	6,87
Bintan	10,54	10,67	6,42	6,44
Natuna	3,98	4,32	4,95	5,32
Lingga	12,58	12,7	13,93	14,05
Kepulauan Anambas	3,08	3,29	7,09	7,51
Batam	77,17	82,59	5,05	5,19
Tanjungpinang	20,85	21,67	9,57	9,85
<b>Kepri</b>	<b>144,46</b>	<b>151,68</b>	<b>6,12</b>	<b>6,24</b>

Sumber : BPS Kepri, 2023

<sup>5</sup> BPS Kepri, 2023

Penduduk miskin di Kepri pada tahun 2022 sebanyak 151,68 ribu orang atau mengalami peningkatan sebesar 5 persen dibandingkan tahun 2021. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi berada pada kabupaten Natuna yaitu sebesar 8,54 persen di tahun 2022, lalu diikuti kabupaten Kepulauan Anambas yang meningkat 6,82 persen. Secara keseluruhan (tahun 2022) kontribusi terbesar jumlah penduduk miskin di Kepri berasal dari kota Batam (54,45%), lalu kota Tanjungpinang (14,59%), dan kabupaten Karimun (10,84%). Jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar, yaitu 14,05% pada tahun 2022. Setelah kabupaten Lingga, diikuti kota Tanjungpinang dengan persentase 9,85%. Wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah adalah kota Batam (5,19%).

### Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.<sup>6</sup> Aspek pemanfaatan pangan pada FSVA didekati dari lima indikator, yaitu: (i) tenaga kesehatan; (ii) akses air bersih; (iii) lama sekolah perempuan; (iv) balita stunting; dan (v) angka harapan hidup<sup>7</sup>.

Tabel 4.15 - Lima Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan

Wilayah	Tanpa Air Bersih (%)			Lama Sekolah Perempuan (tahun)			Rasio Tenaga Kesehatan			Angka Harapan Hidup (tahun)			Stunting (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bintan	33.85	26.00	28.80	8.04	9.24	9.04	1.67	1.48	1.42	70.30	70.38	70.46	14.38	10.97	20.00
Karimun	22.74	23.31	20.13	7.78	8.47	8.38	1.04	0.95	0.85	70.71	70.91	71.11	15.08	11.50	17.60
Natuna	24.30	14.51	18.66	8.39	8.71	9.13	3.49	2.96	2.72	64.81	65.06	65.31	17.36	13.24	17.80
Lingga	23.34	41.47	20.93	7.11	6.79	7.72	3.97	3.64	3.78	61.75	62.06	62.39	16.49	12.57	25.40
Kepulauan anambas	40.74	41.24	36.05	7.07	7.85	7.51	1.51	1.26	1.13	67.06	67.21	67.36	17.47	13.32	21.70
Batam	0.83	0.90	1.19	11.03	10.92	11.21	0.35	0.30	0.22	73.29	73.33	73.36	16.33	12.45	17.50
Tanjungpinang	6.24	8.87	12.61	10.16	10.63	10.10	0.12	0.11	0.10	72.02	72.10	72.18	16.63	12.68	18.80

Sumber : <https://fsva.badanpangan.go.id/>

### Kecukupan Tenaga Kesehatan

Rasio antara jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk di kabupaten/kota di Kepri untuk 6 kabupaten/kota mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Salah satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud yaitu Bintan, telah menurun dari 1,67 ditahun 2020, kemudian menjadi 1,48 ditahun 2021, dan 1,42 ditahun 2022, yang artinya rata-rata 1 orang tenaga Kesehatan di Bintan bekerja melayani wilayah seluas 1,42 km<sup>2</sup>. 5 Kabupaten lainnya yang mengalami penurunan rasio adalah Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, Batam,

<sup>6</sup> <https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/214>

<sup>7</sup> Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Food Security and Vulnerability Atlas Tahun 2022, Badan Pangan Nasional, 2022

dan Tanjungpinang. Sedangkan kabupaten Lingga mengalami kenaikan rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan. Di Provinsi Kepri, rasio terendah pada tahun 2022 dimiliki adalah kota Batam dengan rasio sebesar 0,22, dimana masing-masing tenaga kesehatannya melayani wilayah seluas 0,22 km<sup>2</sup>. Penurunan rasio ini disebabkan jumlah tenaga Kesehatan yang mengalami kenaikan.

### **Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih**

Pada tahun 2022, terdapat 3 kabupaten yang mengalami penurunan persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu Karimun, Lingga, Anambas. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota lainnya mengalami peningkatan persentase, yaitu Bintan, Natuna, Batam, dan Tanjungpinang.

### **Lama Sekolah Perempuan diatas 15 Tahun**

Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun untuk tahun 2022, yaitu: Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Tanjungpinang. Sedangkan Natuna, Lingga, dan Batam mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada Kabupaten Lingga yaitu sebesar 13,70%, lalu diikuti Kabupaten Natuna (4,82%).

### **Persentase Balita Stunting**

Persentase Balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting) adalah persentase anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).

Pada tahun 2022, persentase balita stunting diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri mengalami peningkatan. Kabupaten Lingga mengalami peningkatan yang paling tinggi di provinsi Kepri, lalu diikuti Kepulauan Anambas, dan kota Tanjungpinang.

### **Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Angka harapan hidup pada tahun 2022 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri mengalami peningkatan. Dengan peningkatan tertinggi berada pada Kabupaten Lingga yang tumbuh sebesar 0,53%, lalu diikuti Kabupaten Natuna yang tumbuh 0,38%.

### 4.1.3 Sinergi Program Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan

Tabel 4.16 - Pagu dan Realisasi APBN Kepri untuk Program Ketahanan Pangan, dalam Rp miliar (2022)

No	Nama Program	Pagu	Realisasi	% Reliasasi
1	Program Dukungan Manajemen	80,67	79,87	99,01
2	Program Ketahanan Sumber Daya Air	32,56	32,56	100,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15,02	10,94	72,85
4	Program Kualitas Lingkungan Hidup	0,11	0,10	97,98
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3,64	2,93	80,64
6	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0,39	0,39	99,66
7	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	48,69	46,82	96,16
8	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,21	0,19	93,49
<b>Jumlah</b>		<b>181,29</b>	<b>173,82</b>	<b>95,88</b>

Sumber: MEBE (diolah), 2023

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kepri pemerintah melalui kebijakan fiskal mempersiapkan program terkait ketahanan pangan. Total pagu anggaran untuk program ketahanan pangan di Kepri pada tahun 2022 sebesar Rp181,29 miliar, dan telah terealisasi sebesar Rp173,82 miliar atau 95,88 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan. Program dengan realisasi tertinggi adalah program ketahanan sumber daya air yang telah terealisasi 100 persen, selanjutnya program dukungan manajemen yang sudah terealisasi sebesar 99,01 persen. Realisasi terendah untuk program ketahanan pangan di Kepri pada tahun 2022 adalah program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang terealisasi sebesar 72,85 persen.

Program dengan anggaran terbesar terkait ketahanan pangan adalah program dukungan manajemen dengan pagu Rp80,67 miliar, lalu diikuti program pengelolaan perikanan dan kelautan (Rp48,69 miliar), program ketahanan sumber daya air (Rp32,56 miliar). Sedangkan program dengan pagu anggaran terkecil adalah program kualitas lingkungan hidup (Rp0,11 miliar).

Tabel 4.17 - Pagu dan Realisasi APBN Kepri untuk Program Ketahanan Pangan, dalam Rp miliar (TW I 2023)

Output Program Ketahanan Pangan	Pagu	Realisasi			Total Tw I 2023
		Januari	Februari	Maret	
Bantuan Hewan	4,77	-	0,31	1,14	1,45
Bantuan Peralatan / Sarana	1,44	-	-	0,01	0,01
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	0,30	-	0,00	0,04	0,04
Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	0,23	-	0,02	0,03	0,05
OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	15,83	0,002	0,06	0,42	0,48
OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	8,85	-	0,04	0,08	0,13
Pelayanan Publik Lainnya	1,05	-	-	-	-
Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	0,15	-	-	-	-

Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,02	-	-	-	-
Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	14,33	-	-	-	-
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,73	-	-	-	-
Sarana Pengembangan Kawasan	2,80	-	-	-	-
Sertifikasi Produk	7,90	0,03	0,40	1,11	1,55
<b>Grand Total</b>	<b>58,39</b>	<b>0,03</b>	<b>0,84</b>	<b>2,83</b>	<b>3,70</b>

Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu RI, 2023

Pada tahun 2023, pagu anggaran ketahanan pangan sebesar Rp58,39 miliar atau menurun -67,79 persen dibandingkan anggaran di tahun 2022. Kontribusi terbesar untuk output program ketahanan pangan di Kepri berada pada output Prasarana Bidang SDA dan Irigasi sebesar (Rp15,83 miliar), diikuti Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp14,33 miliar). Sampai dengan triwulan I tahun 2023, program ketahanan pangan di kepri telah terealisasi Rp3,70 miliar (6,33%). Output dengan realisasi terbesar terdapat pada output bantuan hewan (30,42%), konservasi kawasan/rehabilitasi ekosistem (20,61%), dan Sertifikasi Produk (19,59%). Terdapat 6 output yang belum terealisasi ditahun 2023 ini, diantaranya: (1) Pelayanan Publik Lainnya, (2) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan, (3) Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, (4) Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, (5) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan (6) Sarana Pengembangan Kawasan.

Tabel 4.18 - Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk Ketahanan Pangan di tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan. Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.		114% <=11 % 87,70%	<b>811.024.776</b>
	a Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				<b>623.082.230</b>
	1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Tanjungpinang	1 Laporan	30.567.202
	2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Tujuh Kab/Kota	1 Laporan	592.515.028
	b Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				<b>187.942.546</b>

	1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Tujuh Kab/Kota	1 Laporan	147.095.590
	2)	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Kab. Bintan	1.5 Ton	40.846.956
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian		1,25% 62,08%	<b>6.344.400.161</b>
	a	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				<b>5.387.622.533</b>
	1)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tujuh Kab/Kota	2 Laporan	5.387.622.533
	b	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				<b>956.777.628</b>
	1)	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Tujuh Kab/Kota	1 Laporan	956.777.628
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan.		0,77 % 1,42 % 3,0 %	<b>3.023.430.944</b>
	a	Penataan Prasarana Pertanian				<b>3.023.430.944</b>
	1)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tujuh Kab/Kota	3 Dokumen	3.023.430.944

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri (diolah), 2023

Sehubungan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk Program Ketahanan Pangan, terdapat tiga Program yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan di Kepri, yaitu: (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat, (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Total anggaran untuk ketiga program tersebut sebesar Rp10,18 miliar.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp811,02 miliar, terdapat dua kegiatan untuk melaksanakan program tersebut, yaitu kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi

pasokan dan harga pangan, dengan anggaran sebesar Rp623,08 miliar. Selanjutnya adalah kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi, dengan anggaran sebesar Rp187,94 miliar.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dialokasikan sebesar Rp6,34 miliar. Program tersebut terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan anggaran Rp5,39 miliar. Selanjutnya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan anggaran Rp956,77 miliar.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dialokasikan sebesar Rp3,02 miliar dengan satu kegiatan, yaitu : Penataan Prasarana Pertanian.

Tabel 4.19 - Anggaran Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau untuk Ketahanan Pangan di tahun 2022

No	Jenis Kegiatan Ketahanan Pangan Sarpras	Biaya Kegiatan (Rupiah)	
		Rencana	Realisasi
1	2	9	10
1	Jalan Akses Lahan	2.305.126.175	1.837.058.390
2	Jembatan Roda 4	78.320.389	72.550.000
3	Jembatan Roda 2	41.796.488	30.296.980
4	Instalasi Pompa Hidram	-	-
5	Embung	-	-
6	Sarpras Pendukung Embung	-	-
7	Bendung Sederhana	-	-
8	Bangunan Irigasi	-	-
9	Saluran Irigasi	-	-
10	Tempat Penjemuran Tanaman Pangan	-	-
11	Lumbung Pangan	679.900.138	431.247.834
12	Sumur	-	-
13	Perpipaan	251.995.500	221.122.500
14	Sarpras Lainnya	11.657.194.019	7.754.694.139
15	PKTD Pertanian dan perkebunan	4.658.227.850	3.581.917.202
16	PKTD Perdagangan Logistik dan Pangan	-	-
17	PKTD Perikanan	261.123.000	254.115.200
18	PKTD Peternakan	230.336.000	83.325.963
19	PKTD Industri Pengolahan dan Pergudangan untuk Pangan	-	-
20	PKTD Prasarana Umum	758.904.800	625.709.000
21	PKTD Perhutanan	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20.922.924.359</b>	<b>14.892.037.208</b>

Sumber Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri (diolah), 2023

Terdapat 20 Jenis Kegiatan Ketahanan Pangan untuk Sarana dan Prasarana. Total anggaran Dana Desa Kepri ditahun 2022 untuk kegiatan ketahanan pangan sebesar Rp20,92 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,89 miliar atau sudah terealisasi sebesar 71,18 persen. Kegiatan dengan pagu terbesar adalah kegiatan Sarpras Lainnya (Rp11,66 miliar), diikuti kegiatan PKTD Pertanian dan Perkebunan (Rp4,67 miliar). Selanjutnya untuk kegiatan dengan realisasi terbesar adalah kegiatan PKTD Perikanan (97,32%), lalu Jembatan Roda 4 (92,63%), dan Perpipaan (87,75%).

Terdapat 11 kegiatan dana desa terkait ketahanan pangan yang tidak direalisasikan ditahun 2022 ini.

### **Kendala, permasalahan, dan tantangan pelaksanaan anggaran**

Beberapa kendala dan permasalahan terkait dengan ketahanan pangan, yaitu:

- Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan di Kepri dikarenakan tidak meratanya nilai IKP antara wilayah kota dan kabupaten.
- Ketergantungan Pasokan Pangan dari luar daerah Kepulauan Riau masih relatif tinggi
- Cadangan pangan pemerintah daerah masih rendah
- Keterbatasan produksi karena faktor cuaca (wilayah Kepri masuk non Zona Musim), kondisi lahan baik dari segi luas lahan dan kualitas lahan, SDM petani serta pengairan yang belum optimal
- Faktor cuaca yang tidak menentu yang dapat menimbulkan ombak tinggi yang menjadi permasalahan dalam penyaluran distribusi
- Persoalan distribusi karena Kepri wilayah kepulauan yang terpisah oleh lautan dan jarak antar pulau yang cukup jauh
- Fluktuasi harga karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran komoditas pangan.

### **Rekomendasi kebijakan**

Dalam upaya melakukan optimalisasi ketahanan pangan di Provinsi Kepri, maka rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. Melakukan pemetaan daerah rawan pangan dimana di Kepulauan Riau terdapat beberapa kabupaten/kota yang rawan pangan, oleh karena itu pemetaan dapat dilakukan sampai pada tingkat kecamatan. Sebagai contoh yakni beberapa wilayah di Lingga, Karimun dan beberapa wilayah di perkotaan seperti di Batam dan Tanjungpinang.
2. Peningkatan produktifitas melalui berbagai program, seperti program modernisasi pertanian, bantuan alsintan dan sarana prasarana lainnya, klistor pertanian, peningkatan SDM pertanian dan efektivitas kelembagaan pertanian.
3. Peningkatan produktifitas melalui program Kepri Mandiri Cabai 2022-2024 perlu dikawal pelaksanaannya hingga mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi ketersediaan cabai di Kepri mengingat tingginya harga cabai yang menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kepri pada tahun 2022.
4. Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan ke seluruh daerah
5. Mendorong Kerjasama antar pelaku usaha dan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan pangan daerah.
6. Peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan stakeholders terkait diantaranya Bulog.
7. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan terutama pada bulan-bulan akhir tahun yang rawan cuaca ekstrim serta gelombang tinggi.

## 4.2. Analisis Program Pengelolaan Sampah

### 4.2.1 Profil Pengelolaan Sampah Daerah Berdasarkan Jakstrada

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 71 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga selanjutnya disebut Jakstrada. Jakstrada memuat:

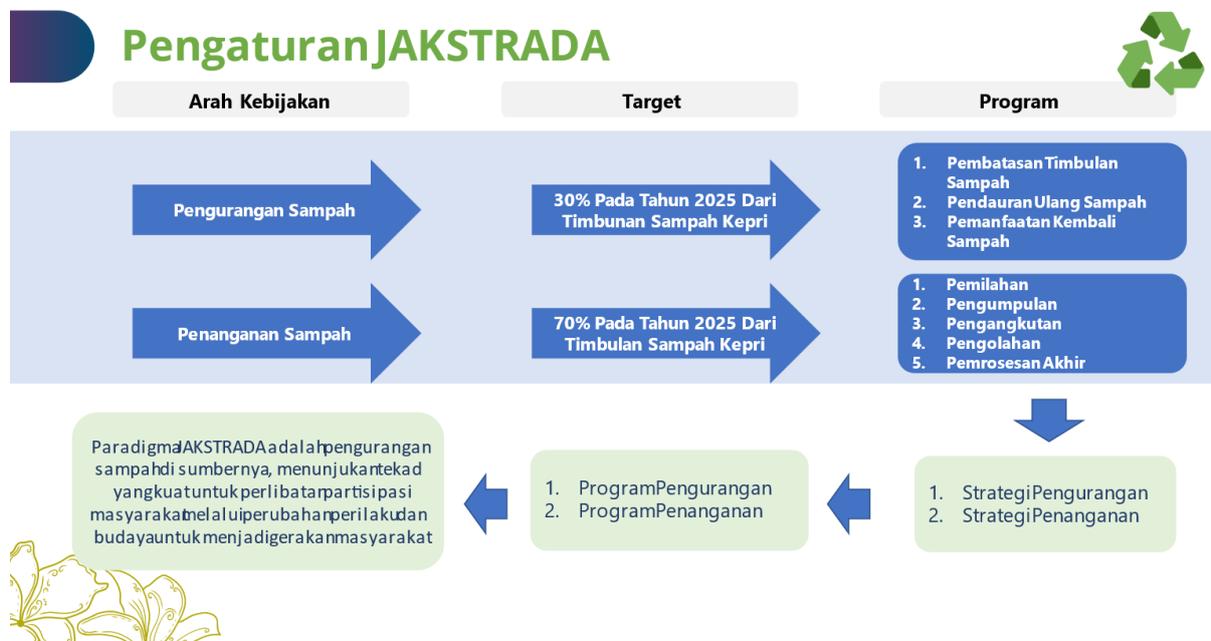
a. Arah kebijakan:

Peningkatan Kinerja dibidang pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. Strategi, Program, dan Target:

Pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Grafik 4.2 - Pengaturan Jakstrada Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Peraturan Gubernur Kepri No. 71 Tahun 2018

Target Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah diatur didalam lampiran Peraturan Gubernur Kepri Nomor 71 Tahun 2018. Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditentukan dari tahun 2018 – 2025. Indikator dari target pengurangan sampah, yaitu (1) potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas (ton/tahun), (2) target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas, dan (3) target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota (ton/tahun).

Tabel 4.20 - Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah-Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	504.012,11	513.278,52	522.729,94	532.368,47	5422.200,28	552.227,53	562.455,43	572.888,21
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (ton/tahun)	90.722,18	102.655,70	115.000,59	127.768,43	140.972,07	149.101,430	157.487,52	171.866,46

Sumber : Peraturan Gubernur Kepri No. 71 Tahun 2018

Selanjutnya target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, juga ditentukan dari tahun 2018 – 2025. Indikator dari target pengurangan sampah sama seperti indikator penanganan sampah.

Tabel 4.21 - Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah-Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	504.012,11	513.278,52	522.729,94	532.368,47	5422.200,28	552.227,53	562.455,43	572.888,21
Target Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (ton/tahun)	367.928,84	410.622,82	392.047,45	393.952,67	395.806,20	397.603,82	399.343,36	401.021,75

Sumber : Peraturan Gubernur Kepri No. 71 Tahun 2018

Apabila dilihat realisasi pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Kepri belum mencapai target persentase pengurangan dan penanganan sampah. Pada tahun 2020 target pengurangan sampah di Kepri sebesar 115.000,59 (22%), namun realisasi pengurangan sampah sebesar 90.034,97 ton (19,15%). Sehubungan dengan penanganan sampah, pada tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 392.047,45 ton (75%), sedangkan realisasinya sebesar 338.332,69 ton (71,97%).

Pada tahun 2021, target pengurangan sampah di Kepri sebanyak 127.768,43 ton (24%) sedangkan realisasinya sebesar 105.706,33 ton (21,65%). Selanjutnya target penanganan sampah ditahun 2021 sebesar 393.952,67 ton (74%) sedangkan realisasinya sebesar 336.644,36 ton (68,965). Pada tahun 2022, target pengurangan

sampah sebesar 140.972,07 ton (73%), sedangkan realisasinya sebesar 363.260,88 (70,74%).

Tabel 4.22 - Target dan Realisasi Pengelolaan Sampah di Kepri (2020-2022)

Indikator	2020		2021		2022	
	Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Jumlah Timbunan Sampah (Ton/Tahun)	522.729,94	470.096,39	532.368,47	488.163,98	542.200,28	513.547,19
Persentase Pengurangan Sampah	22%	19,15%	24%	21,65%	26%	14,61%
Jumlah Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)	115.000,59	90.034,97	127.768,43	105.706,33	140.972,07	57.040,61
Persentase Penangan Sampah	75%	71,97%	74%	68,96%	73%	70,74%
Jumlah Penangan Sampah (Ton/Tahun)	392.047,45	338.332,69	393.952,67	336.644,36	395.603,83	363.262,88

Sumber : Pergub Kepri No 71 Tahun 2018, Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (2020-2022)

#### 4.2.2 Dukungan Program dan Anggaran yang Bersumber dari Fiskal (APBN dan APBD)

Tabel 4.23 - Dukungan APBN untuk Program Pengelolaan Sampah di Provinsi Kepri (Rp dalam miliar)

Tahun	K/L	Satker	Output	Pagu	Realisasi	Persentase
2018	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepri	Sistem Penanganan Persampahan	26,54	26,41	99,52%
2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepri	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	24,64	24,61	99,86%
2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepri	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	1,71	-	-

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu RI (diolah), 2023

Dukungan APBN untuk program pengelolaan sampah di provinsi kepri dianggarkan pada tahun 2018, 2021, dan 2023. Anggaran program pengelolaan sampah tersebut dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Pada tahun 2018 Kementerian PUPR, melalui Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepri memiliki anggaran untuk Sistem Penanganan Persampahan sebesar Rp26,54 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp26,41 (99,52%).

Pada tahun 2021, Kementerian PUPR melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepri melaksanakan anggaran Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dengan pagu sebesar Rp24,64 miliar dan telah terealisasi Rp24,61 miliar (99,86%).

Pada tahun 2023, Kementerian PUPR melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepri memiliki output Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat dengan anggaran Rp1,71 miliar.

Tabel 4.24 - APBD untuk Program Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepri

TAHUN	NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%
2020	1. Pengelolaan Persampahan Limbah Domestik di Kawasan Perkantoran Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau	180,000,000	120,000,000	119,216,500	99.35
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Provinsi Kepulauan Riau (Pengadaan Tong Sampah dan Mesin Potong Rumpuk di Kabupaten Bintan)	200,000,000	200,000,000	188,466,500	94.23
	3. Aksi Bersama Penanganan Sampah dan Limbah Domestik di Wilayah Pesisir Kampung Agas Tanjung Uma	100,000,000	100,000,000	99,691,000	99.69
	4. Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA) --> <b>REFOCUSING</b>	135,000,000,000	7,703,300	7,703,300	100.00
2021	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Pengadaan kendaraan motor roda tiga sebanyak 2 unit di Kabupaten Bintan dan pengadaan tong sampah 100 unit di Kota Batam)	274,602,150	274,602,150	261,042,920	95.06
	2. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Adipura, Adiwiyata, Proper)	310,441,400	31,216,400	24,613,950	78.85
2022	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Pengadaan kendaraan motor roda tiga sebanyak 2 unit di Kabupaten Bintan)	75,000,000	75,000,000	70,946,600	94.60
2023	1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	122,889,305			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 anggaran APBD untuk program pengelolaan sampah mengalami penurunan dari pagu Rp427,70 juta (2020) menjadi Rp75.000.000 (2022), atau menurun -82,46 persen. Pada tahun 2023 anggaran APBD pengelolaan sampah mengalami pertumbuhan sebesar 63,85 persen dengan pagu anggaran sebesar Rp122,89 juta.

Pada tahun 2022, anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Pengadaan kendaraan motor roda tiga sebanyak 2 unit di Kabupaten Bintan) telah terealisasi sebesar 94,60 persen atau Rp70,95 juta dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Ditahun 2023, anggaran pengelolaan sampah ditujukan untuk sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional.

Tabel 4.25 - Dukungan Fiskal (APBD) untuk Program Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang

Sub Kegiatan	2022	2023	Growth
Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	891.834.640	990.240.100	11,03%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.799.455.397	6.872.418.522	1..07%
Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.310.377.250	1.112.124.000	-15,13%
Total	9.001.667.287	8.974.782.622	-0,30%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Dukungan Fiskal terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang melingkupi: Peningkatan peran serta masyarakat, penyediaan sarpras, dan penanganan sampah. Anggaran untuk peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan sarpras ditahun 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022, sedangkan anggaran penanganan sampah mengalami kontraksi sebesar -15,13 persen. Secara total anggaran ketiga sub kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang ditahun 2023 mengalami kontraksi -0,30 persen dibandingkan tahun 2022.

### 4.2.3 Rekomendasi Kebijakan Bagi Pusat dan Daerah

No	Isu	Rekomendasi
1	TPA Keseluruhan Pulau Bintan masih mengandalkan TPA milik Kota Tanjungpinang (termasuk Kabupaten Bintan), sehingga kapasitas nya saat ini sudah penuh.	Diperlukannya Anggaran tambahan bagi DLH Pemprov untuk dapat mengadakan TPA Regional yang akan mengelola sampah untuk regional satu pulau Bintan
2	APBD DLH Tanjungpinang terkait dengan sarana dan prasarana masih kurang. Saat ini kota Tjpinang masih kekurangan Kontainer Sampah tepi jalan. Untuk saat ini jumlah kontainer belum dapat memadai pengelolaan sampah untuk seluruh penduduk tanjungpinang, rasio nya hanya 2,6 persen	Diperlukan Anggaran tambahan untuk mendorong peningkatan pengadaan jumlah kontainer sampah di kota Tanjungpinang
3	Minimnya fasilitas septiktank yg ada di pulau Penyengat (saat ini baru terdapat 4 titik) yg berpotensi mencemari lautan apabila tidak lagi dapat menampung dengan kapasitas yang ada saat ini.	Diperlukan Anggaran Tambahan untuk membeli kapal untuk mengosongkan septiktank, selain itu dibutuhkan sarpras pendukung lainnya
4	Usia Alat Berat (seperti: loader, dozer, dan excavator) untuk pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang banyak yang sudah tua, sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan yang mahal.	Diperlukan Anggaran tambahan untuk mengadakan alat berat yang baru di kota Tanjungpinang
5	Tidak tercapainya target Pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020-2022 perlu menjadi perhatian.	Maka, perlu penguatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana bagi dinas lingkungan hidup juga perlu dilakukan agar meningkatkan kualitas pengelolaan sampah

## 4.3 Sistematisa Analisis Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

### 4.3.1 Profil Kondisi/Kebijakan/Target Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak di Daerah

Tabel 4.26 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak menurut Kab/Kota di Kepri Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Growth 2022	Growth 2018 - 2022
Batam	90,66	94,42	97,62	95,63	95,34	-0,30%	5,16%
Tanjungpinang	93,12	94,65	87,98	91,66	93,35	1,84%	0,25%
Karimun	88,35	78,19	88,62	88,10	85,19	-3,30%	-3,58%
Bintan	68,25	74,26	70,16	76,64	85,48	11,53%	25,25%
Natuna	88,21	72,34	82,72	81,26	87,23	7,35%	-1,11%
Lingga	77,39	74,25	58,82	81,25	83,48	2,74%	7,87%
Kep. Anambas	19,49	33,32	21,38	25,51	28,56	39,25%	46,45%
Kepulauan Riau	86,96	88,51	90,41	90,83	91,82	1,09%	5,59%

Sumber : BPS Kepri, 2023

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 91,82 persen atau meningkat 1,09 persen jika dibandingkan tahun 2021. Kepulauan Anambas memiliki persentasi akses terhadap air minum layak yang rendah di Kepri (28,56%), Sedangkan kota Batam memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap air minum layak (95,34%). Mayoritas Kota/Kab di Kepri memiliki persentase diatas 80 persen untuk akses terhadap air minum layak, kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas (28,56%).

Tabel 4.27 - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kab/Kota di Kepri (2018-2022)

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Growth 2022	Growth 2018 - 2022
Batam	91,73	94,81	95,99	97,83	89,20	-8,82%	-2,76%
Tanjungpinang	80,50	86,71	85,59	84,47	91,71	8,57%	13,93%
Karimun	88,65	95,10	89,56	92,88	97,01	4,45%	9,43%
Bintan	76,07	81,10	77,36	79,76	87,64	9,88%	15,21%
Natuna	70,45	63,14	66,15	70,71	76,45	8,12%	8,52%
Lingga	62,41	60,41	58,51	68,18	65,51	-3,92%	4,97%
Kep. Anambas	23,73	25,95	23,95	33,80	29,07	-13,99%	22,50%
Kepulauan Riau	85,87	89,13	89,19	91,62	87,74	-4,23%	2,18%

Sumber : BPS Kepri, 2023

Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 87,74 persen atau menurun 4,23 persen jika dibandingkan tahun 2020. Kepulauan Anambas memiliki persentasi akses terhadap sanitasi layak yang rendah di Kepri (29,07%). Sedangkan Kab. Karimun memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap sanitasi layak (97,01%). Mayoritas Kota/Kab di Kepri memiliki persentase diatas 70 persen untuk akses terhadap sanitasi layak, kecuali Kabupaten Lingga (65,51%) dan Kepulauan Anambas (29,07%).

#### 4.3.2 Dukungan Program dan Anggaran yang bersumber dari APBN

Tabel 4.28 Dukungan APBN untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Kepri (dalam miliar Rp)

Program	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	97,14	88,30	69,83	60,85	99,49	87,30	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3,92	3,87	2,51	2,50	1,01	1,00	-	-	-	-	-	-
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10,36	7,64	8,85	8,23	1,13	0,80	6,27	5,74	0,79	0,70	3,38	0,28
Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	233,16	95,47	-	-	73,59	50,43	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	238,49	226,84	179,35	156,68	71,09	70,70	-	-	-	-	-	-
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	0,05	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	0,16	0,16	0,42	0,37	0,18	-
Program Ketahanan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	-	118,16	117,64	36,59	36,40	53,41	0,76
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	-	-	0,20	0,16	0,76	0,73	-	-

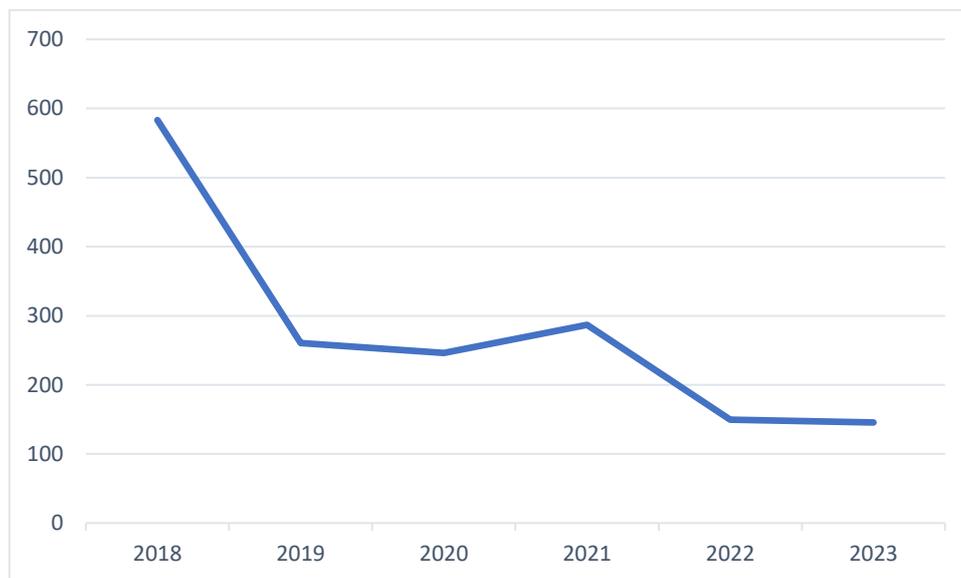
Program	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi								
Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-	-	-	-	79,26	76,60	52,48	51,87	-	-
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	82,71	75,29	58,23	58,05	88,59	1,04
Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,14	-	-
<b>Total</b>	<b>583,12</b>	<b>422,15</b>	<b>260,54</b>	<b>228,26</b>	<b>246,31</b>	<b>210,23</b>	<b>286,76</b>	<b>275,60</b>	<b>149,42</b>	<b>148,28</b>	<b>145,56</b>	<b>2,08</b>

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu RI (diolah), 2023

Pagu APBN untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan dari tahun 2018 – 2023. Pada tahun 2018 pagu APBN untuk program Air Bersih dan Sanitasi di Kepri sebesar Rp583,12 miliar, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp145,56 miliar, atau terjadi pertumbuhan negatif sebesar -75,04 persen. Realisasi anggaran terbesar untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Kepri terjadi pada tahun 2022 (99,24%), 2021 (96,11%), dan 2019 (87,61%).

Program dengan Kontribusi terbesar pada tahun 2022, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman (38,97%) dan Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (35,13%). Pada tahun 2023, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga menjadi program dengan pagu terbesar, yaitu (60,86%), lalu diikuti program ketahanan sumber daya air (36,69%).

Grafik 4.3 Tren Pagu Program Air Bersih dan Sanitasi Layak (2018-2023)



Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPb, Kemenkeu RI (diolah), 2023

### 4.3.3 Dukungan Program dan Anggaran yang bersumber dari APBD

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki program yang terkait dengan sanitasi yaitu program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Dengan target indikator program STBM adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang STOP Buang Air Besar Sembarangan. Anggaran untuk Sanitasi melalui program STBM yaitu :

2020 : Tidak ada anggaran APBD untuk STBM

2021 : Tidak Ada anggaran APBD untuk STBM

2022 : Rp 28.781.700, -

2023 : Rp. 150.000.000,-

#### 4.3.4 Rekomendasi Kebijakan bagi Pusat dan Daerah

No	Isu	Rekomendasi
1	Persentase akses terhadap air minum di Kabupaten Anambas yang sangat rendah	<p>Dalam upaya mengatasi rendahnya persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah dapat menjalankan program hibah air minum dalam upaya meningkatkan akses air minum yang layak.</p> <p>Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p>
2	Akses terhadap sanitasi layak di Anambas masih rendah	<p>Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi hidup bersih serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung sanitasi layak khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.</p>

### 4.4. Sistematika Analisis Reviu Kinerja Program PSN *Ongoing Project*

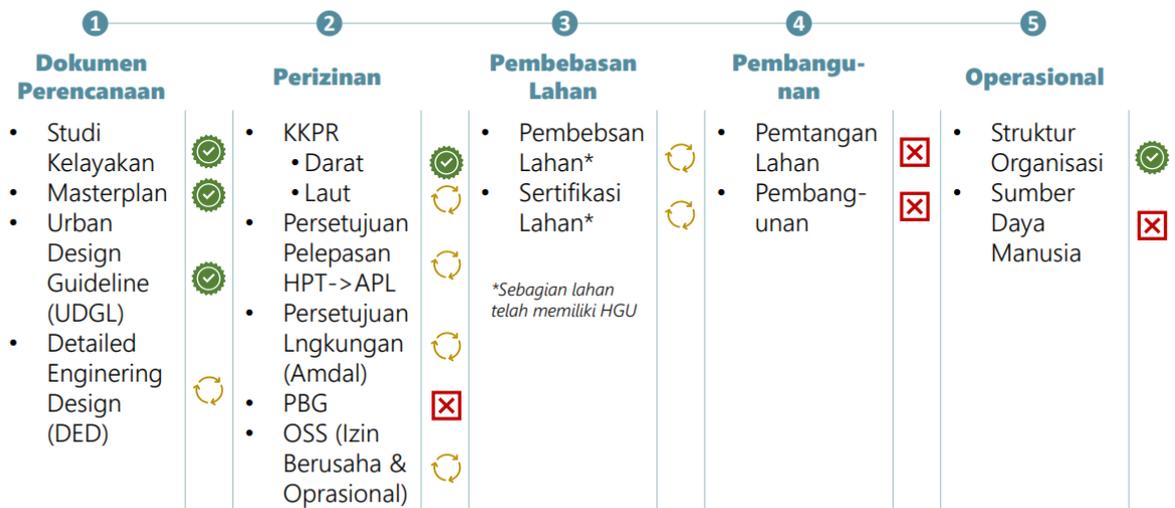
#### 4.4.1 Profil Proyek

Kawasan Industri Pulau Ladi merupakan kawasan industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri yang berwawasan lingkungan dengan prinsip *eco-green industry* dan *zero waste*. Kawasan Industri ini telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat No. 654/259/B.UM-SET/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Pengelolaan Limbah di Pulau Ladi Kota Batam.

Selanjutnya melalui surat dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor B/194/M-IND/KPAI/III/2020 perihal Usulan PSN Bidang Kawasan Industri yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian Republik Indonesia menyampaikan usulan tambahan PSN di bidang kawasan industri, salah satu diantaranya adalah Kawasan Industri Pulau Ladi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (PT Ladi Kawasan Industri).

Pada tanggal 12 Desember 2022, diundangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut telah ditetapkan Kawasan Industri Pulau Ladi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Gambar 4.1 Progres Kawasan Strategis Industri Pulau Ladi

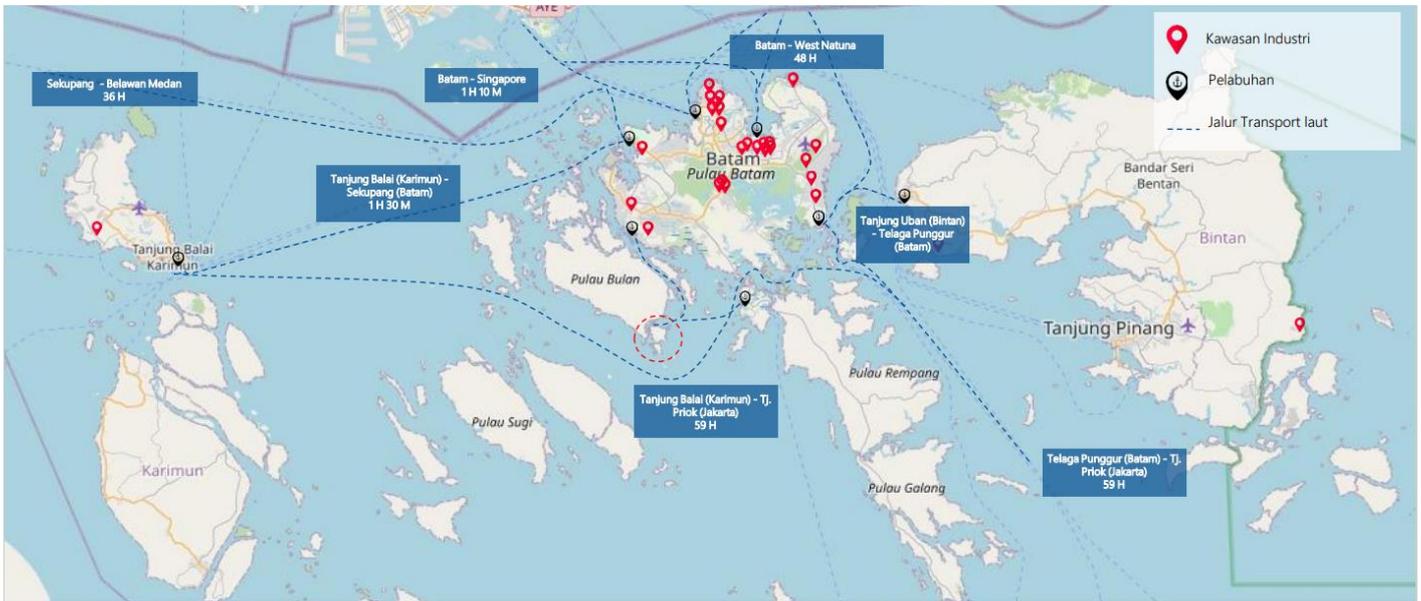


Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nomor 07022210212171164 dengan luas tanah yang dimohon 477ha

Sumber: Profil PT Ladi Kawasan Industri, 2023

Sampai dengan triwulan I 2023, Progres Kawasan Industri Ladi sudah dibuat Studi Kelayakan, *Masterplan*, *Urban Design Guideline* (UDGL) dan sedang dalam proses penyelesaian *Detailed Engineering Design* (DED) untuk tahapan Dokumen Perencanaan. Dikarenakan Kawasan Industri Ladi merupakan Proyek Strategis Nasional maka tahapan pelaksanaan setiap tahap alur prosesnya dapat dilakukan secara paralel. Oleh karena itu di tahap Perizinan telah diselesaikan KKPR Darat dan Laut serta telah diselesaikan Struktur Organisasi pada tahap operasional.

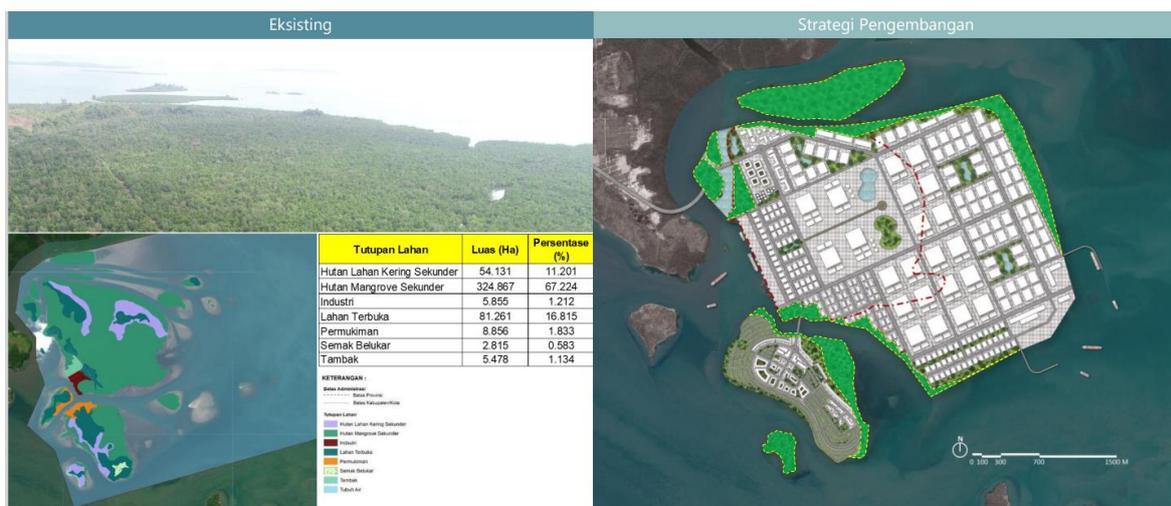
Gambar 4.2 Peta Posisi Strategis Kawasan Industri Pulau Ladi



Sumber: Profil PT Ladi Kawasan Industri, 2023

Berdasarkan arahan RINDUK Kawasan Batam – Bintan – Karimun (BBK) mengarahkan Kawasan Industri Ladi sebagai Industri Pengolahan Limbah yang terpadu di Kepri dan Kawasan Industri di BBK. Kawasan Industri Ladi mempunyai posisi strategis, berada di sentral kawasan integrasi Batam-Bintan-Karimun. Kawasan Industri Ladi dilalui oleh alur pelayaran Nasional, sehingga pelayanan pengolahan limbah tidak hanya Kepulauan Riau tapi mencakup wilayah pulau Sumatera. Kawasan Industri Ladi sudah memiliki penguasaan HGU dari kegiatan usaha sebelumnya (Industri bata export). Salah satu alasan lokasi dari industri ini, dikarenakan industri pengolahan limbah tidak disarankan berdekatan dengan kawasan perkotaan.

Gambar 4.3 Mangrove Initiative Kawasan Industri Pulau Ladi



Sumber: Profil PT Ladi Kawasan Industri, 2023

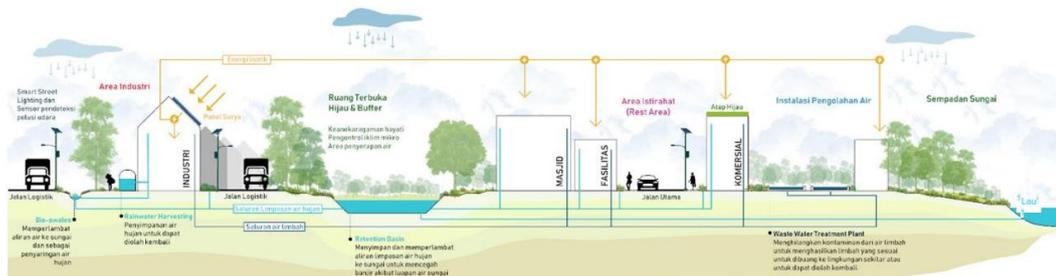
Pada kawasan industri ladi saat ini terdapat 60% vegetasi mangrove berupa *Rhizophora apiculate* dengan kondisi Kesehatan sedang dan indeks keanekaragaman sedang-rendah. 90% tutupan mangrove berupa hutan produksi terbatas. Dalam upaya

mempertahankan keberadaan mangrove, maka terdapat 3 strategi yang akan dilakukan, yaitu:

1. 139,2 Ha dari kawasan industri Ladi berupa area mangrove atau sekitar 14,2% dari total diarahkan menjadi area konservasi.
2. Terdapat kawasan/pulau pusat budidaya mangrove pada kawasan perencanaan.
3. Pemindahan mangrove eksisting ke dalam pulau-pulau reklamasi dan pulau eksisting kawasan perencanaan dalam upaya mempertahankan keberadaan mangrove eksisting.

#### 4.4.2 Manfaat yang Diharapkan

Gambar 4.4 *Development Impact* Kawasan Industri Pulau Ladi



Sumber: Profil PT Ladi Kawasan Industri, 2023

Kawasan Industri Ladi ini menerapkan *Sustainable Development Goals* 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu pengembangan kawasan industri ini *zero emission* yang selaras dengan visi COP26. Limbah diolah menjadi energi atau bahan baku industri lainnya.

Bangunan Industri mengadaptasi bangunan ramah energi seperti optimalisasi panel surya dan pencahayaan alami. Penerapan konsep *Water Sensitive Urban Design* (WSUD) memungkinkan penataan lingkungan yang responsive terhadap air dengan memaksimalkan pemanfaatan air. Manfaat yang akan didapatkan melalui industri ini, yaitu :

1. Pencegahan Banjir
2. Kontrol Iklim Mikro
3. Pencegahan Polusi
4. Daur Ulang Air
5. Pemanfaatan Energi Matahari.

Kawasan Industri Ladi juga akan memberikan manfaat lainnya, sebagaimana dibawah ini:

##### a. Memiliki Nilai Ekonomi yang Baik bagi Daerah

Diproyeksikan apabila tahap 1 PT. Kawasan Industri Ladi beroperasi ( $\pm$  300ha), akan mendatangkan manfaat berupa nilai tambah di 8 sektor, 12.000 tenaga kerja lokal, serta pajak daerah. Dengan pendekatan total *economic value*, Nilai EIRR telah mempertimbangkan hilangnya Nilai Ikan, Cadangan Karbon, dan Biodiversitas sebesar 11.5 miliar.

Tabel 4.29 - *Development Impact* Kawasan Industri Pulau Ladi

Nilai	Kategori	Total Nilai Guna (Rp)
Ikan	Nilai Guna Langsung	985.657.522,50
Cadangan Karbon	Nilai Guna Tidak Langsung	10.533.665.988,54
Biodiversitas	Nilai Pilihan	55.729.343,39
Total		11.595.052.854,43

Indikator	Nilai (Sekma Ladi Sewa)
NPV	Rp87.052.876.659.710
EIRR	79,61%
BCR	5,53

Indikator	Nilai (Sekma Ladi Jual)
NPV	Rp126.588.315.739.673
EIRR	97,81%
BCR	10,37

Penghasilan pajak Daerah Periode 2025-2028		
Pajak	Future Value (Rp)	Present Value (Rp)
Pendapatan Pemkot Batam (PBB & PJJ)	204.428.229.872,82	61.174.425.142,05
Pendapatan Pusat (PPH, PPN)	37.305.586.500.399,50	11.163.564.886.163,90
Total Penghasilan	37.510.014.730.272,30	11.224.739.311.305,90

Sumber: *Profil PT Ladi Kawasan Industri, 2023*

**b. Adanya Gap Pengolahan Limbah.**

Pola produksi limbah di Kota Batam cenderung fluktuatif dalam periode 2012-2021, namun tren menunjukkan arah positif. Berdasarkan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, tercatat periode 2011-2018 limbah yang diolah diluar KPLI (Kota Batam) sebesar 35.5%. Di sisi lain isu limbah B3 tertuang dalam ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 dan perda RPJMD Kota Batam 2021-2026.

**c. Nilai Investasi yang Besar dan Adanya Tenant yang akan Mengisi.**

Total investasi PT. KI Ladi sebesar 5 triliun dalam mengembangkan Kawasan Industri di Pulau Ladi serta telah ada tenant yang pasti akan mengisi ke dalam Kawasan Industri Ladi.

**Pelaksanaan Anggaran**

Anggaran dari Pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional Industri Ladi sampai saat ini belum dilaksanakan sehingga masih didukung oleh pihak swasta. Hingga saat ini pihak swasta yang telah melakukan investasi diantaranya:

- Jlexi Juta Concrete Co. Ltd.
- Wuhan Yadu Packaging and Printing Co. Ltd.
- Shenzen Hangming New Material Technology Co. Ltd.
- Shenzen Heyue Tongchuang International Trade Co. Ltd.
- Shenzen Yaxintong Optical Cable Co. Ltd.

- Wuhan Yailong Packaging Co. Ltd.
- Shenzhen Dacheng New Energy Co. Ltd.

### Tantangan dan Kendala

Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi Proyek Strategis Nasional Industri Ladi adalah:

- a. Luasan hamparan berupa zona industri seluas 33 Ha dimana masih belum memenuhi syarat perizinan Kawasan Industri dengan luasan minimal 50 Ha.
- b. Dari dokumen *masterplan*, secara status tata ruang terdapat peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±400 hektar

### Rekomendasi

Beberapa yang dapat disampaikan untuk Proyek Strategis Nasional Industri Ladi adalah:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemenuhan luasan minimal zona industri dengan dilakukan dengan penambahan 17 Ha mengingat proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional.
- b. Pemerintah Daerah dapat memberikan perizinan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk dapat dimaksimalkan dengan inisiatif seperti yang dilakukan untuk Kawasan Mangrove, sehingga Kawasan tersebut dapat dimaksimalkan.

**BAB**  
**5**

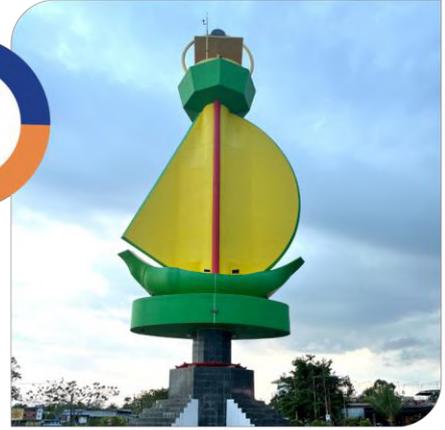


**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**



**Tugu Iman dan Taqwa  
di Kabupaten Karimun**

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



## 5.1 Kesimpulan

### 5.1.1 Indikator Makro Ekonomi

1. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,51 (yoy), tumbuh sebesar 2,83 persen dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan I-2022 (yoy). Jika dilihat per triwulan pada akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, pada triwulan I-2023 perekonomian Kepri mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen (q-to-q).
2. Pada triwulan I 2023 PDRB (ADHB) mencapai Rp80,32 Triliun. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp34,83 T (43,37%), kemudian disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp33,07 T (41,17%) pada PDRB Regional Kepri.
3. Berdasarkan total perolehan PDRB, rasio tersebut sejalan dengan proporsi komponen pengeluaran pembentuk PDRB Provinsi Kepri, dimana komponen PMTB memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp34,83 T (43,37%), kemudian disusul oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp33,07 T (41,17%) pada PDRB Regional Kepri, dengan demikian kondisi perekonomian masyarakat Kepri sudah mulai kembali bangkit melalui stimulus fiskal yang ada. Peningkatan kontribusi pemerintah terhadap PDRB Provinsi Kepri terus dioptimalkan dengan adanya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah.
4. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau Triwulan I-2023 memberikan kontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera (terbesar ke-5), kontribusi terbesar ke-5 tersebut masih tetap konsisten dengan pencapaian triwulan sebelumnya. PDRB Kepulauan Riau mendukung PDB nasional dengan kontribusi sebesar 1,58%.

5. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi wilayah yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Selain itu dengan meningkatnya konsumsi pasca Covid-19, sektor Perdagangan juga menjadi sektor potensial yang dapat meningkat seiring dengan landainya penyebaran covid-19.
6. Pada bulan Maret 2023, tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,77 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 4,97 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Maret 2022 menjadi 113,22 pada Maret 2023. Tingkat deflasi month to month Maret 2023 Kepri sebesar 0,29 persen.
7. Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan I 2023 mencapai US\$5.159,95 juta, angka tersebut tumbuh sebesar 14,85 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2 (*c-to-c*). Sampai dengan triwulan I 2023, sektor non migas memberikan andil cukup besar pada nilai ekspor dengan persentase sebesar 79,99 persen (US\$4.127,34) dan nilai tersebut tumbuh sebesar 22,17 (*c-to-c*). Perolehan nilai tersebut didominasi oleh sektor Industri sebesar US\$3.826,48 juta (meningkat 14,85% (*coc*)), yang kemudian disusul dengan hasil tambang dengan kontribusi sebesar US\$267,84 juta (meningkat 1,580% (*coc*)), dan sektor pertanian sebesar US\$33 juta (meningkat 7,79% (*coc*)).
8. Memiliki letak geografis yang strategis untuk melakukan ekspedisi global, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan potensi ekspor produk Kepri dengan lebih maksimal. Peningkatan ekspor juga dapat didorong melalui produktivitas UMKM dalam mendorong produk *Go Global* yang ada di Kepri. Produktivitas tersebut juga dapat ditopang melalui dukungan Kredit Program (KUR dan UMi) yang berasal dari APBN. Selain itu, Kanwil Khusus Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendorong UMKM di Provinsi Kepri untuk ekspor melalui program Klinik Ekspor.
9. Perkembangan impor Provinsi Kepulauan Riau hingga triwulan I 2023 mencapai US\$4.940,17 juta, meningkat sebesar 22,69 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Nilai impor tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor nonmigas dengan nilai impor sebesar US\$3.946,10 (80,04 persen) dari total impor Provinsi Kepri, yang didominasi oleh sektor industri pengolahan yaitu mencapai US\$3.874,42 juta, meningkat 22,93 persen dari periode tahun sebelumnya.
10. Berdasarkan data tingkat kemiskinan Provinsi Kepri pada periode Maret - September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03%). Apabila dibandingkan pada bulan Maret 2022 terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 2,79 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kepri masih jauh

dibawah persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 9,57% di periode September 2022.

11. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.107.353 orang, turun 152.359 orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri pada Februari 2023 mencapai angka 7,61 persen, turun 0,41 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.023.125 orang, meningkat sebanyak 50.000 orang dari Februari 2022.
12. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau periode September 2022 yang diukur dengan Rasio Gini tercatat sebesar 0,325 atau turun sebesar 0,017 poin dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2022 sebesar 0,342. Angka Rasio Gini pada periode September 2022 tersebut masih berada dibawah tingkat ketimpangan Nasional yang mencapai 0,381.
13. Tren Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan dengan nilai 105,62. Nilai tersebut lebih tinggi 0,15 poin persen dibandingkan NTP Nasional dengan nilai 105,47. Nilai tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen dibandingkan dengan NTP di bulan Februari 2023 (*m-to-m*).
14. Tren Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Kepri pada bulan Maret 2023 mengalami kenaikan Nilai Tukar Petani sebesar 1,04 persen atau turun dari 110,66 menjadi 111,81. Naiknya Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 1,33 persen lebih besar daripada kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,29 persen.
15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen menjadi 76,46 pada tahun 2022 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 75,79. IPM Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan peringkat ke 4 tertinggi tingkat nasional untuk tiga tahun berturut-turut, sedangkan kota Batam mendapatkan peringkat 26 untuk tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.

### 5.1.2 Analisis Fiskal Regional

1. Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.379,15 miliar atau 20,14 persen dari pagu pada periode Q1 2023. Penerimaan Perpajakan masih mendominasi Pendapatan Negara, dengan porsi 89,23% sedangkan dan PNBPN dengan porsi 10,77 persen.
2. Penerimaan Pajak Dalam Negeri meningkat hingga Rp345,63 miliar (23,16%). Tiap komponen penerimaan Pajak Dalam Negeri mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2022.
3. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional menurun sebesar Rp84,59 miliar (-22,89%). Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar/Pungutan

Ekspor. Kinerja penerimaan dari Bea Masuk sudah cukup baik dengan peningkatan penerimaan sebesar Rp 26,13 miliar (11,95%). Namun Penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor turun sebesar (-73,34%).

4. Peningkatan PPN menunjukkan pergerakan usaha semakin menggeliat. Peningkatan tersebut juga ditopang dengan kenaikan tarif PPN yang semula 10 persen menjadi 11 persen.
5. Penerimaan PBB meningkat karena penerimaan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara yang cukup tinggi sebesar Rp2.265 juta sedangkan pada periode triwulan I tahun 2022 hanya sebesar Rp369 juta.
6. Penerimaan cukai meningkat karena terdapat kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen untuk rokok jenis tertentu yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Selain itu, terdapat pabrik rokok di Batam berorientasi ekspor, namun pada periode triwulan I tahun 2023, porsi penjualan lokal lebih besar dibandingkan dengan penjualan ekspor.
7. Penerimaan Bea Keluar menurun karena terdapat perbedaan tarif yang dikenakan terhadap komoditi *Crude Palm Oil* (CPO). Pengenaan tarif bea keluar menyesuaikan harga komoditas/referensi CPO. Harga jual komoditi CPO menurun pada periode TW I tahun 2023 sehingga penerimaan bea keluar ikut turun.
8. Pendapatan PNPB menurun yang disebabkan oleh Pendapatan BLU yang menurun drastis sebesar Rp74,57 miliar (-67,93%). Secara fakta, pendapatan BLU BP Batam telah terealisasi sebesar Rp386,30 miliar. Namun tidak semua pendapatan tersebut dapat dicatat ke Pendapatan Negara karena terkendala migrasi pencatatan dari aplikasi pencatatan BP Batam (*Finance Billing Management System, FBMS*) ke aplikasi SAKTI yang digunakan KPPN untuk mencatat Pendapatan BLU.
9. Pada periode Q1 2023, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2,12 triliun atau meningkat 14,02 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap rasio perpajakan. Rasio pajak periode Q1 2023 sebesar 2,64 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2022, yaitu sebesar 2,57 persen.
10. Realisasi belanja negara sebesar Rp2.825 miliar atau 17,17% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 10,66 persen jika dibandingkan dengan periode Q1 2022.
11. Kinerja belanja modal semakin membaik dibanding periode yang sama ditahun 2022. Realisasi belanja modal pada Q1 sebesar Rp122,35 miliar dari pagu Rp2.333,52 miliar atau sebesar 5,24 persen dari pagu. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal sebesar Rp45,03 miliar dengan pagu sebesar Rp1.763,28 miliar atau 2,55 persen dari pagu.

12. Realisasi TKDD periode Q1 2023 sebesar Rp1.834,39 miliar atau 23,06 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut meningkat 2,93 persen dibandingkan dengan realisasi Q1 2022.
13. Pada APBN regional Kepri tahun 2023, kebijakan defisit anggaran kembali diambil dengan besaran defisit sebanyak Rp4.640,36 miliar. Pada periode Q1 2022, realisasi anggaran mencatat defisit sebanyak Rp445,77 miliar. Defisit tersebut hanya sebesar 9,61 persen dari anggaran defisit yang ditetapkan.
14. Kredit Program dapat disalurkan sebesar Rp239,15 miliar pada periode Q1 2023. Dari angka tersebut Penyaluran KUR sebanyak Rp239,00 miliar (99,94%) dan penyaluran UMi sebesar Rp149 juta (0,06%). Penyaluran kredit program tersebut dapat meliputi 3.278 debitur (KUR) dan 30 debitur (UMi).
15. Penyaluran Kredit Program pada Q1 2023 turun dibandingkan pada Q1 2022 dengan jumlah penyaluran sebesar Rp600,68 miliar atau turun sebanyak 60,19 persen. Penurunan tersebut terjadi pada Penyaluran KUR (-59,74) dan UMi (-97,90%). Penurunan penyaluran tersebut disebabkan oleh adanya perubahan peraturan terkait penyaluran kredit program yang terbit setelah tahun anggaran berjalan yaitu diakhir Januari 2023. Keterlambatan penetapan peraturan ini ditambah dengan perubahan ketentuan penyaluran kredit program, otomatis membuat lembaga penyalur belum dapat menyalurkan kredit program langsung pada awal tahun.
16. Pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp2.729,14 miliar atau sebesar 19,84 persen dari pagu anggaran. Realisasi pendapatan daerah tumbuh sebesar 27,08% dibanding periode Q1 2022;
17. Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, yaitu sebesar Rp1.774,05 miliar (65% dari pendapatan daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp952,68 miliar 35 persen dari pendapatan daerah). Namun demikian, PAD dapat tumbuh 50,18 persen dibanding periode Q1 2022.
18. Pertumbuhan PAD ditopang oleh meningkatnya Pajak Daerah sebesar Rp270,79 miliar (49%) dan Retribusi Daerah Rp22,76 miliar (124%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan potensi PAD sehingga dapat tumbuh sebesar 50,18 persen pada tahun 2022.
19. Kebijakan pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri, khususnya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam usaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak dengan cara mengintensifikasi penerimaan pajak reklame, PBB, dan BPHTB secara efektif dapat meningkatkan PAD.
20. Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp1.734,93 miliar atau 12,02 persen dari pagu. Realisasi Q1 2023 lebih baik dari periode sebelumnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 32,03 persen. Tiap komponen belanja daerah mencatatkan

peningkatan realisasi dibandingkan periode Q1 2022. Realisasi Belanja Operasi sebesar 13.21 persen dari atau tumbuh 21,21 persen, realisasi Belanja Modal sebesar 3.32 persen atau tumbuh 28,63 persen, realisasi belanja transfer sebesar 19.83 persen atau tumbuh sebesar 181,34 persen dibanding periode Q1 2023. Namun demikian, pada sektor Belanja Modal, walaupun realisasi tumbuh dibandingkan dengan periode Q1 2022, namun catatan realisasi sebesar 3.32 persen masih perlu ditingkatkan.

### 5.1.3 Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi Geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Dengan wilayah yang didominasi oleh perairan, dimana 96 persen wilayahnya adalah lautan dengan 1.350 pulau besar. Dengan kondisi geografis ini, tentunya potensi kelautan Provinsi Kepulauan Riau sangat besar dan masih belum dimaksimalkan.
2. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang potensial mengingat kondisi wilayah Kepulauan Riau yang berupa kepulauan maka potensi Perikanan dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi *local issue* dimana potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dari Kepulauan Riau belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Dengan sektor unggulan daerah yakni sektor perikanan, diangkat profil Koperasi Marin Agri Sejahtera yang telah dirintis sejak 2018 dan menjadi produsen kelautan perikanan. Kegiatan koperasi yang pada awalnya berupa kegiatan budidaya yang dilakukan berbasis kelompok, saat ini telah dikembangkan menjadi kegiatan budidaya skala industri yang tetap berbasis kelompok sehingga saat ini tercipta budidaya berbasis plasma inti yang memiliki daya ungkit yang lebih baik.
4. Untuk peningkatan potensi ekspor, Koperasi Marin Agri Sejahtera melakukan Kerjasama dengan VCPlus Singapura melalui penandatanganan MoU yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan VCPlus sebagai mitra dalam fintech dan digital market, kemudahan akses finansial tersebut merupakan terobosan perusahaan asing dalam kegiatan budidaya. Hal ini menjadi *local issue* tersendiri dimana pihak koperasi mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan lokal. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Kanwil DJPb Provinsi Kepri dengan melakukan komunikasi dan peninjauan terkait pembiayaan UMi maupun KUR Cluster yang disambut baik oleh pengurus Koperasi.
5. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Perseroda PT Pelabuhan Kepri pada tahun 2021 maka telah sah perubahan hukum Perseroda tersebut yang menjadi babak baru yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kepri. Dengan adanya Perda ini

dan Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen luasnya adalah laut dengan potensi keluatan yang tinggi, PT Pelabuhan Kepri diharapkan mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik agar mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri khususnya di bidang kepelabuhanan.

6. PT Pelabuhan Kepri sebagai BUMD bergerak dalam usaha pengelolaan labuh jangkar, usaha layanan kepelabuhanan, suplai kebutuhan kapal laut saat belayar, survei kemaritiman, inspeksi dan pembersihan bawah laut, perbaikan kapal, penanggulangan kebocoran minyak di laut, serta usaha kepelabuhanan lainnya yang menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
7. Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk Kepulauan dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia sehingga menjadikan Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah pelayaran Internasional. Selain itu, terdapat pula Kawasan perdagangan Bebas Indonesia yaitu Kota Batam, Daerah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Batam, Bintan, Karimun. Hal ini menjadi potensi yang sangat luar biasa bagi PT Pelabuhan Kepri, apabila PT Pelabuhan Kepri dapat menjadi jembatan dalam koneksi pelayaran dan perdagangan kawasan-kawasan khusus ini, maka pendapatan BUMD PT Pelabuhan Kepri dan PAD Provinsi Kepulauan Riau akan sama-sama naik dengan tinggi.

#### 5.1.4 Analisis Tematik

##### - Ketahanan Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam kategori yang rendah yang apabila dirinci lebih dalam dapat diketahui komponen dengan nilai terendah yakni komponen ketersediaan, sedangkan komponen keterjangkauan dan pemanfaatan relatif tinggi. Memperhatikan kondisi geografis Kepulauan Riau yang 96 persennya merupakan lautan dan struktur tanah bebatuan serta pertambangan membawa konsekuensi keterbatasan sektor pertanian bergerak secara optimal. Kepri bukanlah sebagai wilayah produsen sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap negara dan provinsi lain dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sehubungan dengan nilai IKP, Provinsi Kepri berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia.
2. Produksi Beras di Kepri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif diantara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Produksi Beras di Kepri mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,82 persen. Dengan kontribusi tertinggi dari Kabupaten Natuna (34,97%). Kabupaten yang mengalami pertumbuhan positif ditahun 2021 adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (47,23%), diikuti Karimun (35,88%), dan Lingga (23,97%) sedangkan terdapat dua Kabupaten

- yang mengalami pertumbuhan negatif ditahun 2021 yaitu Kabupaten Bintan (-17,87%) dan Natuna (-26,44%).
3. Secara rata-rata dari 2017 sampai dengan 2022 total realisasi pengadaan beras oleh Subdivre Bulog Tanjungpinang sebanyak 9.963,61 ton. Dengan realisasi yang dominan terjadi dibulan April, September, dan November. Selanjutnya, realisasi pengadaan beras oleh Subdivre Bulog Batam pada Program KSPH-BM 2022 telah terealisasi 2.690.892 Kg dengan realisasi tertinggi dibulan Desember (504.220 Kg) dan November (406.130 Kg).
  4. Pada tahun 2020 pengeluaran total bahan makanan untuk wilayah perkotaan adalah sebesar Rp819.974. sedangkan untuk wilayah desa, pengeluaran total bahan makanan sebesar Rp623.234. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pengeluaran untuk konsumsi diwilayah kota sebesar 2,75 persen sehingga menjadi Rp842.537 perbulannya. Pada tahun 2022, pengeluaran konsumsi perkapita untuk bulanan juga mengalami pertumbuhan. Pada wilayah kota terjadi pertumbuhan positif sebesar 3,04 persen sehingga pengeluaran dalam sebulan untuk makanan meningkat menjadi Rp868.122. Sedangkan pada wilayah desa juga mengalami peningkatan sebesar 4,12 persen, sehingga pengeluaran konsumsi perkapita di desa untuk sebulannya menjadi Rp672.520.
  5. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kepri pemerintah melalui kebijakan fiskal mempersiapkan program terkait ketahanan pangan. Total pagu anggaran untuk program ketahanan pangan di Kepri pada tahun 2022 sebesar Rp181,29 miliar, dan telah terealisasi sebesar Rp173,82 miliar atau 95,88 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2023, pagu anggaran ketahanan pangan sebesar Rp58,39 miliar atau menurun -67,79 persen dibandingkan anggaran di tahun 2022. Kontribusi terbesar untuk output program ketahanan pangan di Kepri berada pada output Prasarana Bidang SDA dan Irigasi sebesar (Rp15,83 miliar), diikuti Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Rp14,33 miliar).
  6. Sehubungan dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk Program Ketahanan Pangan, terdapat tiga Program yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan di Kepri, yaitu : (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat, (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Total anggaran untuk ketiga program tersebut sebesar Rp10,18 miliar.
  7. Total anggaran Dana Desa Kepri ditahun 2022 untuk kegiatan ketahanan pangan sebesar Rp20,92 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,89 miliar atau sudah

teralisasi sebesar 71,18 persen. Kegiatan dengan pagu terbesar adalah kegiatan Sarpras Lainnya (Rp11,66 miliar), diikuti kegiatan PKTD Pertanian dan Perkebunan (Rp4,67 miliar).

8. Beberapa kendala dan permasalahan terkait dengan ketahanan pangan, yaitu :  
Masih rendahnya Indeks Ketahanan Pangan di Kepri dikarenakan tidak meratanya nilai IKP antara wilayah kota dan kabupaten, Ketergantungan Pasokan Pangan dari luar daerah Kepulauan Riau masih relatif tinggi, Cadangan pangan pemerintah daerah masih rendah, Keterbatasan produksi karena faktor cuaca (wilayah Kepri masuk non Zona Musim), kondisi lahan baik dari segi luas lahan dan kualitas lahan, SDM petani serta pengairan yang belum optimal, Faktor cuaca yang tidak menentu yang dapat menimbulkan ombak tinggi yang menjadi permasalahan dalam penyaluran distribusi, Persoalan distribusi karena Kepri wilayah kepulauan yang terpisah oleh lautan dan jarak antar pulau cukup jauh, dan Fluktuasi harga karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran komoditas pangan.

#### - **Pengelolaan Sampah**

1. Apabila dilihat realisasi pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020 sampai dengan 2022, Kepri belum mencapai target persentase pengurangan dan penanganan sampah.
2. Dukungan APBN untuk program pengelolaan sampah di provinsi kepri dianggarkan pada tahun 2018, 2021, dan 2023. Anggaran program pengelolaan sampah tersebut dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
3. Dukungan Fiskal terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang melingkupi: Peningkatan peran sertamasyarakat, penyediaan sarpras, dan penanganan sampah. Anggaran untuk peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan sarpras ditahun 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022, sedangkan anggaran penanganan sampah mengalami kontraksi sebesar -15,13 persen. Secara total anggaran ketiga sub kegiatan pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang ditahun 2023 mengalami kontraksi -0,30 persen dibandingkan tahun 2022.
4. TPA Keseluruhan Pulau Bintan masih mengandalkan TPA milik Kota Tanjungpinang (termasuk Kabupaten Bintan), sehingga kapasitas nya saat ini sudah penuh.
5. APBD DLH Tanjungpinang terkait dengan sarana dan prasarana masih kurang. Saat ini kota Tanjungpinang masih kekurangan Kontainer Sampah tepi jalan.

Untuk saat ini jumlah kontainer belum dapat memadai pengelolaan sampah untuk seluruh penduduk tanjungpinang, rasio nya hanya 2,6 persen.

6. Minimnya fasilitas septiktank yg ada di pulau Penyengat (saat ini baru terdapat 4 titik) yg berpotensi mencemari lautan apabila tidak lagi dapat menampung dengan kapasitas yang ada saat ini.
7. Usia Alat Berat (seperti : loader, dozer, dan excavator) untuk pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang banyak yang sudah tua, sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan yang mahal.
8. Tidak tercapainya target Pengelolaan sampah di Kepri dari tahun 2020-2022 perlu menjadi perhatian.

#### - **Air Bersih dan Sanitasi Layak**

1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 91,82 persen atau meningkat 1,09 persen jika dibandingkan tahun 2021. Kepulauan Anambas memiliki persentasi akses terhadap air minum layak yang rendah di Kepri (28,56%), Sedangkan kota Batam memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap air minum layak (95,34%). Mayoritas Kota/Kabupaten di Kepri memiliki persentase diatas 80 persen untuk akses terhadap air minum layak, kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas (28,56%).
2. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kepri di tahun 2022 sebesar 87,74 persen atau menurun 4,23% jika dibandingkan tahun 2020. Kepulauan Anambas memiliki persentasi akses terhadap sanitasi layak yang rendah di Kepri (29,07%). Sedangkan Kab. Karimun memiliki persentase tertinggi untuk akses terhadap sanitasi layak (97,01%). Mayoritas Kota/Kab di Kepri memiliki persentase diatas 70 persen untuk akses terhadap sanitasi layak, kecuali Kabupaten Lingga (65,51%) dan Kepulauan Anambas (29,07%).
3. Pagu APBN untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Kepri mengalami tren penurunan dari tahun 2018 – 2023. Pada tahun 2018 pagu APBN untuk program Air Bersih dan Sanitasi di Kepri sebesar Rp583,12 miliar, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp145,56 miliar, atau terjadi pertumbuhan negative sebesar -75,04 persen. Realisasi anggaran terbesar untuk Program Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Kepri terjadi pada tahun 2022 (99,24%), 2021 (96,11%), dan 2019 (87,61%).

#### - **Kinerja Program PSN Ongoing**

1. Kawasan Industri Pulau Ladi merupakan kawasan industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industry yang berwawasan lingkungan dengan

- prinsip eco-green industry dan zero waste. Kawasan Industri ini telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat No. 654/259/B.UM-SET/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Pengelolaan Limbah di Pulau Ladi Kota Batam.
2. Kawasan Industri Pulau Ladi merupakan kawasan industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah industri yang berwawasan lingkungan dengan prinsip eco-green industry dan zero waste. Kawasan Industri ini telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat No. 654/259/B.UM-SET/2020 tertanggal 17 Februari 2020 perihal Dukungan Pengembangan Kawasan Industri Pengelolaan Limbah di Pulau Ladi Kota Batam.
  3. Sampai dengan triwulan I 2023, Progres Kawasan Industri Ladi sudah dibuat Studi Kelayakan, Masterplan, Urban Design Guideline (UDGL) dan sedang dalam proses penyelesaian Detailed Engineering Design (DED) untuk tahapan Dokumen Perencanaan. Dikarenakan Kawasan Industri Ladi merupakan Proyek Strategis Nasional maka tahapan pelaksanaan setiap tahap alur prosesnya dapat dilakukan secara paralel. Oleh karena itu di tahap Perizinan telah diselesaikan KKPR Darat dan Laut serta telah diselesaikan Struktur Organisasi pada tahap operasional.
  4. Kawasan Industri Ladi ini menerapkan Sustainable Development Goals 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu pengembangan kawasan industri ini zero emission yang selaras dengan visi COP26. Limbah diolah menjadi energi atau bahan baku industri lainnya.
  5. Kawasan Industri Ladi diproyeksikan apabila tahap 1 PT. KI Ladi beroperasi ( $\pm$  300ha), akan mendatangkan manfaat berupa nilai tambah di 8 sektor, 12.000 tenaga kerja lokal, serta pajak daerah. Dengan pendekatan total economic value, Nilai EIRR telah mempertimbangkan hilangnya Nilai Ikan, Cadangan Karbon, dan Biodiversitas sebesar 11.5 miliar.
  6. Pola produksi limbah di Kota Batam cenderung fluktuatif dalam periode 2012-2021, namun tren menunjukkan arah positif. Berdasarkan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, tercatat periode 2011-2018 limbah yang diolah diluar KPLI (Kota Batam) sebesar 35.5%. Di sisi lain isu limbah B3 tertuang dalam Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 dan perda RPJMD Kota Batam 2021-2026.

7. Total investasi PT. KI Ladi sebesar 5 triliun dalam mengembangkan Kawasan Industri di Pulau Ladi serta telah ada tenant yang pasti akan mengisi ke dalam Kawasan Industri Ladi.

## 5.2 Rekomendasi

### 5.2.1 Kepada Pemerintah Pusat

1. Salah satu penyebab kurang maksimalnya penyerapan belanja modal setiap tahun adalah gagal lelang. Dalam upaya mengatasinya, Direktorat Pelaksanaan Anggaran diharapkan dapat mendorong satuan kerja agar dapat melaksanakan administrasi pelaksanaan lelang saat DIPA telah diterima pada Year-1 (Pra DIPA bulan November-Desember). Hal ini untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, sehingga proses lelang dapat dilaksanakan lebih awal.
2. Kebijakan *automatic adjustment* menjadi salah satu faktor penyerapan belanja rendah, khususnya belanja modal. Berdasarkan evaluasi di tahun sebelumnya, anggaran belanja modal yang berstatus *automatic adjustment* hingga akhir tahun, berpotensi tidak terserap karena pelaksanaan lelang membutuhkan waktu. Padahal belanja modal merupakan salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Anggaran perlu melakukan evaluasi atas kebijakan *automatic adjustment*, agar sebaiknya kebijakan tersebut tidak diterapkan terhadap belanja modal, agar belanja modal dapat segera dilaksanakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Kepri memiliki karakteristik geografis yang berpotensi meningkatkan produktivitas hasil kekayaan laut, namun penyaluran kredit program tertinggi sampai saat ini masih sektor perdagangan. Dalam upaya untuk memperluas akses pembiayaan Kredit Program kepada masyarakat khususnya kepada nelayan, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Direktorat Sistem Manajemen Investasi bersama dengan Menko Perekonomian) agar memformulasikan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi/aktivitas usaha nelayan yang sangat bergantung kepada kondisi laut dan cuaca, sebagai contoh: proses pembayaran angsuran kredit disesuaikan dengan masa kerja (melaut) dari nelayan.
4. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan) perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan dukungan bantuan jangka panjang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian permodalan dan pelatihan untuk memulai usaha, disamping pemberian bantuan perlindungan sosial yang bersifat sementara (jangka pendek).

5. Keberhasilan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tahun 2022, dapat dimaksimalkan lagi dengan menggunakan data wajib pajak dari PPS, untuk menggali dan mengoptimalkan potensi dan kepatuhan dari wajib pajak.

### 5.2.2 Kepada Pemerintah Daerah

1. Pemetaan Dukungan Fiskal terhadap UMKM di Kepri yang masih bersifat sporadis, dikarenakan belum adanya data UMKM yang terintegrasi. Diharapkan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM) dapat memperkuat database UMKM di Kepulauan Riau, tidak terbatas pada karakteristik UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, Produk UMKM unggulan di Provinsi Kepulauan Riau, tingkatan kapasitas UMKM di Provinsi Kepulauan Riau
2. Diharapkan setiap Pemerintah Daerah di Provinsi, Kota dan Kabupaten agar meningkatkan pencatatan data calon debitur di Aplikasi SIKP, agar membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan KUR atau UMi
3. Perlunya optimalisasi peran 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ), yakni Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu KEK Nongsa, KEK Galang Batang dan KEK Batam Aero, untuk mendorong peningkatan penanaman modal dalam upaya menurunkan angka TPT.
4. Selain KEK yang telah ada saat ini, guna memaksimalkan potensi kelautan Kepulauan Riau, dapat disiapkan pembentukan KEK Perikanan Budidaya yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan masing-masing dapat berperan dalam ekosistem budidaya.
5. Benchmarking Kawasan ekonomi khusus IRDA (*Iskandar Regional Development Authority*) untuk meningkatkan capaian penanaman modal di FTZ BBK (Batam, Bintan, Karimun). Capaian investasi IRDA (*Iskandar Regional Development Authority*) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dengan capaian BBK (Batam Bintan Karimun FTZ), hal ini tentunya dapat menjadi *concern* dari pemerintah daerah dikarenakan posisi dari IRDA dan BBK sama-sama strategis dan epicentrumnya juga sama-sama di Singapura.
6. Menerapkan *Dual-Track Strategy* dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan di Kepri tidak bisa hanya berkonsentrasi di BBKT (Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang) saja, masih ada tiga kabupaten lainnya yaitu NAL (Natuna, Anambas, dan Lingga). Pemerintah daerah perlu memikirkan akselerasi pembangunan BBKT untuk menjadi Kawasan yang maju dan berdaya saing namun disisi lain juga perlu mengembangkan potensi dan peluang ekonomi baru di NAL.

7. Sehubungan dengan dukungan terhadap sektor perdagangan, diperlukan alokasi anggaran fiskal untuk mendorong pembangunan satu data UMKM yang terintegrasi sehingga setiap dukungan fiskal bagi UMKM di kepri dapat tepat sasaran dan memiliki dampak yang terukur.
8. Sehubungan dengan kegiatan labuh jangkar, diperlukan regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah atas satgas keamanan wilayah labuh jangkar, regulasi atas jenis dan tarif, regulasi terkait pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan jasa labuh dan regulasi lainnya yang dapat mempermudah pelayanan PT Pelabuhan Kepri sehingga dapat meningkatkan minat *stakeholders* dalam memanfaatkan layanan wilayah labuh jangkar yang berada dibawah wilayah kerja PT Pelabuhan Kepri.
9. Kebijakan Pemerintah Kota Batam untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah lain di Kepulauan Riau agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.
10. Selain itu, kebijakan untuk menertibkan reklame illegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjung Pinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kebijakan tersebut terbukti efektif untuk meningkatkan pajak reklame hingga 70%. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame illegal. Misalnya penertiban izin PBG. Pemerintah Kota Batam mengadakan program penagihan intensif, keringan pajak, dan “jemput bola” menggelar *roadshow* pelayanan pembayaran pajak. Program untuk mengoptimalkan pendapatan PBB dan BPHTB tersebut dapat direplikasi oleh pemda lainnya.
11. Pemerintah Kota Batam mengadakan program penagihan intensif, keringan pajak, dan “jemput bola” menggelar *roadshow* pelayanan pembayaran pajak. Program untuk mengoptimalkan pendapatan PBB dan BPHTB tersebut dapat direplikasi oleh pemda lainnya.
12. Melalui hasil FGD dengan pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepri, diketahui bahwa tiap pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi untuk disahkan dan menjadi dasar pemungutan perpajakan, sesuai dengan undang-undang HKPD. Penetapan peraturan perpajakan dan retribusi menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat optimal. Pemerintah daerah agar terus secara intensif melakukan percepatan penyelesaian peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan, yang akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah masing-masing.

13. Realisasi belanja modal sebesar Rp80,74 miliar atau 3.32% dari total pagu belanja modal sebesar Rp2.429,07 miliar. Pemerintah daerah agar lebih intensif dalam pelaksanaan realisasi belanja modal agar dapat terserap secara maksimal pada periode triwulan berikutnya hingga akhir tahun, yang akhirnya diharapkan dapat memberikan efek stimulus terhadap perekonomian daerah.
14. Terkait Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau) dapat melakukan pemetaan daerah rawan pangan dimana di Kepulauan Riau terdapat beberapa kabupaten/kota yang rawan pangan, oleh karena itu pemetaan dapat dilakukan sampai pada tingkat kecamatan. Sebagai contoh yakni beberapa wilayah di Lingga, Karimun dan beberapa wilayah di perkotaan seperti di Batam dan Tanjungpinang.
15. Peningkatan produktifitas melalui berbagai program, seperti program modernisasi pertanian, bantuan alsintan dan sarana prasarana lainnya, klister pertanian, peningkatan SDM pertanian dan efektivitas kelembagaan pertanian.
16. Peningkatan produktifitas melalui program Kepri Mandiri Cabai 2022-2024 perlu dikawal pelaksanaannya oleh Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian dan Kesehatan Hewan agar dapat mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya akan berdampak baik bagi ketersediaan cabai di Kepri mengingat tingginya harga cabai yang menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Kepri pada tahun 2022.
17. Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan ke seluruh daerah
18. Mendorong Kerjasama antar pelaku usaha dan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan pangan daerah.
19. Peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui kerjasama dengan *stakeholders* terkait diantaranya Bulog.
20. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau) agar melakukan pemantauan/monitoring terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan terutama pada bulan-bulan akhir tahun yang rawan cuaca ekstrim serta gelombang tinggi.
21. Terkait persampahan, diperlukannya Anggaran tambahan bagi Dinas Lingkungan Hidup Pemprov untuk dapat mengadakan TPA Regional yang akan mengelola sampah untuk regional satu pulau Bintan.
22. Diperlukan Anggaran tambahan untuk mendorong peningkatan pengadaan jumlah kontainer sampah di kota Tanjungpinang
23. Diperlukan Anggaran Tambahan untuk membeli kapal untuk mengosongkan septiktank, selain itu dibutuhkan sarpras pendukung lainnya

24. Diperlukan Anggaran tambahan untuk mengadakan alat berat yang baru di kota Tanjungpinang
25. Perlu penguatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan pengelolaan sampah. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana bagi dinas lingkungan hidup juga perlu dilakukan agar meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.
26. Terkait Air Bersih dan Sanitasi, peningkatan akses terhadap sanitasi layak dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi hidup bersih serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung sanitasi layak khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.
27. Terkait PT Kawasan Industri Ladi yang merupakan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemenuhan luasan minimal zona industri dengan dilakukan dengan penambahan 17 Ha mengingat proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional.
28. Selanjutnya terkait PT Kawasan Industri Ladi, Pemerintah Daerah dapat memberikan perizinan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk dapat dimaksimalkan dengan inisiatif seperti yang dilakukan untuk Kawasan Mangrove, sehingga Kawasan tersebut dapat dimaksimalkan.

### 5.2.3 Kepada Pusat dan Daerah

1. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalkan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di provinsi Kepri.
2. Sektor pengadaan listrik dan gas erat kaitannya dengan penggunaan energi baru terbarukan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengalokasikan APBN/APBD untuk sosialisasi insentif fiskal bagi pelaku usaha yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT), agar penggunaan EBT dapat secara massif dilakukan sehingga mendorong lapangan usaha dan investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kepri.
3. Dalam upaya mengatasi rendahnya persentase masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah dapat menjalankan program hibah air minum dalam upaya meningkatkan akses air minum yang layak. Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari Pemerintah Pusat



kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

#### **5.2.4 Kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Kepri, dan BLU BP Batam**

1. Pendapatan BLU turun karena pencatatan internal BLU (FBMS) belum dapat terkoneksi/migrasi langsung dengan aplikasi SAKTI di KPPN. Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Pengawas BP Batam agar melakukan monitoring secara langsung dan diintensif terhadap pengembangan aplikasi FBMS, sehingga dapat terkoneksi secara langsung dengan aplikasi SPAN. Selain itu, Direktorat SITP juga dapat bekerja sama dengan BLU untuk mengembangkan aplikasi SAKTI yang dapat mengakomodir pencatatan BLU, mengingat aplikasi SAKTI dikembangkan untuk satker non BLU.

# DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sekretariat Negara. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
- . 2020. *Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Nomor 87.*Jakarta: Sekretariat Negara.
- . 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, Nomor 94.* Jakarta: Sekretariat Negara
- . 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.* Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- . 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
- . 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.* Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan
- . 2020. *PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.* Berita Negara RI Tahun 2020, Nomor 277. Jakarta: Kementerian Keuangan
- . 2020. *PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.* Berita Negara RI Tahun 2020, Nomor 736. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- .2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau 2022.* Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- . 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2022.* Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- . 2022. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2022.* Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- . 2022. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2022.* Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- . 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2021.* Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- . 2022. *Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau.* Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

# DAFTAR PUSTAKA

- , 2022. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- , 2023. Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV-2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
- Bank Indonesia. 2022. *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- BP Batam. 2022. *Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun Anggaran 2022 (Definitif)*. Batam: BP Batam
- Intan Andriyani Wijaya dan Marseto, *Analisis potensi sektor ekonomi (location quotient, shift share, dan tipology klassen)*. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 19 (1) 2022.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa) Juni 2020*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022*. Tanjungpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2022. *Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022*. Tanjungpinang: Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2022. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022*. Tanjungpinang: Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Yulianto Pamungkas dan Ririt iriani (2022), *Analisis Lq, Shift Share Serta Tipologi Klassen Pada Pegeseran Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Potensi Sektor Di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1, No.5, Agustus 2022.
- Anggaran Subsidi dan Kompensasi Rp502,4 triliun, Wamenkeu: Bisa Bangun 3.000 Rumah Sakit*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 15 Januari 2023, melalui : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Anggaran-Subsidi-dan-Kompensasi-Rp502,4-triliun>
- Herry Setyawan (2022), *Mengoptimalkan Insentif Fiskal Untuk Menggerakkan Investasi di Masa Normal Baru*. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 8 Februari 2022, melalui : <https://komwasiak.kemenkeu.go.id/in/post/mengoptimalkan-insentif-fiskal-untuk-menggerakkan-investasi-di-masa-normal-baru>
- KEK Galang Batang. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. Diakses pada 17 Januari 2023, melalui : <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Galang-Batang>
- Lida Puspaningtyas dan Nidia Zuraya (2022), *Suku Bunga Acuan BI Naik Lagi jadi 5,5 Persen*. Republika. Diakses pada 19 Januari 2023, melalui : <https://www.republika.co.id/berita/rnaa6i383/suku-bunga-acuan-bi-naik-lagi-jadi-55->

# DAFTAR PUSTAKA

[persen](#)

Siaran Pers Bank Indonesia (2022), *Bi 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan*. Bank Indonesia. Diakses pada 18 Januari 2023, melalui : [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2419522.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419522.aspx)

Siaran Pers Bank Indonesia (2022), *Bi 7-Day Reverse Repo Rate Naik 25 Bps Menjadi 3,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Memperkuat Pemulihan*. Bank Indonesia. Diakses pada 18 Januari 2023, melalui : [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2422622.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2422622.aspx)

*Sinergi Penanganan Dampak Inflasi Melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 15 Januari 2023, melalui : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Sinergi-Penanganan-Dampak-Inflasi>

Viva Budy Kusnandar (2022), *Naik 7 Kali, Suku Bunga The Fed Capai Level Tertinggi dalam 15 Tahun*. Databoks. Diakses pada 6 Februari 2023, melalui : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/16/naik-7-kali-suku-bunga-the-fed-capai-level-tertinggi-dalam-15-tahun#:~:text=Dewan%20Gubernur%20bank%20sentral%20Amerika,tertingginya%20dalam%2015%20tahun%20terakhir>

# DAFTAR ISTILAH

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD, perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

**Badan Layanan Umum (BLU)** instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah/RKUD) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

**Bagian Anggaran (BA)** adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga (K/L) dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara (Contoh: 001 = Majelis Permusyawaratan Rakyat; 015: Kementerian Keuangan; 054 = Badan Pusat Statistik 999 = Bendahara Umum Negara).

**Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN)** adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran K/L seperti subsidi, pembayaran utang, penerusan pinjaman, investasi pemerintah dan dana transfer.

**Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa** adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

**Basis Poin/Basis Point (BPS)** adalah unit pengukuran suku bunga dan persentase lainnya di bidang keuangan. Satu basis poin sama dengan 1/100 dari 1% atau 0,01%, dan digunakan untuk menunjukkan perubahan persentase.

**Bea Masuk (BM)/Impor Duty** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negara tertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

# DAFTAR ISTILAH

**Bea Keluar (BK)/Export Duty** adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaan bea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

**Belanja Diskresi/Discretionary Spending** adalah belanja yang alokasinya didasarkan pada tujuan pemerintah, rencana program untuk mencapainya, serta dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Kebutuhan tersebut diusulkan oleh pemerintah untuk ditelaah dan disetujui oleh DPR/DPRD. Perbedaan utama dengan belanja non-diskresi (mandatory spending), yang jumlah atau porsi alokasinya sudah ditentukan, adalah pada belanja diskresi porsi yang dialokasikan pada setiap awal tahun anggaran dapat berubah-ubah tergantung pada prioritas yang ingin dilaksanakan pemerintahan saat itu dan persetujuan DPR/DPRD.

**Belanja Non-Diskresi atau Belanja Wajib/Non-Discretionary Spending atau Mandatory Spending** adalah belanja yang besarnya sudah diatur sebelumnya seperti alokasi anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedisiplinan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Cukai** adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

**Corona Virus Disease 2019** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

**Cumulative to Cumulative (C to C)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2021)

**Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)** dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar, dan lain sebagainya).

**Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)** dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

**Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadilah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Dana Bagi Hasil (DBH)** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH

# DAFTAR ISTILAH

Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

**Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

**Dana Insentif Daerah (DID)** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

**Dana Perimbangan/Dana Transfer** merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah

**Dekonsentrasi (DK)** pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

**Defisit/Surplus Anggaran** adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplus anggaran.

**E-Government** merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

**Earmarked Tax/Spending** dalam ranah keuangan publik adalah kebijakan untuk mengalokasikan penggunaan atas jenis penerimaan tertentu pada tujuan-tujuan tertentu yang biasanya berkaitan. (Contoh: pajak kendaraan bermotor dialokasikan khusus untuk anggaran perbaikan jalan; cukai rokok dialokasikan khusus untuk anggaran kesehatan).

**Federal Government Spending (FGS)** adalah pengeluaran pemerintah federal (pemerintah pusat) di Amerika. Padanan dari FGS di Indonesia adalah Belanja pada APBN.

**Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas)** merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

**Grace Period** dalam ranah keuangan adalah ketentuan masa tenggang dalam suatu kewajiban pembayaran dimana dalam masa tersebut, kewajiban pembayaran dapat ditunda tanpa dikenakan penalti.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD)** merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1)** merupakan ukuran rata-rata

# DAFTAR ISTILAH

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI)** menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

**Independent Power Producer (IPP)** merupakan entitas yang memiliki fasilitas pembangkit listrik dan menjual energi listrik yang dihasilkan ke PLN.

**Industri Kecil** adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Industri Menengah** adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

**Industri Kecil Menengah (IKM)** merupakan industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.

**Inflasi** adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

**Inflasi Tahun Kalender** adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

**Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)** adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

**Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ)** adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

**Keunggulan Komparatif/Comparative Advantage** adalah kondisi ekonomi dimana suatu daerah dapat memproduksi suatu barang dengan lebih sedikit opportunity cost. Kondisi tersebut berasal dari teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam menjelaskan perdagangan antar negara.

**Keunggulan Kompetitif/Keunggulan Bersaing/Competitive Advantage** adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan atau wilayah untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan atau wilayah lain pada industri atau pasar yang sama.

# DAFTAR ISTILAH

**Kredit Program** merupakan program kredit/pembiayaan pemerintah dengan berbagai skema yang ditujukan untuk pengembangan sektor prioritas,

**Kredit Usaha Rakyat (KUR)** merupakan salah satu skema kredit program yang sumber dananya berasal dari bank dengan suku bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah. Secara umum, KUR bertujuan untuk mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada Lembaga Keuangan.

**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD)** merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD)** merupakan pos penerimaan Pemda untuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputi hibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

**Leverage** dalam ranah finansial adalah penggunaan berbagai macam instrumen pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan dari investasi. Perusahaan dengan porsi pembiayaan (utang) yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya disebut dengan perusahaan dengan leverage yang tinggi. Perusahaan dengan leverage yang terlalu tinggi biasanya tidak terlalu diminati investor karena resiko kebangkrutannya tinggi.

**Location Quotient (LQ)** merupakan metode kuantifikasi tingkat konsentrasi suatu sektor pada suatu wilayah dalam suatu negara dibandingkan dengan negara itu sendiri. Dengan LQ, keunikan suatu wilayah dibandingkan rata-rata nasional dapat terlihat. Nilai LQ lebih besar dari 1 dapat diartikan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif.

**Model Rasio Pertumbuhan (MRP)** adalah perbandingan pertumbuhan suatu sektor antara skala yang lebih luas dan skala yang lebih kecil

**MRP Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)** adalah MRP yang membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah yang lebih kecil dengan wilayah yang lebih besar (contoh: kabupaten dengan provinsi, provinsi dengan negara).

**Month on Month (MoM)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022).

**Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)** dalam perbankan adalah kredit bermasalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

**Okun's Law** merupakan teori dari Arthur Melvin Okun yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka pertumbuhan PDB akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.

**Overlay** dalam analisis ekonomi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggabungkan beberapa analisis lainnya sehingga kesimpulan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

**Pagu Anggaran** merupakan plafon atau batasan tertinggi belanja yang dialokasikan pada entitas pemerintah untuk dibelanjakan.

# DAFTAR ISTILAH

**Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax** adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

**Pajak Daerah/Local Tax** adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

**Pajak Penghasilan (PPH)/Income Tax** adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

**Pajak Perdagangan Internasional (PPI)** adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

**Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST)** adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

**Pelabuhan Transshipment/Transshipment Port** adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat singgah dalam proses pengiriman barang atau kontainer sebelum mencapai tujuan akhir.

**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)** merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan LLPAD.

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

**Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum (PNBP Umum)** adalah PNBP yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi entitas penerima PNBP. Contoh PNBP Umum adalah hasil penjualan barang inventaris kantor, hasil penyewaan BMN, jasa giro, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan.

**Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional (PNBP Fungsional)** penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Contoh PNBP Fungsional meliputi PNBP dari pendidikan, kejaksaan dan peradilan, badan layanan umum, dan lain sebagainya.

**Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA)** merupakan metode pembiayaan berupa pinjaman oleh pemerintah pusat yang diteruskan/dijamin kepada BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD.

**Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)** merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

# DAFTAR ISTILAH

**Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT)** adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

**Penyertaan Modal Daerah (PMD)** merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas

**Penyertaan Modal Negara (PMN)** merupakan bentuk investasi pemerintah pusat pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas

**Phillips Curve** merupakan model ekonomi dari Alban William Phillips yang menggambarkan hubungan berkebalikan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Artinya, ketika tingkat pengangguran menurun, tingkat inflasi meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

**PNBP Ratio/Non-Tax Ratio** adalah rasio yang membandingkan antara realisasi PNBP dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi PNBP.

**Private Power Utility (PPU)** adalah pembangkit listrik swasta terintegrasi yang biasanya menyediakan listrik untuk kawasan industri tertentu.

**Produk Domestik Bruto (PDB)** adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)** adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)** adalah PDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita)** merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakan sebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

**Purchasing Power Parity (PPP)** merupakan metode penyesuaian PDB/PDRB dengan menggunakan konversi nilai berdasarkan daya beli mata uang masing-masing negara. Penyesuaian dengan PPP menghasilkan PDB/PDRB yang lebih riil dalam konteks nilai output yang dihasilkan.

**Pusat Logistik Berikat (PLB)** adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB diselenggarakan oleh badan hukum yang melakukan kegiatan penyediaan dan pengelolaan kawasan PLB.

**Quarter to Quarter (Q-to-Q)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kuartalan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan II 2022)

# DAFTAR ISTILAH

**Rasio Belanja Kesehatan** adalah rasio perbandingan belanja untuk kesehatan dengan total belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor kesehatan.

**Rasio Belanja Infrastruktur** adalah rasio perbandingan belanja untuk infrastruktur dengan total belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada pembangunan infrastruktur.

**Rasio Belanja Pendidikan** adalah rasio perbandingan belanja untuk pendidikan dengan total belanja. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor pendidikan.

**Rasio Belanja Sektoral Terhadap Kontribusi Sektor Kepada PDRB** adalah perbandingan indikatif antara fokus anggaran pemerintah dengan kontribusi sektor unggulan. Rasio ini digunakan untuk melihat pemrioritasan pemerintah pada sektor-sektor unggulan pada suatu wilayah.

**Rasio Utang Terhadap Ekuitas/Debt to Equity Ratio (DER)** adalah rasio yang membandingkan antara utang dan ekuitas (aset bersih) suatu entitas. DER yang tinggi menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki derajat leverage yang tinggi sehingga memiliki resiko yang tinggi dan dapat menjadi kurang menarik di mata investor.

**Rasio Utang Terhadap Pendapatan/Debt to Income Ratio (DTI)** adalah rasio yang membandingkan antara pembayaran utang dan pendapatan bersih pada suatu periode. DTI yang tinggi menunjukkan bahwa pembayaran utang menggerus keuntungan perusahaan sehingga dapat menjadi kurang menarik di mata investor.

**Rebound** dalam perekonomian adalah fase dimana kondisi yang kurang baik atau bahkan negatif, mulai berubah menjadi lebih baik. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, rebound berarti pertumbuhan ekonomi mulai meningkat atau mengalami percepatan.

**Regresi dalam ekonometrika** adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel(-variabel) yang lain

**Regresi dalam ekonometrika dengan Fixed Effect** adalah metode regresi untuk data panel dimana karakteristik masing-masing variabel dependen (contoh: variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten/kota)

**Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** merupakan rencana tahunan pemerintah pusat yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada prinsipnya, RKPD serupa dengan RKP, namun dengan lingkup wilayah yang lebih kecil (Provinsi/Kabupaten/Kota)

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)** adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP

# DAFTAR ISTILAH

Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)** adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPN terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJPN.

**Renewable Energy/Energi Terbarukan** adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alami dapat dipulihkan seiring berjalannya waktu seperti sinar matahari, angin, air, pasang surut gelombang, ombak, panas bumi, dan bioenergi. Saat ini, negara-negara maju mulai mengalihkan sumber energinya ke energi terbarukan karena tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit polusi yang dapat berkontribusi terhadap global warming.

**Retribusi Daerah** merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

**Satuan Kerja (Satker)** adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

**Shale Oil** adalah minyak non konvensional yang diproduksi dari serpihan batu yang mengandung shale oil. Teknologi untuk mengekstraksi minyak dari batuan tersebut relatif baru ditemukan dan memiliki biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan minyak konvensional.

**Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

**Skala Ekonomi/Economy of Scale** merupakan fenomena turunnya biaya produksi perunit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

**Spesialisasi** dalam ekonomi adalah metode produksi dimana suatu negara, daerah, atau unit produksi memproduksi beberapa jenis barang atau jasa saja untuk meningkatkan efisiensi pada sistem produksi secara keseluruhan.

**Tax Ratio** adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRB pada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalan potensi pajak.

**Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po)** adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

# DAFTAR ISTILAH

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguranterbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

**Tugas Pembantuan (TP)** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaannya, diberikan dan tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

**Urusan Bersama (UB)** merupakan kegiatan bersama pusat dan daerah yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat bantuan langsung ke masyarakat dan biasanya dialokasikan dalam bantuan sosial. Pendanaan UB berasal dari APBN dan disertai dengan Dana Pendamping dari APBD.

**Vokasional** dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yang lebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam bekerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

**Volatilitas/Volatility** dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabel untuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

**Year on Year (YoY)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).

